BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
#bangga melayani bangsa

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

2022

LKIP

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Jalan D.I Panjaitan Nomor 5 Palangka Raya 73112 Telepon (0536) 4261952
Website: www.disperkimtan.kalteng.go.id
Email: disperkimtan@kalteng.go.id

DISPERKIMTAN PROV. KALTENG

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-NYA penyusunan **"LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022"** ini dapat diselesaikan. Penyusunan laporan ini secara umum merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan strategi pembangunan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah yang mengarah pada prinsip-prinsip *good governance* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Laporan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja yang telah dicapai serta pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan yang telah dilaksanakan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya dapat memberikan manfaat dan gambaran tentang hasil pembangunan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang telah dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan akhir tahun 2022.

Palangka Raya, Januari 2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ERLIN HARDI, S.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19740109 200212 1 002

DAFTAR ISI

		Hal.
Kata Pengantar ……..		i
Daftar Isi ……..		ii
Daftar Tabel ……		iii
BAB I	**PENDAHULUAN**	
1.1.	Latar Belakang ……	I-1
1.2.	Struktur Organisasi …….	I-2
1.3.	Tugas dan Fungsi ……...	I-3
1.4	Keadaan Pegawai ……..	I-21
1.5.	Keadaan Sarana dan Prasarana ……..	I-25
1.6.	Keuangan …….	I-26
1.7.	Sistematika LKIP ……	I-27
BAB II	**PERENCANAAN KINERJA**	
2.1.	Dasar Perencanaan Kinerja …….	II-1
	2.1.1. Tujuan dan Sasaran ……	II-2
	2.1.2. Strategi ……..	II-3
2.2.	Perjanjian Kinerja Tahun 2022 …….	II-3
2.3.	Rencana Anggaran Tahun 2022 ……..	II-12
BAB III	**AKUNTABILITAS KINERJA**	
3.1.	Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2022 ……	III-1
3.2.	Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Capaian Tahun Sebelumnya..	III-15
3.3.	Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis (Renstra) Organisasi ……..	III-16
3.4.	Capaian Realisasi Kinerja tahun 2022 terhadap standar Nasional ……	III-38
3.5.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan……..	III-39
3.6	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ……	III-40
3.7	Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Kinerja……..	III-41
3.8.	Realisasi Anggaran Tahun 2022 ……..	III-51
BAB IV	**PENUTUP**	
4.1	Kesimpulan ……..	IV-1
4.2	Upaya Tindak Lanjut ……..	IV-3

Lampiran

DAFTAR TABEL

Hal.

Tabel 1.1.	Keadaan Pegawai DPKPP Tahun 2022 ……...	I-21
Tabel 1.2.	Jumlah Ideal Pegawai …….	I-23
Tabel 1.3.	Keadaan Sarana dan Prasarana Dinas Perumahan, Kawasan ……. Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022	I-25
Tabel 2.1	Rekapitulasi Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 …….	II-13
Tabel 2.2.	Rincian Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 …….	II-13
Tabel 2.3	Alokasi Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 Per Sasaran Strategis ……	II-16
Tabel 3.1.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Organisasi Tahun 2022 Terhadap Perjanjian Kinerja …….	III-3
Tabel 3.2.	Persentase Capaian Target Kinerja Sasaran Strategis Organisasi Tahun 2022 Terhadap Perjanjian Kinerja …….	III-7
Tabel 3.3.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Bidang, Sub Subtansi dan Sub Bagian Tahun 2022 Terhadap Perjanjian Kinerja ……..	III-8
Tabel 3.4.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Organisasi Tahun 2021 dan 2022 …..	III-15
Tabel 3.5.	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Bidang, Sub Subtansi dan Sub Bagian Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan 2022 …….	III-18
Tabel 3.6.	Capaian Terhadap Target Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah (Renstra) Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah …….	III-32
Tabel 3.7.	Persentase Capaian Target Kinerja Sasaran Strategis Organisasi Tahun 2022 Terhadap Target Renstra 2021-2026 …….	III-37
Tabel 3.8.	Capaian Target Kinerja Sasaran Strategis Organisasi Tahun 2022 Terhadap Standar Nasional ……	III-38
Tabel 3.9.	Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan yang menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah ……..	III-44
Tabel 3.10.	Realisasi Anggaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan yang menunjang Pencapaian Perjanjian Kinerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah …….	III-53
Tabel 3.11.	Rekapitulasi Realisasi Anggaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan yang menunjang Pencapaian Perjanjian Kinerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah ……	III-56

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan akuntabel demi terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan yang berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, yang merupakan prasyarat utama bagi setiap pemerintahan yang baik *(good governance).*

Salah satu pilar sebagai elemen dasar dari kepemerintahan yang baik tersebut adalah Akuntabilitas. Dalam hal ini yang dimaksud dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah suatu perwujudan pertanggung jawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Alat pertanggungjawaban tersebut adalah sebuah sistem yang diharuskan kepada sebuah organisasi/perangkat daerah adalah berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), berdasar pada amanat Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, yang diubah dengan Undang - Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran yang disusun oleh setiap tingkatan organisasi/perangkat daerah. Secara umum LKIP menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, serta evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKIP adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan LKIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ini bertujuan untuk:

a. memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;

b. sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;

LKIP DPKPP juga merupakan sarana pengukuran capaian kinerja pembangunan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan di Provinsi Kalimantan Tengah yang termuat dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 yang pada tahun 2022 dijabarkan dalam Renja PD DPKPP tahun 2022 dan DPA-SKPD TA. 2022. Dalam dokumen perencanaan dan penganggaran strategis tersebut diantaranya memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaannya.

1.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terdiri atas:

a. Kepala Dinas.

b. Sekretariat, terdiri atas:

   1) Sub Bagian Penyusunan Program; dan

   2) Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian

c. Bidang, terdiri atas:

   1) Bidang Perumahan, terdiri atas:

      a) Sub Koordinator Perencanaan Teknis;

      b) Sub Koordinator Perumahan Swadaya dan Perumahan Formal; dan

      c) Sub Koordinator Pembiayaan dan Pengembangan Kawasan.

   2) Bidang Kawasan Permukiman, terdiri atas:

      a) Sub Koordinator Pendataan;

      b) Sub Koordinator Pencegahan dan Peningkatan Kualitas; dan

      c) Sub Koordinator Preservasi Manfaat dan Pengendalian.

   3) Bidang Pertanahan, terdiri atas:

      a) Sub Koordinator Perencanaan dan pendataan; dan

b) Sub Koordinator Manfaat dan Pengendalian

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah seperti pada gambar berikut :

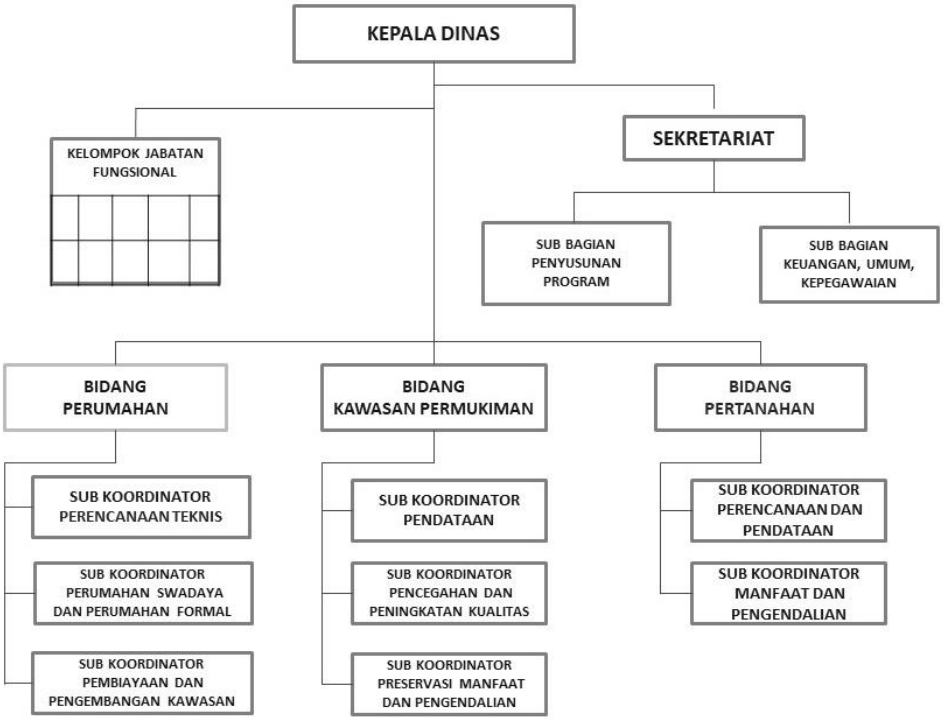

Gambar 1.1 Susunan Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah

1.3 Tugas dan Fungsi

Pembentukan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 29 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah yang menyatakan bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu

Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. perumusan teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. pembinaan dan penyusunan perencanaan dan program;
3. penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas;
4. pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
5. pemberian kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
6. pendukungan penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
7. peningkatan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan;
8. pemberdayaan para pemangku kepentingan bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
9. pemberdayaan para pemangku kepentingan bidang pertanahan;
10. penunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya; dan
11. penjaminan terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Adapun rincian tugas dan fungsi tiap unsur pegawai di DPKPP adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata laksana dan mengembangkan

semua kegiatan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;

b. pembinaan dan penyusunan perencanaan dan program;

c. pembinaan pengembangan permukiman;

d. pemberian rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pengawasan;

e. penyelenggaran urusan ketatausahaan dinas; dan

f. pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif serta perlengkapan, keuangan, aset, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, humas dan rumah tangga, organisasi dan tata laksana, analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menyelenggarakan fungsi:

a. penghimpunan bahan/data perencanaan dan penyusunan program lingkungan hidup serta perencanaan anggaran;

b. penghimpunan bahan/data penyusunan pelaporan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

c. pelaksanaan perumusan administrasi kepegawaian;

d. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan dan aset;

e. pelaksanaan urusan perpustakaan, humas, organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan;

f. pelaksanaan urusan pengelolaan/administrasi keuangan, dan kepegawaian; dan

g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Sekretariat terdiri atas:

1) Sub Bagian Penyusunan Program;

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas fungsi penyiapan bahan/data penyusunan program dan anggaran. Uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Penyusunan Program berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

b. membagi tugas kepada para bawahan Sub Bagian Penyusunan Program sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;

c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Penyusunan Program baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Penyusunan Program dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;

e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Penyusunan Program berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;

f. menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan program dan anggaran;

g. menghimpun bahan-bahan rapat koordinasi program dan LPPD;

h. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja;

i. menyusun perencanaan penerapan dan pencapaian SPM;

j. menyusun pelaporan pengarusutamaan gender;

k. menyusun LAKIP dan Laporan Tahunan;

l. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

2) Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas fungsi pengelolaan keuangan dan aset, pengelolaan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, humas dan protokol serta pengelolaan informasi dan dokumentasi. Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

b. membagi tugas kepada para bawahan Sub Bagian Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;

c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;

e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;

f. melaksanakan pengelolaaan dan pertanggung jawaban pelaksanaan keuangan dan aset;

g. melakukan pembinaan bendaharawan;

h. melakukan penatausahaan dan rekonsiliasi keuangan dan aset;

i. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang perangkat daerah;

j. melaksanakan urusan umum dan administrasi kepegawaian;

k. menyelenggarakan urusan protokol dan hubungan masyarakat pada dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;

l. mengelola organisasi dan tatalaksana;

m. melaksanakan penatausahaan rumah tangga dan perlengkapan;

n. melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

o. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

3. Bidang Perumahan

Bidang Perumahan melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategis, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis pengkajian, pengendalian, pengawasan di bidang teknis perumahan yang meliputi : prasarana, sarana, dan utilitas umum, sesuai dengan rencana tata ruang. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perumahan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan dan penetapan kebijakan dan strategi pada tingkat provinsi di bidang perumahan dengan berpedoman pada kebijakan nasional;

b. perumusan dan penetapan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang perumahan dengan berpedoman pada kebijakan nasional;

c. perumusan dan penetapan kebijakan penyediaan Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangunan;

d. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pada tingkat provinsi di bidang perumahan;

e. penyelenggaraan fungsi operasional dan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi penyediaan rumah dan perumahan;

f. penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan;

g. penyediaan fasilitasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan pada tingkat provinsi;

h. pengalokasian dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;

i. penyediaan fasilitasi penyediaan perumahan bagi masyarakat, terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah;

j. penyediaan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pada tingkat provinsi;

k. pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Bidang Perumahan terdiri atas:

1) Sub Koordinator Perencanaan Teknis;

Sub Koordinator Perencanaan Teknis mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan strategis, monitoring, analisis, evaluasi, pengkajian, dan penyusunan laporan di bidang perumahan. Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Koordinator Perencanaan Teknis berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Koordinator Perencanaan Teknis sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;

c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Koordinator Perencanaan Teknis baik secara lisan dan tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

d. memeriksa hasil pekerjaan pada bawahan lingkungan Sub Koordinator Perencanaan Teknis dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;

e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Koordinator Perencanaan Teknis berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;

f. menyusun dan menyediakan basis data perumahan di Provinsi;

g. menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Provinsi;

h. memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang perumahan di Provinsi;

i. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan pada

tingkat provinsi dalam rangka mewujudkan jaminan dan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam hunian.

j. mengkoordinasikan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan industri bahan bangunan yang mengutamakan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal;

k. mengkoordinasikan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program di bidang perumahan di Provinsi;

l. memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh pada tingkat Provinsi;

m. mengkoordinasikan pencadangan atau penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan bagi Masyarakar Berpenghasilan Rendah pada tingkat provinsi;

n. merumuskan kebijakan dan strategi daerah provinsi dalam penyelenggaraan perumahan dengan berpedoman pada kebijakan nasional;

o. memfasilitasi kerja sama pada tingkat provinsi antara pemerintah provinsi dan badan hukum dalam penyelenggaraan perumahan;

p. melakukan pembinaan meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan bidang perumahan;

q. melakukan pelaporan pelaksanaan tugas;

r. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Perencanaan Teknis secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan

s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Perumahan.

2) Sub Koordinator Perumahan Swadaya dan Perumahan Formal;

Sub Koordinator Perumahan Swadaya dan Perumahan Formal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan kebutuhan rumah meliputi kegiatan pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian rumah komersial, rumah umum, rumah swadaya, rumah khusus dan rumah negara. Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Koordinator Perumahan Swadaya dan Perumahan Formal berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Koordinator Perumahan Swadaya dan Perumahan Formal sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;

c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Koordinator Perumahan Swadaya dan Perumahan Formal baik secara lisan dan tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

d. memeriksa hasil pekerjaan pada bawahan lingkungan Sub Koordinator Perumahan Swadaya dan Perumahan Formal dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;

e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Koordinator Perumahan Swadaya dan Perumahan Formal berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;

f. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi pada tingkat provinsi dalam rangka mewujudkan jaminan dan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam penyediaan perumahan.

g. mengkoordinasikan pencadangan atau penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah pada tingkat provinsi;

h. merumuskan kebijakan dan strategi daerah provinsi dalam penyediaan perumahan dengan berpedoman pada kebijakan nasional;

i. memfasilitasi kerja sama pada tingkat provinsi antara pemerintah provinsi dan badan hukum dalam penyediaan perumahan;

j. melakukan pembinaan meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan bidang perumahan;

k. melakukan pelaporan pelaksanaan tugas;

l. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Perumahan Swadaya dan Perumahan Formal baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Perumahan.

3) Sub Koordinator Pembiayaan dan Pengembangan Kawasan.

Sub Koordinator Pembiayaan dan Pengembangan Kawasan mempunyai tugas mewujudkan perumahan yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang. Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Koordinator Pembiayaan dan Pengembangan Kawasan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Koordinator Pembiayaan dan Pengembangan Kawasan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;

c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Koordinator Pembiayaan dan Pengembangan Kawasan baik secara lisan dan tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

d. memeriksa hasil pekerjaan pada bawahan lingkungan Sub Koordinator Pembiayaan dan Pengembangan Kawasan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;

e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Koordinator Pembiayaan dan Pengembangan Kawasan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;

f. mengembangkan perumahan dengan memperhatikan Masyarakat Berpenghasilan Rendah;

g. melakukan pembinaan meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan bidang perumahan;

h. melakukan pelaporan pelaksanaan tugas;

i. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Pembiayaan dan Pengembangan Kawasan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Perumahan.

4. Bidang Kawasan Permukiman

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai ikhtisar jabatan melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategis, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis pengkajian, pengendalian, pengawasan lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan, yang terencana, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan dan penetapan kebijakan dan strategi pada tingkat provinsi di bidang Kawasan Permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional;

b. perumusan dan penetapan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional;

c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pada tingkat provinsi di bidang kawasan permukiman;

d. penyelenggaraan fungsi operasional dan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman;

e. penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan;

f. penyediaan fasilitasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum kawasan permukiman pada tingkat provinsi;

g. pengalokasian dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya kawasan permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;

h. penyediaan fasilitasi penyediaan kawasan permukiman bagi masyarakat, terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

i. penyediaan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pada tingkat provinsi;

j. pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Bidang Kawasan Permukiman terdiri atas:

1) Sub Koordinator Pendataan;

   Sub Koordinator Pendataan mempunyai ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan strategis, pemantauan, analisis, evaluasi, pengkajian, dan penyusunan laporan di bidang Permukiman. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut:

   a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Koordinator Pendataan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
   b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Koordinator Pendataan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
   c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Koordinator Pendataan baik secara lisan dan tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
   d. memeriksa hasil pekerjaan pada bawahan lingkungan Sub Koordinator Pendataan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
   e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Koordinator Pendataan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
   f. menyiapkan bahan penyusunan rencana program kegiatan di bidang kawasan permukiman;
   g. melaksanakan penyusunan pengembangan pemanfaatan kawasan permukiman;
   h. menyusun rencana biaya di bidang kawasan permukiman;
   i. menyusun sistem informasi kawasan permukiman;
   j. melakukan pendataan tentang kawasan permukiman;
   k. melakukan pengolahan data kawasan permukiman;
   l. melakukan pembinaan meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kawasan permukiman;

m. melakukan pelaporan pelaksanaan tugas;

n. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Pendataan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Kawasan Permukiman.

2) Sub Koordinator Pencegahan dan Peningkatan Kualitas;

Sub Koordinator Pencegahan dan Peningkatan Kualitas mempunyai ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan kebutuhan Kawasan Permukiman meliputi kegiatan pencegahan pambangunan kawasan permukiman secara liar dan tidak terkendali, pencegahan penurunan kualitas kawasan dan upaya-upaya perbaikan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Koordinator Pencegahan dan Peningkatan Kualitas berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Koordinator Pencegahan dan Peningkatan Kualitas sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;

c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Koordinator Pencegahan dan Peningkatan Kualitas baik secara lisan dan tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

d. memeriksa hasil pekerjaan pada bawahan lingkungan Sub Koordinator Pencegahan dan Peningkatan Kualitas dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;

e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Koordinator Pencegahan dan Peningkatan Kualitas berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;

f. melaksanakan evaluasi kinerja, manfaat, dan dampak dari kawasan permukiman.

g. melakukan pembinaan meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kawasan permukiman;

h. melakukan pelaporan pelaksanaan tugas;

i. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Pencegahan dan Peningkatan Kualitas baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Kawasan Permukiman

3) Sub Koordinator Preservasi Manfaat dan Pengendalian.

Sub Koordinator Preservasi Manfaat dan Pengendalian mempunyai ikhtisar jabatan mewujudkan kawasan permukiman yang nyaman teratur dan tertata dengan melakukan perawatan dan pembangunan ulang kawasan untuk mewujudkan kawasan yang diinginkan. Perawatan dimaksudkan juga dengan melakukan pengendalian terhadap kawasan sehingga memiliki manfaat bagi kawasan permukiman secara keseluruhan. Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Koordinator Preservasi Manfaat dan Pengendalian berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Koordinator Preservasi Manfaat dan Pengendalian sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;

c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Koordinator Preservasi Manfaat dan Pengendalian baik secara lisan dan tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

d. memeriksa hasil pekerjaan pada bawahan lingkungan Sub Koordinator Preservasi Manfaat dan Pengendalian dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;

e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Koordinator Preservasi Manfaat dan Pengendalian berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;

f. melaksanakan penyusunan rencana pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman tingkat provinsi;

g. melakukan pengendalian pemanfaatan kawasan permukiman provinsi;

h. melakukan pengelolaan pengendalian penataan kawasan permukiman strategis provinsi;

i. melaksanakan penyusunan peraturan zonase sebagai pedoman pengendalian kawasan permukiman provinsi;

j. mengolah pelayanan pelaksanaan penataan kawasan permukiman provinsi;

k. melaksanakan pengelolaan rencana biaya penataan kawasan permukiman provinsi;

l. melakukan pembinaan meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kawasan permukiman;

m. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Preservasi Manfaat dan Pengendalian baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Kawasan Permukiman.

5. Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan melaksanakan tugas penyiapan bahan yang berhubungan dengan tanah perumahan maupun kawasan permukiman yang didalamnya terkandung dengan perumusan kebijakan dan strategis, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, pengkajian, pengendalian, pengawasan dan penyusunan laporan di Bidang Pertanahan Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

a. penetapan kebijakan dan strategi pada tingkat provinsi di bidang pertanahan dengan berpedoman pada kebijakan nasional;

b. perumusan dan penetapan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang pertanahan pada kebijakan nasional;

c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pada tingkat provinsi di bidang kawasan permukiman;

d. penyelenggaraan fungsi operasionalisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi penyediaan lahan pertanahanan bagi kawasan permukiman;

e. penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan masalah pertanahan di kawasan permukiman;

f. penyedian fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pada tingkat provinsi;

g. pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Bidang Pertanahan, terdiri atas:

1) Sub Koordinator Perencanaan dan Pendataan.

Sub Koordinator Perencanaan dan Pendataan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan strategis, pemantauan, analisis, evaluasi, pengkajian, dan penyusunan laporan di bidang Pertanahan yang berhubungan dengan perumahan dan permukiman. Uraian tugas sebagaimana dimaksud, sebagai berikut:

a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Koordinator Perencanaan dan Pendataan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

b. memberi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Koordinator Perencanaan dan Pendataan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;

c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Koordinator Perencanaan dan Pendataan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Koordinator Perencanaan dan Pendataan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;

e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Koordinator Perencanaan dan Pendataan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;

f. menyusun dan menyediakan basis data pertanahan bagi perumahan dan kawasan permukiman Provinsi;

g. memberlakukan peraturan perundang-undangan bidang pertanahan di perumahan dan kawasan permukiman di provinsi;

h. memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang Pertanahan di perumahan dan kawasan permukiman di provinsi;

i. melaksanakan koordinasi, singkronisasi, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan peraturan pertanahan pada tingkat provinsi dalam rangka mewujudkan jaminan dan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim dan kepemilikan tanah;

j. mengkoordinasikan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program di bidang Pertanahan di kawasan permukiman di provinsi;

k. mengkoordinasikan penyiapan data pertanahan guna pencadangan atau penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman bagi MBR pada tingkat provinsi;

l. merumuskan kebijakan dan strategi daerah provinsi dalam penyelenggarakan tanah bagi kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional;

m. memfasilitasi kerja sama pada tingkat provinsi antara pemerintah provinsi dan badan hukum dalam bidang Petanahan guna penyelenggarakan perumahan dan kawasan permukiman;

n. melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

o. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Perencanaan dan Pendataan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pertanahan.

2) Sub Koordinator Manfaat dan Pengendalian.

Sub Koordinator Manfaat dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Pemanfaatan dan Pengendalian kebutuhan atas tanah di Kawasan Perumahan dan Permukiman meliputi kegiatan pemanfaatan dan pengendalian tanah secara baik guna pencegahan penurunan kualitas kawasan dan upaya-upaya perbaikan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman. Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Koordinator Manfaat dan Pengendalian berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Koordinator Manfaat dan Pengendalian sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;

c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Koordinator Manfaat dan Pengendalian baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Koordinator Manfaat dan Pengendalian dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;

e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Koordinator Manfaat dan Pengendalian berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;

f. menyelenggarakan sosialisasi di bidang pertanahan untuk memasyarakatkan peraturan perundang-undangan permanfaatan tanah yang berlaku untuk mendapatan kepastian hukum pemanfaatan tanah;

g. menyelenggarakan pengendalian dan pencegahan penggunanan tanah dalam kaitan pembangunan kawasan guna mencegah pembangunan kawasan perumahan dan permikiman dibangun tidak terkendali dalam bentuk pengendalaian dan pencegahan lewat pemantauan lapangan dan administrasi pembangunan izin kawasan.

h. melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

i. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Pemanfaatan dan Pengendalian baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan

j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pertanahan.

6. **Kelompok Jabatan Fungsional**

a. **Jabatan Fungsional Tertentu**

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

b. **Jabatan Fungsional Umum**

Jabatan fungsional umum dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan. Nama-nama jabatan fungsional umum di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah.

1.4 Keadaan Pegawai

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 mencapai 41 Orang dengan rincian sebagai berikut: Kepala Dinas 1 Orang, Sekretariat 13 Orang, Bidang Perumahan 9 Orang, dan Bidang Kawasan Permukiman 10 Orang, dan Bidang Pertanahan 8 Orang.

Komposisi Pegawai Negeri Sipil Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 1.1

Keadaan Pegawai DPKPP Tahun 2022

NO	JABATAN	PANGKAT / GOLONGAN	PENDIDIKAN
1	Kepala Dinas	Pembina Utama Muda (IV/c)	S-1 Teknik Sipil
2	Sekretaris	Penata Tingkat I (III/d)	S-1 Perikanan S-2 magister Scence
3	Kepala Sub Bagian keuangan , Umum dan Kepegawaian	Penata Tingkat I (III/d)	S-1 Kehutanan
4	Analis Kepegawaian Muda	Penata Tingkat I (III/d)	S-1 Psikologi
5	Pranata Komputer Terampil	Pengatur (II/ c)	D-III Teknik Komputer Kontrol
6	Analis Keuangan	Penata Muda Tingkat I (III/b)	S-1 Akuntansi
7	Penata Laporan Keuangan	Penata Muda (III/a)	D-IV Keuangan Syariah
8	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Penata (III/c)	D-III Teknik Sipil

NO	JABATAN	PANGKAT / GOLONGAN	PENDIDIKAN
9	Verifikator Keuangan	Penata Muda (III/a)	S-1 Ekonomi Perkantoran
10	Pengelola Kepegawaian	Penata Muda (III/a)	S-1 Sosiologi S-1 Administrasi Negara
11	Pengelola Sarana dan Prasarana	Pengatur (II/c)	D-III Manajemen Informatika
12	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	Pembina (IV/a)	S-1 Teknik Sipil S-2 Magister Administrasi Publik
13	Penyusun Program Anggaran dan pelaporan	Penata Muda (III/a)	S-1 Teknik Sipil
14		Penata Muda (III/a)	S-1 Manajemen
15	Kepala Bidang Kawasan Permukiman	Pembina Tingkat I (IV/b)	S- 1 Teknik Science Terapan S-2 Teknik
16	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	Penata Tingkat I (III/d)	S-1 Teknik Sipil
17		Penata muda Tingkat I (III/b)	S-1 Teknik Sipil
18	Perencana	Penata Tingkat I (III/d)	S-1 Teknik Arsitektur
19	Analis Penataan Kawasan	Penata muda (III/a)	S-1 Teknik Sipil
20		Penata (III/c)	D-III Teknik Sipil
21	Pengawas Fisik Permukiman	Penata (III/c)	S-1 Teknik Sipil
22	Pengawas Fisik Permukiman	Penata (III/c)	S-1 Teknik Sipil
23	Penyusun Rencana Pemanfaatan Kawasan	Penata Tingkat I (III/d)	S-1 Teknik Arsitektur s-2 Teknik
24	Penyusun rencana perlindungan dan pelestarian kawasan	Penata Tingkat I (III/d)	S-1 Teknik Sipil
25	Kepala Bidang Perumahan	Pembina Tingkat I (IV/b)	S-1 Teknik Sipil S-2 Teknik
26	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	Pembina (IV/a)	S-1 Teknik Sipil S-2 Master Enginering
27		Penata Tingkat I (III/d)	S-1 Ekonomi
28		Penata (III/c)	S-1 Ekonomi Akuntansi
29	Analis Perencanaan Wilayah Perumahan	Penata Muda (III/a)	S-1 Teknik Sipil
30		Penata Tingkat I (III/d)	S-1 Teknik Arsitektur
31	Analis Bangunan dan perumahan	Penata Muda (III/a)	S-1 Teknik Arsitektur
32	Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan	Penata Muda (III/a)	S-1 Teknik Sipil
33	Penyusun rencana Pemanfaatan Kawasan	Penata Muda Tingkat I (III/b)	S-1 Teknik Sipil
34	Kepala Bidang Pertanahan	Penata Tingkat I (III/ d)	S-1 Ekonomi
35	Penata Ruang	Penata (III/c)	S-1 Teknik Sipil S-2 Magister Administrasi Publik
36	Analis Kebiijakan	Penata Tingkat I (III/ d)	S-1 Teknik Sipil
37	Analis Pertanahan	Penata Tingkat I (III/ d)	S- 1 Teknik Arsitektur
38	Pemeriksa Pertanahan	Penata Tingkat I (III/ d)	S-1 Ekonomi Akuntansi

NO	JABATAN	PANGKAT / GOLONGAN	PENDIDIKAN
			S-2 magister sains manajemen
39	Pengelola data penyusunan bahan pembinaan teknis pengukuran dan pemetaan	Penata (III/c)	S-1 Teknik Geodesi
40	Pengelola Pengendalian Pertanahan	Penata Tingkat I (III / d)	S-1 Teknik Sipil
41	Pengelola Data Penata gunaan tanah	Penata Muda (III/a)	S-1 Ilmu Pemerintah

*Ket : *) jabatan kosong, personil alih tugas ke kementerian PUPR*
***) jabatan kosong, personil purna tugas*
Sumber : Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian DPKPP Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023;

Bila di bandingkan dengan analisis beban kerja, maka komposisi pegawai di DPKPP Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2

Jumlah Ideal Pegawai

NO	NAMA JABATAN	ESELON	JUMLAH PEMANGKU (BEZZETING)	HASIL ABK
1	2	3	4	5
1	***Kepala Dinas***	II	1	1
2	***Sekretaris***	III	1	1
3	***Kepala Sub Bagian Penyusunan Program***	IV	1	1
4	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan		2	5
5	Analis Data dan Informasi		0	2
6	Pengelola Program dan Kegiatan		0	2
7	***Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian***	IV	1	1
8	analis Keuangan		1	1
9	Bendahara		0	1
10	Verifikator Keuangan		1	3
11	Pengadministrasi Keuangan		0	3
12	Penata Laporan Keuangan		1	1
13	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah		0	1
14	Pengadministrasi Umum		0	3
15	Pengadministrasi Kepegawaian		0	2
16	Pengelola Kepegawaian		1	1
17	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor		1	1
18	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi		1	1
19	Pramu Kebersihan		0	10
20	Pengemudi		0	1

NO	NAMA JABATAN	ESELON	JUMLAH PEMANGKU (BEZZETING)	HASIL ABK
1	2	3	4	5
21	Petugas Keamanan		0	9
22	***Kepala Bidang Perumahan***	III	1	1
24	Analis Perencanaan Wilayah Perumahan		2	3
25	Analis Bangunan dan Perumahan		1	3
26	Penyusun Rencana Konservasi Kawasan		0	5
28	Analis Perumahan		0	3
29	Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan		1	10
31	Penyusun Rencana Pemanfaatan Kawasan		1	2
33	***Kepala Bidang Kawasan Permukiman***	III	1	1
35	Analis Penataan Kawasan		2	5
36	Pengelola Perumahan dan Permukiman		0	2
38	Penyusun Rencana Perlindungan dan Pelestarian kawasan		1	2
39	Pengawas Fisik Permukiman		2	17
41	Penyusun Rencana Pemanfaatan Kawasan		1	3
43	***Kepala Bidang Pertanahan***	III	1	1
45	Analis pertanahan		1	2
46	Pengelola Data Penyusunan bahan pembinaan teknis pengukuran dan pemetaan		1	2
47	Pemeriksa Pertanahan		1	4
49	Pengelola data penatagunaan tanah		1	1
50	pengelola pengendalian pertanahan		1	3
51	analis hukum pertanahan		0	4
JABATAN FUNGSIONAL				
52	Perencana Madya		0	1
53	Perencana Muda		1	1
54	Perencana Pertama		0	1
55	Analis Kepegawaian Madya		0	1
56	Analis Kepegawaian Muda		1	1
57	Analis Kepegawaian Pertama		0	1
58	Pranata Komputer Madya		0	1
59	Pranata Komputer Muda		0	1
60	Pranata Komputer Pertama		0	1
61	Pranata Komputer Penyelia		0	1
62	Pranata Komputer Mahir		0	1
63	Pranata Komputer Terampil		1	1
64	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Madya		0	2
65	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda		5	6
66	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pertama		0	2
67	Pranata Humas Madya		0	1
68	Pranata Humas Muda		0	1

NO	NAMA JABATAN	ESELON	JUMLAH PEMANGKU (BEZZETING)	HASIL ABK
1	2	3	4	5
69	Pranata Humas Pertama		0	1
70	Analis Kebijakan Madya		0	2
71	Analis Kebijakan Muda		1	3
72	Analis Kebijakan Pertama		0	1
73	Penata Ruang Madya		0	1
74	Penata Ruang Muda		1	1
75	Penata Ruang Pertama		0	1
76	Arsiparis Madya		0	1
77	Arsiparis Muda		0	1
78	Arsiparis Pertama		0	1
			41	157

Sumber : Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian DPKPP Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023;

1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana

Sebagai SKPD yang baru terbentuk dan aktif pada awal tahun 2017, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah masih mengalami kendala kekurangan sarana dan prasarana pendukung aktivitas kantor. Kondisi ini tentunya akan secara bertahap ditingkatkan sesuai dengan kemammpuan keuangan daerah dan skala prioritas.

Untuk Kondisi Prasarana dan Sarana Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 1.3

Keadaan Sarana dan Prasarana
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022

No.	Jenis/Nama Aset	Jumlah		Nilai Aset (Rp)
1	Tanah dan Gedung Kantor, Taman	1	Unit	13.371.636.020
2	Kendaraan Bermotor Penumpang	11	Unit	4.321.122.200
3	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	6	Unit	135.738.000
4	Kapal Terbang	3	Unit	58.720.000
5	Perkakas Bengkel Kerja	1	Unit	10.000.000
6	Peralatan Ukur, Gip Dan Feeting	2	Unit	4.250.000
7	Alat Ukur Universal	4	Unit	31.960.000
8	Mesin Ketik	1	Unit	3.560.000
9	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	11	Unit	86.445.500
10	Alat Kantor Lainnya	33	Unit	198.620.000

No.	Jenis/Nama Aset	Jumlah		Nilai Aset (Rp)
11	Meubelair	197	Unit	599.815.586
12	Alat Pembersih	1	Unit	1.900.000
13	Alat Pendingin	32	Unit	426.000.000
14	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	53	Unit	522.149.135
15	Meja Kerja Pejabat	81	Unit	276.132.000
16	Meja Rapat Pejabat	2	Unit	70.000.000
17	Kursi Kerja Pejabat	62	Unit	151.610.750
18	Kursi Rapat Pejabat	26	Unit	129.987.000
19	Kursi Tamu Di Ruangan Pejabat	7	Unit	100.325.000
20	Lemari Dan Arsip Pejabat	14	Unit	47.631.000
21	Peralatan Studio Audio	4	Unit	117.602.500
22	Peralatan Studio Video Dan Film	6	Unit	73.733.060
23	Alat Studio Lainnya	1	Unit	10.980.000
24	Alat Komunikasi Telephone	9	Unit	48.355.000
25	Alat Keamanan	2	Unit	68.723.000
26	Personal Komputer	82	Unit	1.317.012.495
27	Peralatan Personal Komputer	75	Unit	368.400.000
28	Alat Eksplorasi Topografi	1	Unit	179.700.000
Jumlah				**22.732.108.246**

Sumber : KIB, 2022, dari Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah, 2022

1.6 Keuangan

Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2022 terdiri:

1. 6 program, 13 kegiatan dan 37 sub kegiatan
2. Anggaran Rp. 23,011 Milyar, didistribusikan pengelolaannya ke 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang teknis dengan rincian sebagai berikut:
   1) Sekretariat, total pagu Rp.10,298 Milyar, terpusat pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
   2) Bidang Perumahan, total pagu Rp.3,103 Milyar, terdiri dari:
      1) Program Pengembangan Perumahan, pagu Rp.182 Juta
      2) Program Kawasan Permukiman, pagu Rp.2,53 Milyar
   3) Bidang Kawasan Permukiman, total pagu Rp.8,954 Milyar, pada Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU);
   4) Bidang Pertanahan, total pagu Rp. 655,5 Juta, terdiri dari:
      1) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, pagu Rp.158,297 Juta
      2) Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee, pagu Rp.497,202 Juta.

1.7 Sistematika LKIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP ini bertujuan menginformasikan capaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah selama Tahun 2022. Capaian Kinerja Tahun 2022 tersebut akan dibandingkan dengan Penetapan Kinerja Tahun 2022 sehingga hasilnya akan menjadi tolak ukur keberhasilan suatu organisasi dalam kurun waktu satu tahun. Adapun sistematika penyajian LKIP sebagai berikut:

a) **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini berisi latar belakang; maksud dan tujuan; kedudukan, tugas pokok dan fungsi; susunan struktur organisasi; dan keadaan personil dan kepegawaian;
b) **Bab II Perencanaan Kinerja**, pada bab ini berisi perencanaan strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2022 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022;
c) **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, pada bab ini berisi capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022;
d) **Bab IV Penutup**, pada bab ini disajikan kesimpulan menyeluruh dari LKIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah dan rekomendasi perbaikan kinerja ke depan.
e) **Lampiran**

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Dasar Perencanaan Kinerja.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, DPKPP Provinsi Kalimantan Tengah berpedoman pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021-2026. RPJMD kemudian dijabarkan kedalam yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Renstra (Rencana Strategis) Tahun 2021-2026. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Hal-hal tersebut merupakan panduan bagi perangkat daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang tersusun secara sistematis dan berkesinambungan, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul dalam periode waktu tersebut. Renstra Perangkat Daerah digunakan dalam rangka pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan tolak ukur yang penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Lebih lanjut, renstra di rinci dalam dokumen perencanaan tahunan yang lebih bersifat operasional yakni Renja PD. Tahun 2022 merupakan tahun ke-1 dalam periodeisasi RPJMD dan Renstra.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala daerah. Guna mewujudkan visi dan misi tersebut diperlukan beberapa strategi guna pencapaiannya. Berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021-2026 visi dan misi kepala daerah sebagai acuan program kerja DPKPP Provinsi Kalimantan Tengah diuraikan sebagai berikut:

Visi:

“Kalimantan Tengah Makin BERKAH: Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis”

Misi:

1. Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan.
2. Memperkuat ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global.
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi.
4. Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing.
5. Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender.

Dalam hal ini DPKPP terlibat mewujudkan misi kepala daerah dalam rangka memperkuat ketahanan daerah dalam mengantisipasi perubahan global (Misi 2 RPJMD) dengan tujuan Meningkatkan Tingkat Kondusifitas Daerah melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Pengurangan Kemiskinan Masyarakat (Tujuan 1 RPJMD) dan sasaran RPJMD sebagai berikut :

1. Tujuan 1 Sasaran 1 : Meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat (untuk urusan bidang Pertanahan)
2. Tujuan 1 Sasaran 4 : Pemenuhan Pelayanan Dasar Perumahan, Air Minum dan Sanitasi (Untuk urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman).

2.1.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari pernyataan misi yang merupakan hasil akhir yang ingin dicapai atau dihasilkan dari pembangunan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan di Kalimantan Tengah pada kurun waktu 5 (lima) tahun 2021-2026, yaitu sebagai berikut :

a) Meningkatkan cakupan layanan urusan bidang perumahan di Provinsi Kalimantan tengah guna peningkatan pelayanan dasar perumahan.
b) Meningkatnya fungsi layanan kawasan permukiman.
c) Meningkatnya cakupan layanan urusan pemerintahan bidang pertanahan dalam 1 (satu) daerah provinsi.

Sebagai wujud dari tahapan dalam pencapaian tujuan pembangunan yang dilaksanakan setiap tahun, maka sasaran yang ingin dicapai melalui pelaksanaan program yang telah ditetapkan dengan berbagai kegiatannya masing-masing yang tercantum di dalam Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

a) Meningkatkan cakupan layanan akses perumahan yang layak, aman dan terjangkau.
b) Meningkatkan cakupan layanan program pengembangan perumahan guna pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) di bidang perumahan.
c) Meningkatnya kualitas PSU Kawasan Permukiman.
d) Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman.
e) Meningkatnya data penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan dalam 1 (satu) Provinsi.
f) Meningkatnya data subjek dan objek redistribusi tanah.

2.1.2 Strategi

Strategi pembangunan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan untuk memenuhi misi **"Tujuan dan Sasaran"** adalah :

a) Meningkatkan penataan kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha dalam rangka peningkatan kualitas perumahan.
b) Melaksanakan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha dalam rangka peningkatan kualitas perumahan.
c) Melakukan pendataan penyediaan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi.
d) Meningkatkan Kualitas PSU.
e) Penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman di kawasan kumuh.
f) Peningkatan cakupan pendataan sengketa, konflik dan perkara pertanahan dalam 1 (satu) daerah provinsi.
g) Peningkatan cakupan pendataan subjek dan objek redistribusi tanah.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Sebagai penjabaran dari sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan PKP dan Pertanahan di Provinsi Kalimantan Tengah, telah ditetapkan target-target sasaran indikator kinerja utama (IKU) yang tertuang di dalam perjanjian kinerja Tahun 2022 yang telah disepakati :

2.2.1 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas

IKU tersebut di atas di laksanakan melalui program-program kepala perangkat daerah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Meningkatnya cakupan layanan akses perumahan yang layak, aman dan terjangkau.	Jumlah Perbaikan RTLH.	Unit	54

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
2.	Meningkatnya cakupan layanan program pengembangan perumahanguna pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) dibidang perumahan.	Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni dan Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni.	%	100
3.	Meningkatnya KualitasKawasan Permukiman.	Jumlah kawasan kumuh yang tertata.	Kawasan	1
4.	Meningkatnya Kualitas PSU Kawasan Permukiman.	Persentase terlaksananya peningkatan kualitasPrasarana, Sarana, Utilitas Umum(PSU)pada kawasan permukiman.	%	85
5.	Meningkatnya koordinasi dalam layanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahandan kawasan permukiman.	Jumlah orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta PSU yang telah mendapat sertifikasi dan registrasi.	Orang	60
6.	Meningkatnya Data Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.	Persentase Penyelesaian KasusTanah Negara (%)	%	40
7.	Meningkatnya Data Subyekdan Obyek Redistribusi Tanah.	Persentase Luas Lahan Bersertifikat (%)	%	1,10

2.2.2 Perjanjian Kinerja Sekretaris

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Tersedianya dukungan layanan administrasi perkantoran	Terlaksananya layanan administrasi perkantoran	Tahun	1
2.	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Terlaksananya kegiatan peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Tahun	1
3.	Pembinaan terhadap peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya kedisiplinan aparatur	Tahun	1
4.	Terlaksananya layanan sistem perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	DOkumen	14
5.	Terlaksananya pengelolaan aset/ barang daerah	Jumlah Dokumen pengelolaan aset/ barang daerah	Dokumen	1

2.2.2.1 Perjanjian Kinerja Kasubbag Penyusunan Program

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Tersusunnya dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya LKIP 2021	Dokumen	1
		Tersusunnya konsep naskah LPPD dan LKPJ 2021	Dokumen	2
		Tersusunnya Laporan TEPRA, SIPD Kemendagri, SIMP3D dan Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah	Dokumen	4
2.	Tersusunnya dokumen Perencanaan dan Penganggaran SOPD (Renja 2022, Renja Perubahan 2021,	Tersusunnya Renja 2023	Dokumen	1
		Tersusunnya Renja Perubahan 2022	Dokumen	1
		Tersusunnya PPAS 2022	Dokumen	1
		Tersusunnya PPAS Perubahan 2022	Dokumen	1

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
	PPAS 2022, PPAS Perubahan 2021, RKA 2022 dan RKA Perubahan Tahun 2021	Tersusunnya RKA 2023	Dokumen	1
		Tersusunnya RKA Perubahan Tahun 2022	Dokumen	1

2.2.2.2 Perjanjian Kinerja Kasubbag Keuangan, Umum dan Kepegawaian

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Tahun	1
		Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan /Triwulan/ Semesteran SKPD	Dok	1
2.	Terlayaninya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya koordinasi dan penilaian barang milik daerah	Persen	100
		Terlaksananya rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Dok	1
3.	Terlayaninya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Terlaksananya pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	Tahun	1
		Terlaksananya monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Tahun	1
		Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	Tahun	1
4.	Terlayaninya administrasi umum perangkat daerah	Tersedianya komponen instalasi dan alat listrik/ penerangan bangunan kantor	Jenis	5
		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	9
		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Lembar	300.000
		Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Eks	21.900
		Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dok	4

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
5.	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Tersedianya jasa surat menyurat	Surat	500
		Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tahun	1
		Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Dok	1
6.	Tersedianya Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan	Unit	17
		Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Unit	17
		Terlaksananya pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Unit	1
		Terlaksananya pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit	70

2.2.3 Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Perumahan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Tersedianya data Rumah di Lokasi Rawan Bencana atau Relokasi Program Provinsi.	Jumlah Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Kegiatan	1
2.	Tertatanya Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Kegiatan	4
3.	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas	Kegiatan	2

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
	sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		

2.2.3.1 Perjanjian Kinerja Sub Subtansi Perencanaan Teknis Bidang Perumahan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen	1
2.	Tersusun /Tereview /Terlegalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun /Tereview /Terlegalisasi	Dokumen	1
3.	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	1
4.	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/ Peremajaan/ Permukiman dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan	Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/ Peremajaan/ Permukiman dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (Lima Belas) Ha	Dokumen	1

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
	Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (Lima Belas) Ha			

2.2.3.2 Perjanjian Kinerja Sub Subtansi Pembiayaan Dan Pengembangan Kawasan Bidang Perumahan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh .	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran /Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	1

2.2.3.3 Perjanjian Kinerja Sub Subtansi Perumahan Swadaya dan Perumahan Formal Bidang Perumahan.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Berkurangnya Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Kalimantan Tengah	Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	Unit	54
2.	Terlaksananya Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Laporan	1

2.2.4 Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Kawasan Permukiman

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Terlaksananya Urusan Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman	Jumlah Kegiatan Urusan Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman	Kegiatan	3
2.	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Kegiatan	1

2.2.4.1 Perjanjian Kinerja Sub Subtansi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Bidang Kawasan Permukiman

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Terlaksananya Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/ Dipugar	Kawasan	2

2.2.4.2 Perjanjian Kinerja Sub Subtansi Preservasi Manfaat dan Pengendalian Bidang Kawasan Permukiman

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman yang Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disedikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	Lokasi	10

2.2.4.3 Perjanjian Kinerja Sub Subtansi Pendataan Bidang Kawasan Permukiman

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun di Bidang Kawasan Permukiman.	Dok	1
2.	Terlaksananya Koordinasi dan Singkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Koordinasi dan Singkronisasi Bidang Kawasan Permukiman	Laporan	1

2.2.5 Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pertanahan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Terselenggaranya Kegiatan yang mendukung Penyelesaian sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan yang mendukung Penyelesaian sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kegiatan	1
2.	Terselenggaranya Kegiatan yang mendukung Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan yang mendukung Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kegiatan	3

2.2.5.1 Perjanjian Kinerja Sub Subtansi Manfaat dan Pengendalian Bidang Pertanahan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Terinventarisasinya Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah Data Sengketa, Konflik, dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen	1
2.	Terinventarisasinya Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Dokumen	1

2.2.5.2 Perjanjian Kinerja Sub Subtansi Perencanaan dan Pendataan Bidang Pertanahan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Terlaksananya Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1
2.	Terlaksananya Koordinasi, Singkronisasi, Fasilitasi dan Kerja Sama Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria dalam (satu) Provinsi	Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan AKses dalam rangka Reforma Agraria	Berita Acara	1

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2022

Pada tahun 2022 DPKPP Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan 6 Program dan 13 kegiatan dan 37 Sub Kegiatan dengan total pagu dana Rp.23.010.751.256, Perencanaan Anggaran tersebut termuat dalam DPA SKPD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1. Rekapitulasi Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022

NO.	BIDANG/ SEKRETARIAT	PROG.	KEG.	SUB KEG.	PAGU	
					Rp	%
1	SEKRETARIAT	1	7	22	Rp 10.298.517.256,00	44,76%
2	PERUMAHAN	1	2	7	Rp 3.102.819.000,00	13,48%
		1	1			
3	PERMUKIMAN			4	Rp 8.953.915.000,00	38,91%
		1	1			
4	PERTANAHAN	2	2	4	Rp 655.500.000,00	2,85%
TOTAL		**6**	**13**	**37**	**Rp 23.010.751.256,00**	**100,00%**

2.3.1 Belanja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Guna mencapai sasaran yang telah ditentukan, setiap penganggaran di alokasikan pada masing – masing sub kegiatan yang menunjang pencapaian IKU dengan rincian per sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.2. Rincian Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022

NO	PROG	KEG	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KET.
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				**22.355.251.256,00**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**10.298.517.256,00**	
	a.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**138.250.000,00**	
		a).	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	80.000.000,00	
		b).	Koordiasi dan Penusunan DPA-SKPD	30.000.000,00	
		c).	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28.250.000,00	
	b.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**4.910.762.799,00**	
		a).	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.889.762.799,00	
		b).	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	21.000.000,00	
	c.	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**116.000.000,00**	
		a).	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	100.000.000,00	
		b).	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	16.000.000,00	
	d.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**39.109.000,00**	
		a).	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.000.000,00	

NO	PROG	KEG	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KET.
		b).	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	9.000.000,00	
		c).	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-Undangan	20.109.000,00	
	e.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**1.676.104.000,00**	
		a).	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	58.000.000,00	
		b).	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	829.463.000,00	
		c).	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	69.891.000,00	
		d).	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	60.000.000,00	
		e).	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	658.750.000,00	
	f.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**2.430.498.684,00**	
		a).	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000,00	
		b).	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	602.438.684,00	
		c).	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.821.060.000,00	
	g.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah**		**987.792.773,00**	
		a).	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	332.300.000,00	
		b).	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	294.800.000,00	
		c).	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	238.000.000,00	
		d).	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	122.692.773,00	
2	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**			**182.000.000,00**	
	a.	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**		**182.000.000,00**	
		a).	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	182.000.000,00	**Mendukung Pencapaian IKU 2**
3	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**			**5.138.683.000,00**	
	a.	**Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha**		**796.319.000,00**	
		a).	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	161.704.138,00	**Mendukung Pencapaian IKU 1**
		b).	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh	66.504.000,00	**Mendukung Pencapaian IKU 1**
		c).	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	199.760.152,00	**Mendukung Pencapaian IKU 1**
		d).	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	368.350.710,00	**Mendukung Pencapaian IKU 1**
	b.	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10**		**4.342.364.000,00**	

NO	PROG	KEG	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KET.
		(Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			
		a).	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	77.500.000,00	**Mendukung Pencapaian IKU 1**
		b).	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	2.047.000.000,00	**Mendukung Pencapaian IKU 1**
		c).	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Pemukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	2.217.864.000,00	**Mendukung Pencapaian IKU 3**
4	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**			**6.736.051.000,00**	
	a.	**Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman**		**6.736.051.000,00**	
		a).	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	595.930.500,00	**Mendukung Pencapaian IKU 4**
		b).	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	5.964.946.000,00	**Mendukung Pencapaian IKU 4**
		c).	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	175.174.500,00	**Mendukung Pencapaian IKU 4**
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				**655.500.000,00**	
1	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**			**158.297.500,00**	
	a.	**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**		**158.297.500,00**	
		a).	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	158.297.500,00	**Mendukung Pencapaian IKU 6**
2	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**			**497.202.500,00**	
	a.	**Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**		**497.202.500,00**	
		a).	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	155.070.000,00	**Mendukung Pencapaian IKU 7**
		b).	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	192.994.000,00	**Mendukung Pencapaian IKU 7**
		c).	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	149.138.500,00	**Mendukung Pencapaian IKU 7**
TOTAL				***23.010.751.256,00***	

2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Pelaksanaan program dan kegiatan strategis pencapaian IKU sebelum realokasi di dukung dengan pendanaan sebesar Rp. 12.712.234.000,- dan alokasi untuk urusan penunjang sebesar Rp. 10.298.517.256 yang dirinci dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.3. Alokasi Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 Per Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rp.	%
1.	Meningkatnya cakupan layanan akses perumahan yang layak, aman dan terjangkau.	Jumlah Perbaikan RTLH.	2.920.819.000	12,69%
2.	Meningkatnya cakupan layanan program pengembangan perumahan guna pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) di bidang perumahan.	Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni dan Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni.	182.000.000	0,79%
3.	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman.	Jumlah kawasan kumuh yang tertata.	2.217.864.000	9,64%
4.	Meningkatnya Kualitas PSU Kawasan Permukiman.	Persentase terlaksananya peningkatan kualitas Prasarana, Sarana, Utilitas Umum(PSU) pada kawasan permukiman.	6.736.051.000	29,27%
5.	Meningkatnya koordinasi dalam layanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman.	Jumlah orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta PSU yang telah mendapat sertifikasi dan registrasi.	-	0,00%
6.	Meningkatnya Data Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.	Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara (%)	158.297.500	0,69%
7.	Meningkatnya Data Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah.	Persentase Luas Lahan Bersertifikat (%)	497.202.500	2,16%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima. Media pertanggung jawaban tersebut adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan pelaporan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Media pertanggung jawaban tersebut meliputi pengukuran, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2022

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, sebagaimana diuraikan pada Bab sebelumnya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Dalam mengukur kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah, telah diidentifikasi berbagai komponen indikator, dimana dalam kegiatan-kegiatan tahun 2022 sebagian besar indikatornya meliputi tiga jenis indikator kinerja yaitu input, output, dan outcome. Pencapaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah dalam tahun 2022 merupakan kemampuan perencanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan maupun rutin.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$Capaian\ Indikator = \frac{realisasi}{rencana}\ x\ 100\%$$

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$Capaian\ Indikator = \frac{realisasi - (realisasi\ rencana)}{rencana}\ x\ 100\%$$

Untuk memudahkan interpertasi atas pencapaian kinerja sasaran dipergunakan interval nilai sebagai berikut:

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91≤	Sangat Baik	**Biru**
2.	76≤90	Tinggi	**Hijau Muda**
3.	66≤75	Sedang	**Kuning Tua**
4.	51≤65	Rendah	**Kuning Muda**
5.	<50	Sangat Rendah	**Merah**

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indkator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Organisasi Tahun 2022 Terhadap Perjanjian Kinerja

NO.	SASARAN STRATEGIS ORGANISASI	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	CAPAIAN		KET.
					REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	Meningkatnya cakupan layanan akses perumahan yang layak, aman dan terjangkau.	Jumlah Perbaikan RTLH	Unit	54	54	100%	Sangat Baik
2	Meningkatnya cakupan layanan program pengembangan perumahan guna pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) di bidang perumahan.	Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni dan Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni	%	100	100	100%	Sangat Baik
3	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Jumlah kawasan kumuh yang tertata	Kawasan	1	2	200%	Sangat Baik
4	Meningkatnya Kualitas PSU Kawasan Permukiman.	Persentase terlaksananya peningkatan kualitas Prasarana, Sarana, Utilitas Umum(PSU) pada kawasan permukiman.	%	85	100	117,65%	Sangat Baik
5	Meningkatnya koordinasi dalam layanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman.	Jumlah orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta PSU yang telah mendapat sertifikasi dan registrasi.	Orang/ Badan	60	328	546,66%	Sangat Baik
6	Meningkatnya Data Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara (%)	%	40	44,7	111,75%	Sangat Baik
7	Meningkatnya Data Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Persentase Luas Lahan Bersertifikat (%)	%	1,10	1,08	98,18%	Sangat Baik

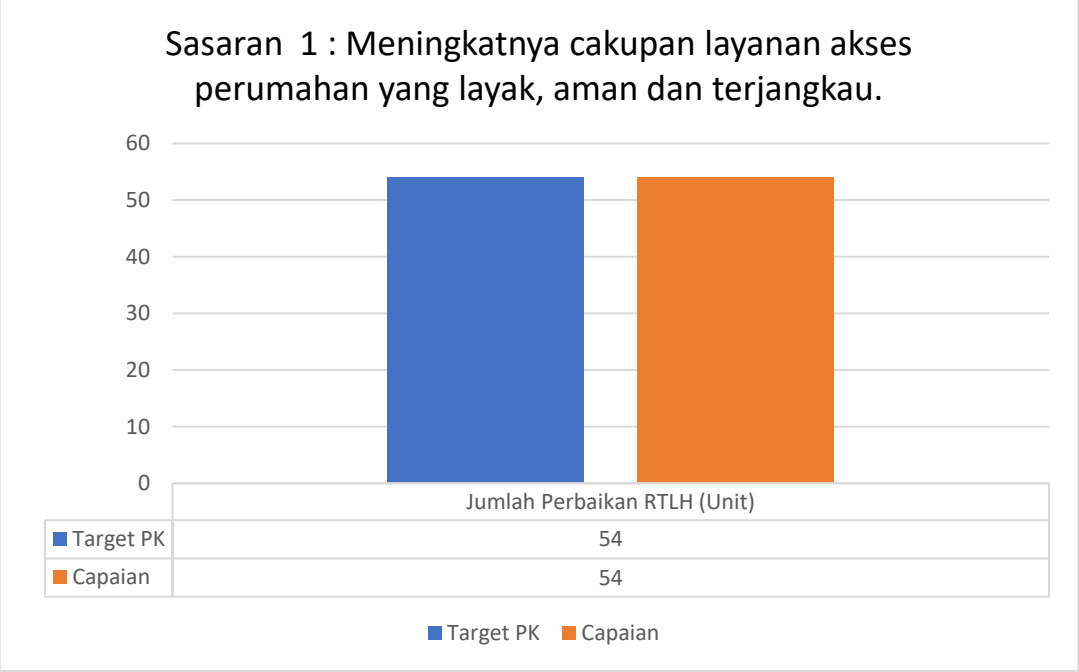
Sasaran 1 : Meningkatnya cakupan layanan akses perumahan yang layak, aman dan terjangkau.
60
50
40
30
20
10
0
Jumlah Perbaikan RTLH (Unit)
Target PK
54
Capaian
54
Target PK
Capaian

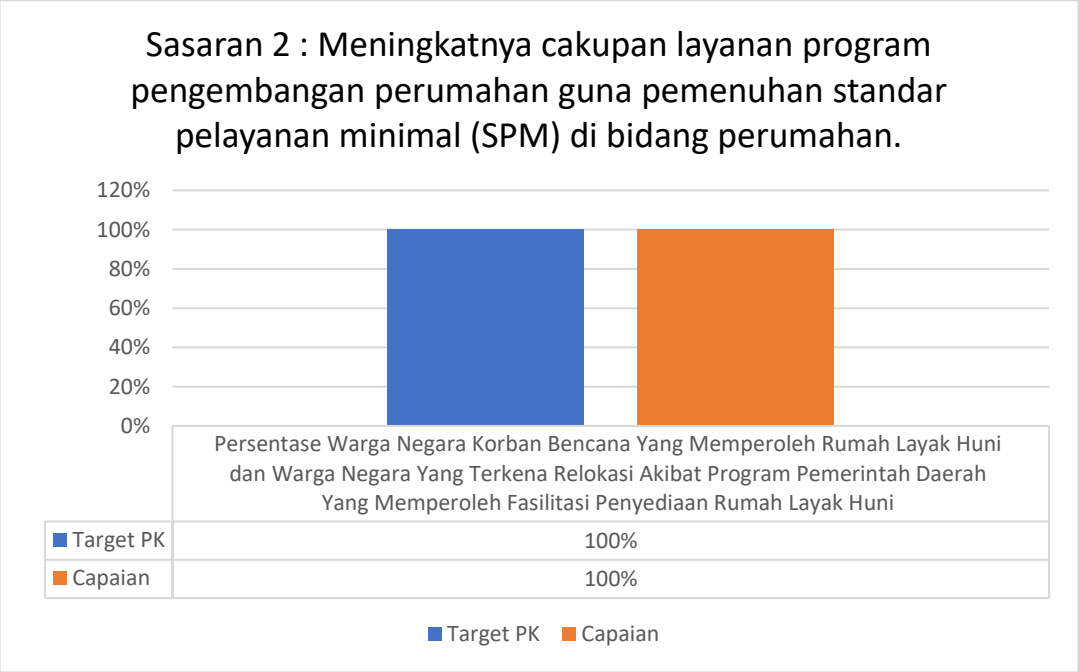
Sasaran 2 : Meningkatnya cakupan layanan program pengembangan perumahan guna pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) di bidang perumahan.
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni dan Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni
Target PK
100%
Capaian
100%
Target PK
Capaian

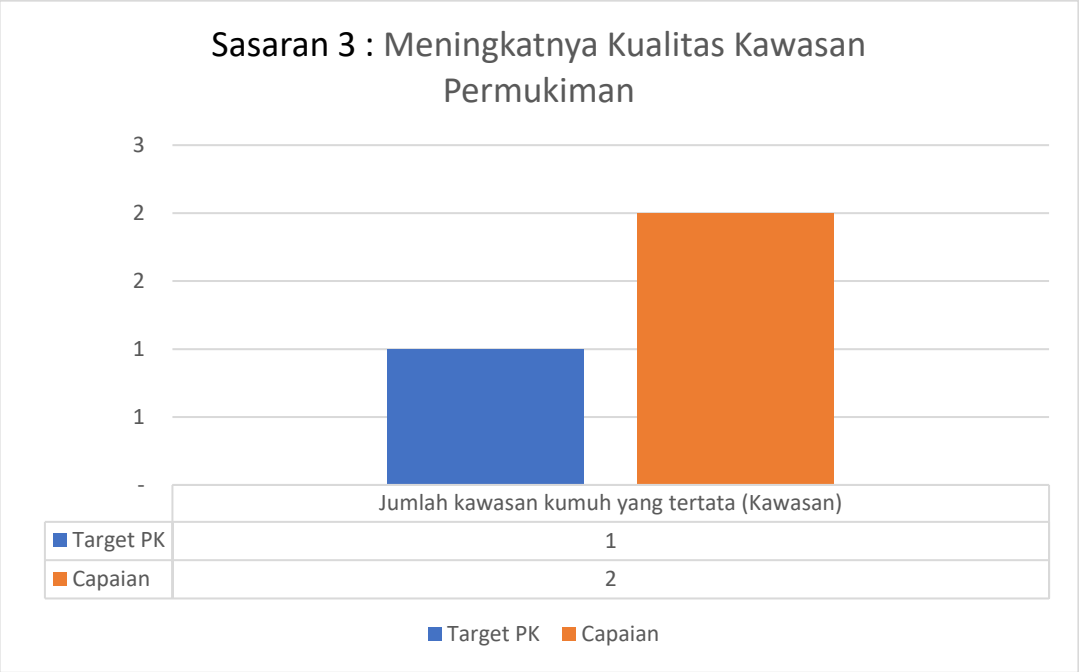
Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman
3
2
2
1
1
-
Jumlah kawasan kumuh yang tertata (Kawasan)
Target PK 1
Capaian 2
Target PK
Capaian

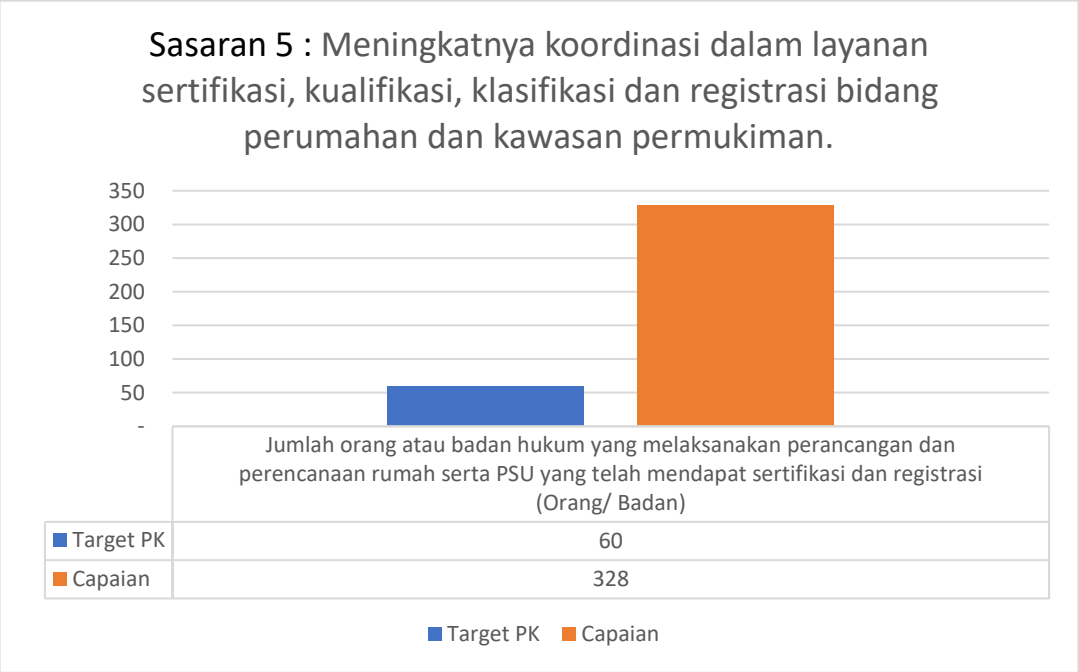
Sasaran 5 : Meningkatnya koordinasi dalam layanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman.
350
300
250
200
150
100
50
-
Jumlah orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta PSU yang telah mendapat sertifikasi dan registrasi (Orang/ Badan)
Target PK 60
Capaian 328
Target PK
Capaian

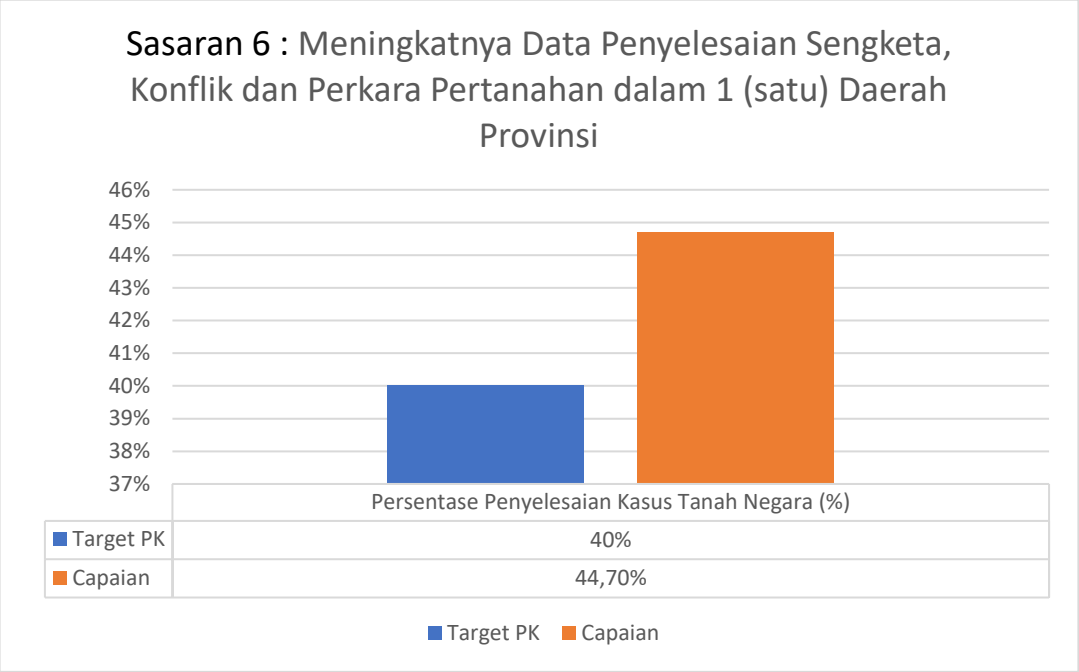
Sasaran 6 : Meningkatnya Data Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
46%
45%
44%
43%
42%
41%
40%
39%
38%
37%
Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara (%)
Target PK 40%
Capaian 44,70%
Target PK
Capaian

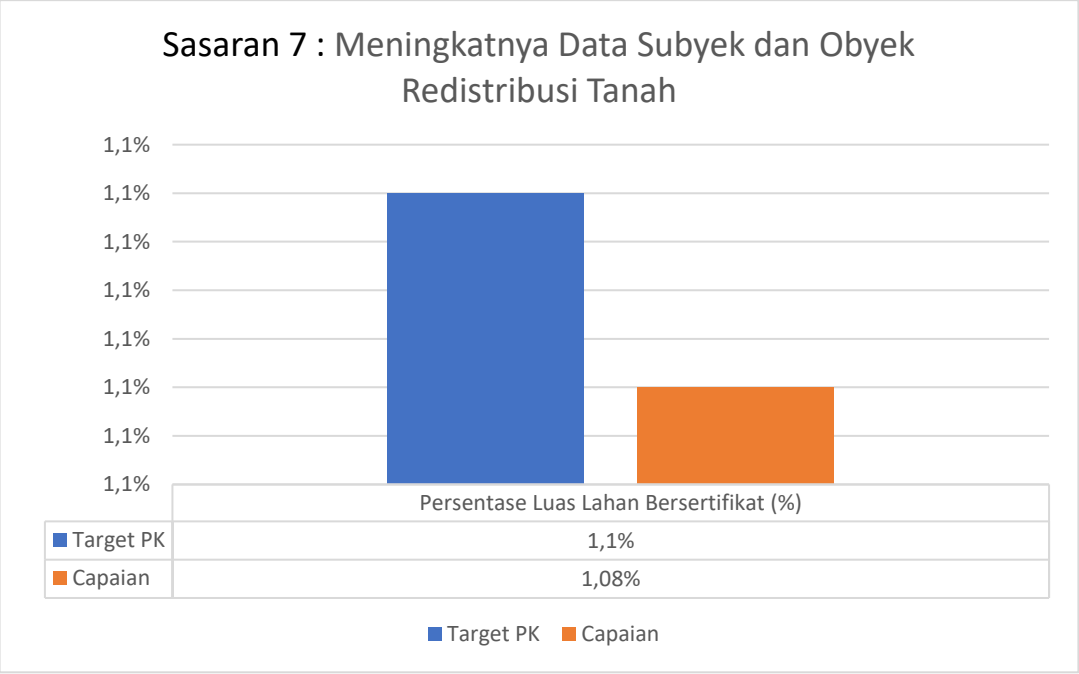
Sasaran 7 : Meningkatnya Data Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah
1,1%
1,1%
1,1%
1,1%
1,1%
1,1%
1,1%
1,1%
Persentase Luas Lahan Bersertifikat (%)
Target PK 1,1%
Capaian 1,08%
Target PK
Capaian

Tabel 3.2. Persentase Capaian Target Kinerja Sasaran Strategis Organisasi Tahun 2022 Terhadap Perjanjian Kinerja

NO.	SASARAN STRATEGIS ORGANISASI	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN	KET.
1	Meningkatnya cakupan layanan akses perumahan yang layak, aman dan terjangkau.	Jumlah Perbaikan RTLH	100,00%	Sesuai Target
2	Meningkatnya cakupan layanan program pengembangan perumahan guna pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) di bidang perumahan.	Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni dan Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni	100,00%	Sesuai Target
3	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Jumlah kawasan kumuh yang tertata	200,00%	Melebihi Target
4	Meningkatnya Kualitas PSU Kawasan Permukiman.	Persentase terlaksananya peningkatan kualitas Prasarana, Sarana, Utilitas Umum(PSU) pada kawasan permukiman.	117,65%	Melebihi Target
5	Meningkatnya koordinasi dalam layanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman.	Jumlah orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta PSU yang telah mendapat sertifikasi dan registrasi.	546,66%	Melebihi Target
6	Meningkatnya Data Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara (%)	111,75%	Melebihi Target
7	Meningkatnya Data Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Persentase Luas Lahan Bersertifikat (%)	98,18%	Kurang Dari Target

Berdasarkan Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Organisasi yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja terdapat 7 Sasaran Strategis dan IKU Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022. Terdapat 2 IKU tercapai sesuai target, 4 IKU melebihi target dan 1 IKU kurang dari target.

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Bidang, Sub Subtansi dan Sub Bagian Tahun 2022 Terhadap Perjanjian Kinerja

No.	SASARAN KEGIATAN BIDANG / SUB SUBTANSI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI		KET.
					REALISASI	CAPAIAN (%)	
A.	**Sekretariat**						
1.	Tersedianya dukungan layanan administrasi perkantoran	Terlaksananya layanan administrasi perkantoran	Tahun	1	1	100 %	Sangat Baik
2.	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Terlaksananya kegiatan peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Tahun	1	1	100 %	Sangat Baik
3.	Pembinaan terhadap peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya kedisiplinan aparatur	Tahun	1	1	100 %	Sangat Baik
4.	Terlaksananya layanan sistem perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Dokumen	14	14	100 %	Sangat Baik
5.	Terlaksananya pengelolaan aset/ barang daerah	Jumlah Dokumen pengelolaan aset/ barang daerah	Dokumen	1	1	100 %	Sangat Baik
A.1.	**Sub Bagian Penyusunan Program**						
1.	Tersusunnya dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya LKIP 2021	Dokumen	1	1	100 %	Sangat Baik
		Tersusunnya konsep naskah LPPD dan LKPJ 2021	Dokumen	2	2	100 %	Sangat Baik
		Tersusunnya Laporan TEPRA, SIPD Kemendagri, SIMP3D dan Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	100 %	Sangat Baik

No.	SASARAN KEGIATAN BIDANG / SUB SUBTANSI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI		KET.
					REALISASI	CAPAIAN (%)	
2.	Tersusunnya dokumen Perencanaan dan Penganggaran SOPD (Renja 2022, Renja Perubahan 2021, PPAS 2022, PPAS Perubahan 2021, RKA 2022 dan RKA Perubahan Tahun 2021	Tersusunnya Renja 2023	Dokumen	1	1	100 %	Sangat Baik
		Tersusunnya Renja Perubahan 2022	Dokumen	1	1	100 %	Sangat Baik
		Tersusunnya PPAS 2022	Dokumen	1	1	100 %	Sangat Baik
		Tersusunnya PPAS Perubahan 2022	Dokumen	1	1	100 %	Sangat Baik
		Tersusunnya RKA 2023	Dokumen	1	1	100 %	Sangat Baik
		Tersusunnya RKA Perubahan Tahun 2022	Dokumen	1	1	100 %	Sangat Baik
A.2.	**Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian**						
1.	Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Tahun	1	1	100 %	Sangat Baik
		Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan /triwulan/ semesteran SKPD	Dokumen	1	1	100 %	Sangat Baik
2.	Terlayaninya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah	Persen	100	100	100 %	Sangat Baik
		Terlaksananya rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Dokumen	1	1	100 %	Sangat Baik
3.	Terlayaninya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pendataan dan Pengelolaan administrasi kepegawaian	Tahun	1	1	100 %	Sangat Baik
		Terlaksananya monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Tahun	1	1	100 %	Sangat Baik

No.	SASARAN KEGIATAN BIDANG / SUB SUBTANSI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI		KET.
					REALISASI	CAPAIAN (%)	
		Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	Tahun	1	1	100 %	Sangat Baik
4.	Terlayaninya administrasi umum perangkat daerah	Tersedianya komponen instalasi dan alat listrik/ penerangan bangunan kantor	Jenis	5	5	100 %	Sangat Baik
		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	9	9	100 %	Sangat Baik
		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Lembar	300.000	300.000	100 %	Sangat Baik
		Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	Ekslempar	21.900	21.900	100 %	Sangat Baik
		Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dokumen	4	4	100 %	Sangat Baik
5.	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya jasa surat menyurat	Surat	500	648	129,6 %	Sangat Baik
		Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tahun	1	1	100 %	Sangat Baik
		Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Dokumen	1	1	100 %	Sangat Baik
6.	Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya jasa pemeilharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan	Unit	17	17	100 %	Sangat Baik
		Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Unit	17	17	100 %	Sangat Baik

No.	SASARAN KEGIATAN BIDANG / SUB SUBTANSI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI		KET.
					REALISASI	CAPAIAN (%)	
		Terlaksananya pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Unit	1	1	100 %	Sangat Baik
		Terlaksananya pemeliharan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit	70	70	100 %	Sangat Baik
B.	**Bidang Perumahan**						
1.	Tersedianya data Rumah di Lokasi Rawan Bencana atau Relokasi Program Provinsi.	Jumlah Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Kegiatan	1	1	100 %	Sangat Baik
2.	Tertatanya Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Kegiatan	4	4	100 %	Sangat Baik
3.	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Kegiatan	2	2	100 %	Sangat Baik
B.1.	**Sub Subtansi Perencanaan Teknis Bidang Perumahan**						
1.	Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen	1	1	100 %	Sangat Baik
2.	Tersusun /Tereview /Terlegalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun /Tereview /Terlegalisasi	Dokumen	1	1	100 %	Sangat Baik

No.	SASARAN KEGIATAN BIDANG / SUB SUBTANSI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI		KET.
					REALISASI	CAPAIAN (%)	
3.	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	1	1	100 %	Sangat Baik
4.	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/ Peremajaan/ Permukiman dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/ Peremajaan/ Permukiman dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (Lima Belas) Ha	Dokumen	1	1	100 %	Sangat Baik
B.2.	**Sub Subtansi Perumahan Swadaya dan Perumahan Formal Bidang Perumahan**						
1.	Berkurangnya Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Kalimantan Tengah	Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	Unit	54	54	100 %	Sangat Baik
2.	Terlaksananya Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Laporan	1	1	100 %	Sangat Baik
B.3.	**Sub Subtansi Pembiayaan dan Pengembangan Kawasan Bidang Perumahan**						
1.	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	1	1	100 %	Sangat Baik

No.	SASARAN KEGIATAN BIDANG / SUB SUBTANSI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI		KET.
					REALISASI	CAPAIAN (%)	
C	**Bidang Kawasan Permukiman**						
1.	Terlaksananya Urusan Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman	Jumlah Kegiatan Urusan Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman	Kegiatan	3	3	100 %	Sangat Baik
2.	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Kegiatan	1	1	100 %	Sangat Baik
C.1.	**Sub Subtansi Pendataan Bidang Kawasan Permukiman**						
1.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun di Bidang Kawasan Permukiman.	Dokumen	1	1	100 %	Sangat Baik
2.	Terlaksananya Koordinasi dan Singkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Koordinasi dan Singkronisasi Bidang Kawasan Permukiman	Laporan	1	1	100 %	Sangat Baik
C.2.	**Sub Subtansi Preservasi dan Pengendalian Bidang Kawasan Permukiman**						
1.	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman yang Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disedikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	Lokasi	10	8	80 %	Tinggi
C.3.	**Sub Subtansi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Bidang Kawasan Permukiman**						
1.	Terlaksananya Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/Dipugar	Kawasan	2	2	100 %	Sangat Baik

No.	SASARAN KEGIATAN BIDANG / SUB SUBTANSI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI		KET.
					REALISASI	CAPAIAN (%)	
D	**Bidang Pertanahan**						
1.	Terselenggaranya Kegiatan yang mendukung Penyelesaian sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan yang mendukung Penyelesaian sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kegiatan	1	1	100 %	Sangat Baik
2.	Terselenggaranya Kegiatan yang mendukung Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan yang mendukung Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kegiatan	3	3	100 %	Sangat Baik
D.1.	**Sub Subtansi Manfaat dan Pengendalian Bidang Pertanahan**						
1.	Terinventarisasinya Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah Data Sengketa, Konflik, dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen	1	1	100 %	Sangat Baik
2.	Terinventarisasinya Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Dokumen	1	1	100 %	Sangat Baik
D.2.	**Sub Subtansi Perencanaan dan Pendataan Bidang Pertanahan**						
	Terlaksananya Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100 %	Sangat Baik
	Terlaksananya Koordinasi, Singkronisasi, Fasilitasi dan Kerja Sama Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria dalam (satu) Provinsi	Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan AKses dalam rangka Reforma Agraria	Berita Acara	1	1	100 %	Sangat Baik

Terdapat 53 Indikator Capaian Kinerja Sasaran Strategis Bidang, Sub Subtansi dan Sub Bagian Tahun 2022 berdasarkan Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah. Dari total keseluruhan indikator capaian kinerja tersebut terdapat 1 indikator yang melebihi target, 1 indikator yang kurang dari target dan 51 indikator terpenuhi sesuai target, dengan rata – rata capaian 103,2 % dari target Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV yang telah ditetapkan.

3.2 Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Capaian Tahun Sebelumnya.

Tahun 2022 adalah tahun pertama implementasi perencanaan strategis pada perangkat daerah, yaitu dalam periode Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026. Karena itu realisasi kinerja organisasi (Perjanjian Kinerja Kepala Dinas) pada tahun 2022 memiliki perbedaan dengan tahun – tahun sebelumnya. Adapun capaian kinerja organisasi tahun tahun 2021 dan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Organisasi Tahun 2021 dan 2022

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Capaian Kinerja (IKU)		Target	Capaian Kinerja (IKU)	
				Realisasi	%		Realisasi	%
1	Terpenuhinya tahapan awal SPM Bidang Perumahan melalui penyediaan data masyarakat yang berpotensi menjadi korban bencana dan relokasi program pemerintah provinsi	Dokumen data awal untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah	1 Dok	1	100%	-	-	-
2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum pada kawasan permukiman	Panjang jalan dan drainase di kawasan permukiman	18.000 Meter	22.913	127,29%	-	-	-

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Capaian Kinerja (IKU)		Target	Capaian Kinerja (IKU)	
				Realisasi	%		Realisasi	%
3	Meningkatnya cakupan jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki data pertanahan untuk perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah ketersediaan lahan (Ha) untuk pengembangan perumahan dan kawasan permukiman	3000 Ha	3.430,70	114,35%	-	-	-
4	Meningkatnya cakupan layanan akses perumahan yang layak, aman dan terjangkau.	Jumlah Perbaikan RTLH	-	-	-	54 Unit	54	100%
5	Meningkatnya cakupan layanan program pengembangan perumahan guna pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) di bidang perumahan.	Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni dan Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni	-	-	-	100%	100%	100%
6	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Jumlah kawasan kumuh yang tertata	-	-	-	1 Kawasan	2	200%
7	Meningkatnya Kualitas PSU Kawasan Permukiman.	Persentase terlaksananya peningkatan kualitas Prasarana, Sarana, Utilitas Umum(PSU) pada kawasan permukiman.	-	-	-	85%	100%	117,65%
9	Meningkatnya koordinasi dalam layanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang	Jumlah orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta PSU	-	-	-	60 Org/ Badan	328	546,66%

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Capaian Kinerja (IKU)		Target	Capaian Kinerja (IKU)	
				Realisasi	%		Realisasi	%
	perumahan dan kawasan permukiman.	yang telah mendapat sertifikasi dan registrasi.						
10	Meningkatnya Data Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara (%)	-	-	-	40%	44,70%	111,75%
11	Meningkatnya Data Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Persentase Luas Lahan Bersertifikat (%)	-	-	-	1,10%	1,08%	98,18%

Untuk capaian kegiatan dan sub kegiatan tahun sebelumnya dinilai berdasarkan perjanjian kinerja Eselon III dan IV tahun sebelumnya.

Tabel 3.5. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Bidang, Sub Subtansi dan Sub Bagian Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan 2022.

No.	SASARAN KEGIATAN BIDANG / SUB SUBTANSI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Tahun 2021			Tahun 2022		
				TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
					REALISASI	CAPAIAN (%)		REALISASI	CAPAIAN (%)
A.	**Sekretariat**								
1.	Tersedianya dukungan layanan administrasi perkantoran	Terlaksananya layanan administrasi perkantoran	Tahun	1	1	100%	1	1	100%
2.	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Terlaksananya kegiatan peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Tahun	1	1	100%	1	1	100%
3.	Pembinaan terhadap peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya kedisiplinan aparatur	Tahun	1	1	100%	1	1	100%
4.	Terlaksananya layanan sistem perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Dokumen	14	14	100%	14	14	100%
5.	Terlaksananya pengelolaan aset/ barang daerah	Jumlah Dokumen pengelolaan aset/ barang daerah	Dokumen	1	1	100%	1	1	100%
A.1.	**Sub Bagian Penyusunan Program**								
1.	Tersusunnya dokumen Laporan Capaian Kinerja	Tersusunnya LKIP 2021	Dokumen	1	1	100%	1	1	100%

No.	SASARAN KEGIATAN BIDANG / SUB SUBTANSI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Tahun 2021			Tahun 2022		
				TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
					REALISASI	CAPAIAN (%)		REALISASI	CAPAIAN (%)
	dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya konsep naskah LPPD dan LKPJ 2021	Dokumen	2	2	100%	2	2	100%
		Tersusunnya Laporan TEPRA, SIPD Kemendagri, SIMP3D dan Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	100%	4	4	100%
2.	Tersusunnya dokumen Perencanaan dan Penganggaran SOPD (Renja 2022, Renja Perubahan 2021, PPAS 2022, PPAS Perubahan 2021, RKA 2022 dan RKA Perubahan Tahun 2021	Tersusunnya Renja 2023	Dokumen	1	1	100%	1	1	100%
		Tersusunnya Renja Perubahan 2022	Dokumen	1	1	100%	1	1	100%
		Tersusunnya PPAS 2022	Dokumen	1	1	100%	1	1	100%
		Tersusunnya PPAS Perubahan 2022	Dokumen	1	1	100%	1	1	100%
		Tersusunnya RKA 2023	Dokumen	1	1	100%	1	1	100%
		Tersusunnya RKA Perubahan Tahun 2022	Dokumen	1	1	100%	1	1	100%
A.2.	**Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian**								
1.	Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Tahun	1	1	100%	1	1	100%
		Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan /triwulan/ semesteran SKPD	Dokumen	1	1	100%	1	1	100%

No.	SASARAN KEGIATAN BIDANG / SUB SUBTANSI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Tahun 2021			Tahun 2022		
				TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
					REALISASI	CAPAIAN (%)		REALISASI	CAPAIAN (%)
2.	Terlayaninya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah	Persen	100	100	100%	100	100	100%
		Terlaksananya rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Dokumen	5	5	100%	1	1	100%
3.	Terlayaninya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pendataan dan Pengelolaan administrasi kepegawaian	Tahun	-	-	-	1	1	100%
		Terlaksananya monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Tahun	-	-	-	1	1	100%
		Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	Tahun	-	-	-	1	1	100%
4.	Terlayaninya administrasi umum perangkat daerah	Tersedianya komponen instalasi dan alat listrik/ penerangan bangunan kantor	Jenis	5	5	100%	5	5	100%
		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	9	9	100%	9	9	100%
		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Lembar	300.000	300.000	100%	300.000	300.000	100%

No.	SASARAN KEGIATAN BIDANG / SUB SUBTANSI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Tahun 2021			Tahun 2022		
				TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
					REALISASI	CAPAIAN (%)		REALISASI	CAPAIAN (%)
		Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	Eks	21.900	21.900	100%	21.900	21.900	100%
		Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dokumen	4	4	100%	4	4	100%
5.	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya jasa surat menyurat	Surat	500	500	100%	500	648	129,60%
		Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tahun	1	1	100%	1	1	100%
		Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Dokumen	1	1	100%	1	1	100%
6.	Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya jasa pemeilharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan	Unit	17	17	100%	17	17	100%
		Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Unit	17	17	100%	17	17	100%
		Terlaksananya pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Unit	1	1	100%	1	1	100%

No.	SASARAN KEGIATAN BIDANG / SUB SUBTANSI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Tahun 2021			Tahun 2022		
				TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
					REALISASI	CAPAIAN (%)		REALISASI	CAPAIAN (%)
		Terlaksananya pemeliharan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit	70	70	100%	70	70	100%
B.	**Bidang Perumahan**								
1.	Tersedianya data Rumah di Lokasi Rawan Bencana atau Relokasi Program Provinsi.	Jumlah Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Kegiatan	1	1	100%	1	1	100%
2.	Tertatanya Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Kegiatan	2	2	100%	4	4	100%
3.	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Kegiatan	2	2	100%	2	2	100%

No.	SASARAN KEGIATAN BIDANG / SUB SUBTANSI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Tahun 2021			Tahun 2022		
				TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
					REALISASI	CAPAIAN (%)		REALISASI	CAPAIAN (%)
4.	Terfasilitasinya Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Kegiatan	1	1	100%	-	-	-
B.1.	**Sub Subtansi Perencanaan Teknis Bidang Perumahan**								
1.	Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen	1	1	100%	1	1	100%
2.	Tersusun /Tereview /Terlegalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun /Tereview /Terlegalisasi	Dokumen	1	1	100%	1	1	100%
3.	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	1	1	100%	1	1	100%

No.	SASARAN KEGIATAN BIDANG / SUB SUBTANSI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Tahun 2021			Tahun 2022		
				TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
					REALISASI	CAPAIAN (%)		REALISASI	CAPAIAN (%)
4.	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/ Peremajaan/ Permukiman dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/ Peremajaan/ Permukiman dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (Lima Belas) Ha	Dokumen	1	1	100%	1	1	100%
B.2.	**Sub Subtansi Perumahan Swadaya dan Perumahan Formal Bidang Perumahan**								
1.	Berkurangnya Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Kalimantan Tengah	Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	Unit	0	0	0%	54	54	100%

No.	SASARAN KEGIATAN BIDANG / SUB SUBTANSI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Tahun 2021			Tahun 2022		
				TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
					REALISASI	CAPAIAN (%)		REALISASI	CAPAIAN (%)
2.	Terlaksananya Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Laporan	1	1	100%	1	1	100%
B.3.	**Sub Subtansi Pembiayaan dan Pengembangan Kawasan Bidang Perumahan**								
1.	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	-	-	-	1	1	100%
2.	Meningkatnya Fasilitasi akses penyediaan dan pembiayaan perumahan bagi masyarakat di provinsi Kalimantan Tengah	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi akses penyediaan dan pembiayaan perumahan bagi masyarakat di provinsi Kalimantan Tengah	Dokumen	1	1	100%	-	-	-
C	**Bidang Kawasan Permukiman**								
1.	Terlaksananya Urusan Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman	Jumlah Kegiatan Urusan Penyelenggaraan Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman	Kegiatan	3	3	100%	3	3	100%

No.	SASARAN KEGIATAN BIDANG / SUB SUBTANSI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Tahun 2021			Tahun 2022		
				TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
					REALISASI	CAPAIAN (%)		REALISASI	CAPAIAN (%)
2.	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Kegiatan	1	1	100%	1	1	100%
3.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan di Bidang Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun di bidang kawasan permukiman	Dokumen	1	1	100%	-	-	-
4.	Terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum pada Kawasan Permukiman	Jumlah panjang jalan dan drainase di kawasan permukiman	Meter	18.000	18.000	100%	-	-	-
5.	Tersusunnya laporan koordinasi dan sinkronisasi bidang kawasan permukiman	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi bidang kawasan permukiman	Laporan	1	1	100%	-	-	-
C.1.	**Sub Subtansi Pendataan Bidang Kawasan Permukiman**								
1.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun di Bidang Kawasan Permukiman.	Dokumen	1	1	100%	1	1	100%
2.	Terlaksananya Koordinasi dan Singkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Singkronisasi Bidang Kawasan Permukiman	Laporan	1	1	100%	1	1	100%

No.	SASARAN KEGIATAN BIDANG / SUB SUBTANSI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Tahun 2021			Tahun 2022		
				TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
					REALISASI	CAPAIAN (%)		REALISASI	CAPAIAN (%)
	Utilitas Umum Permukiman								
C.2.	**Sub Subtansi Preservasi dan Pengendalian Bidang Kawasan Permukiman**								
1.	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman yang Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disedikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	Lokasi	-	-	-	10	8	80%
2.	Terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum pada Kawasan Permukiman	Jumlah panjang jalan dan drainase di kawasan permukiman	Meter	18.000	18.000	100%	-	-	-
C.3.	**Sub Subtansi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Bidang Kawasan Permukiman**								
1.	Terlaksananya Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/Dipugar	Kawasan	-	-	-	2	2	100%
2.	Terlaksananya penanganan PSU Kawasan Permukiman	Jumlah Kawasan yang dapat akses pembangunan di suatu kawasan kumuh perkotaan	Kawasan	23	23	100%	-	-	-

No.	SASARAN KEGIATAN BIDANG / SUB SUBTANSI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Tahun 2021			Tahun 2022		
				TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
					REALISASI	CAPAIAN (%)		REALISASI	CAPAIAN (%)
D	**Bidang Pertanahan**								
1.	Terselenggaranya Kegiatan yang mendukung Penyelesaian sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan yang mendukung Penyelesaian sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kegiatan	-	-	-	1	1	100%
2.	Terselenggaranya Kegiatan yang mendukung Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan yang mendukung Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kegiatan	-	-	-	3	3	100%
3.	Meningkatnya cakupan koordinasi dan sinkronisasi pemberian izin lokasi dalam rangka penanaman modal dan kemudahan berusaha kewenangan provinsi	Tersedianya data base izin lokasi dalam rangka penanaman modal dan kemudahan berusaha kewenangan provinsi	Dokumen	1	1	100%	-	-	-
4.	Meningkatnya fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan	Jumlah dokumen penyelesaian permasalahan pertanahan yang difasilitasi	Dokumen	1	1	100%	-	-	-

No.	SASARAN KEGIATAN BIDANG / SUB SUBTANSI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Tahun 2021			Tahun 2022		
				TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
					REALISASI	CAPAIAN (%)		REALISASI	CAPAIAN (%)
5.	Meningkatnya hasil inventarisasi data subjek dan objek redistribusi tanah	Tersedianya data base subjek dan objek redistribusi tanah	Dokumen	1	1	100%	-	-	-
6.	Meningkatnya cakupan koordinasi penetapan redistribusi tanah objek reforma agraria lintas daerah kabupaten/kota	Terkoordinirnyapenetapan redistribusi tanah objek reforma agraria lintas daerah kabupaten/kota	Dokumen	1	1	100%	-	-	-
D.1.	**Sub Subtansi Manfaat dan Pengendalian Bidang Pertanahan**								
1.	Terinventarisasinya Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah Data Sengketa, Konflik, dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen	-	-	-	1	1	100%
2.	Terinventarisasinya Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Dokumen	-	-	-	1	1	100%
3.	Meningkatnya fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan	Jumlah dokumen penyelesaian permasalahan pertanahan yang difasilitasi	Dokumen	1	1	100%	-	-	-
4.	Meningkatnya hasil inventarisasi data subjek dan objek redistribusi tanah	Tersedianya data base subjek dan objek redistribusi tanah	Dokumen	1	1	100%	-	-	-

No.	SASARAN KEGIATAN BIDANG / SUB SUBTANSI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Tahun 2021			Tahun 2022		
				TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
					REALISASI	CAPAIAN (%)		REALISASI	CAPAIAN (%)
5.	Meningkatnya cakupan koordinasi penetapan redistribusi tanah objek reforma agraria lintas daerah kabupaten/kota	Terkoordinirnya penetapan redistribusi tanah objek reforma agraria lintas daerah kabupaten/kota	Dokumen	1	1	100%	-	-	-
D.2.	**Sub Subtansi Perencanaan dan Pendataan Bidang Pertanahan**								
1	Terlaksananya Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	-	1	1	100%
2	Terlaksananya Koordinasi, Singkronisasi, Fasilitasi dan Kerja Sama Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria dalam (satu) Provinsi	Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan AKses dalam rangka Reforma Agraria	Berita Acara	-	-	-	1	1	100%
3.	Meningkatnya cakupan koordinasi dan sinkronisasi pemberian izin lokasi dalam rangka penanaman modal dan kemudahan berusaha kewenangan provinsi	Tersedianya data base izin lokasi dalam rangka penanaman modal dan kemudahan berusaha kewenangan provinsi	Dokumen	1	1	100%	-	-	-

3.3 Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis (Renstra) Organisasi.

Renstra SKPD merupakan dokumen formal dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun kedepan masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Kualitas penyusunan Rencana Strategis SKPD akan sangat ditentukan oleh kemampuan dalam memahami permasalahan, tugas dan fungsi SKPD serta dalam menerjemahkan visi, misi dan program pembangunan RPJMD ke dalam Rencana Strategis SKPD. Rencana Strategis SKPD menjawab 3 pertanyaan dasar yakni (a) Sasaran apa yang hendak dicapai sesuai permasalahan dan isu strategis dalam lima tahun mendatang; (b) Bagaimana mencapainya; dan (c) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah 2021–2026 sebagai upaya dalam melaksanakan pokok-pokok pikiran Visi Gubernur Kalimantan Tengah terpilih yaitu KALIMANTAN TENGAH MAKIN BERKAH (BERMARTABAT, ELOK, RELIGIUS, KUAT, AMANAH, HARMONIS) dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Tengah, khusus untuk Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terutama misi ke-2 yaitu: "**Memperkuat ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global**".

Berdasarkan Hasil Analisis Isu Strategis maka Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026 dijabarkan dalam sasaran, program dan kegiatan yang dirinci pertahun selama 5 tahun. Renstra merupakan pedoman yang penting dalam penyusunan rencana kerja, pelaksanaan kegiatan dan monitoring serta evaluasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah.

Di dalam Renstra tahun 2021-2026 terdapat tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan perangkat daerah pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah, seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.6. Capaian Terhadap Target Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah (Renstra) Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah.

No.	Tujuan	Sasaran		Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke -					Kondisi Pada Akhir Tahun Perencanaan (2026)	Capaian Tahun 2022	Capaian Terhadap Target pada Tahun Penilaian (2022)	Capaian Terhadap Target Akhir Tahun Perencanaan (2026)
						2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Meningkatkan cakupan layanan urusan bidang perumahan di Provinsi Kalimantan Tengah guna peningkatan pelayanan dasar perumahan.	1	Meningkatnya cakupan layanan akses perumahan yang layak, aman dan terjangkau.	Jumlah Perbaikan RTLH	Unit	90	135	140	145	150	660	54	60%	8,18%
		2	Meningkatnya cakupan layanan program pengembangan perumahan guna pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) di bidang perumahan.	Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni dan Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatkan Fungsi Layanan Kawasan Permukiman	1	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Jumlah kawasan kumuh yang tertata	Kawasan	1	1	1	1	1	5	2	200%	40%
		2	Meningkatnya Kualitas PSU Kawasan Permukiman	Persentase terlaksananya peningkatan kualitas Prasarana, Sarana, Utilitas Umum(PSU) pada kawasan permukiman	Persen	85%	88%	94%	98%	100%	100%	100%	117,65%	100%
		3	Meningkatnya koordinasi dalam layanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta PSU yang telah mendapat sertifikasi dan registrasi	Orang/ Badan	60	60	80	100	100	100	328	546,66%	328%

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke -					Kondisi Pada Akhir Tahun Perencanaan (2026)	Capaian Tahun 2022	Capaian Terhadap Target pada Tahun Penilaian (2022)	Capaian Terhadap Target Akhir Tahun Perencanaan (2026)
					2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	Meningkatkan Cakupan Layanan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Meningkatnya Data Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara (%)	Persen	40	50	60	70	80	80	44,7	111,75%	55,88%
		2 Meningkatnya Data Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Persentase Luas Lahan Bersertifikat (%)	Persen	1,1	1,12	1,13	1,15	1,17	1,17	1,08	98,18%	92,31%
Rata - Rata Capaian Terhadap Target Jangka Menengah (Renstra)Tahun 2022												**162,03%**	
Rata - Rata Capaian Target Akhir Tahun Perencanaan Renstra (2026) Sampai Dengan Tahun 2022													**103,48%**

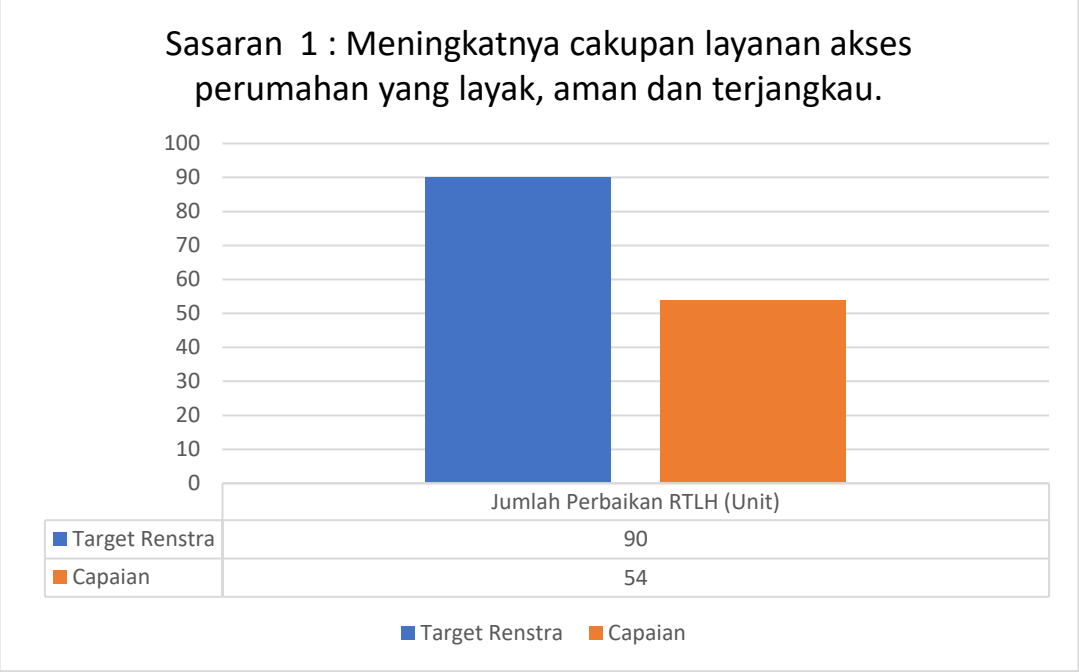

Dalam hal pemenuhan target indikator sasaran jumlah perbaikan Rumah Tidak Layak huni (RTLH) sangat dipengaruhi oleh besarnya ketersediaan anggaran. Target Renstra yang telah ditetapkan masih belum bisa di akomodir seluruhnya dalam kegaiatan tahun 2022. Kekurangan jumlah capaian tahun 2022 direncanakan akan dipenuhi dalam rencana program dan kegiatan tahun berikutnya menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada pada tahun perencanaan berikutnya.

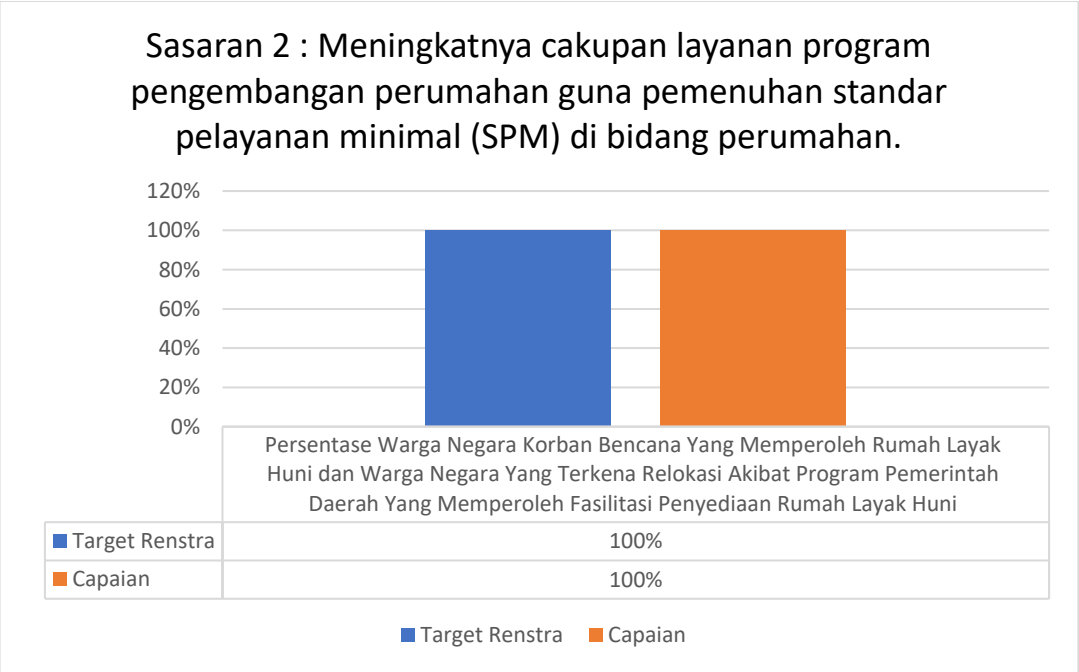

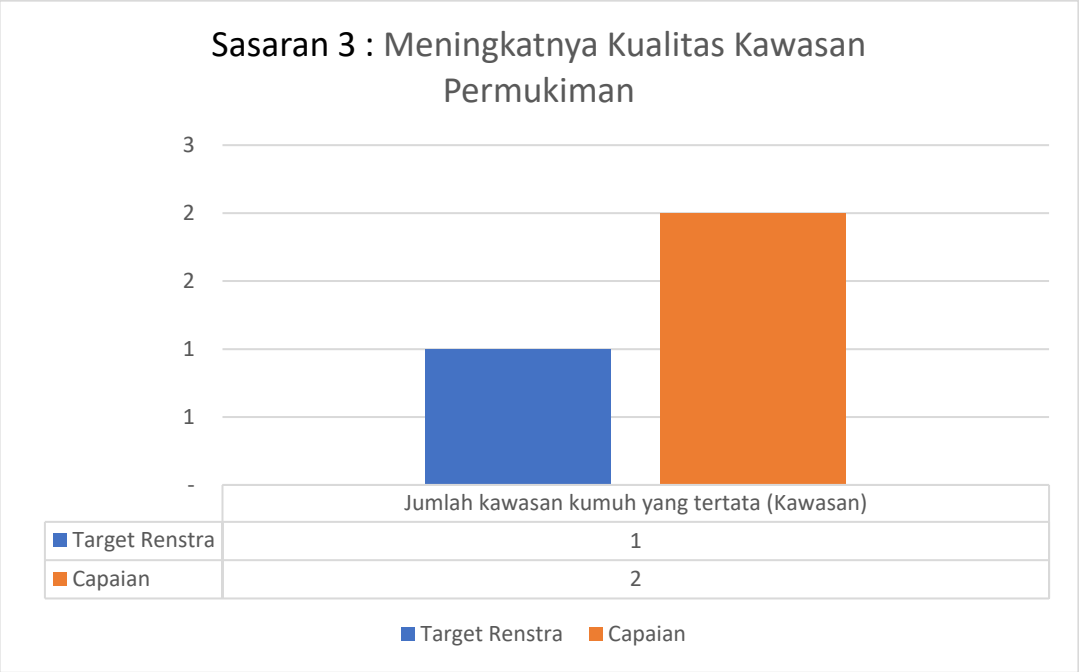
Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman
3
2
2
1
1
-
Jumlah kawasan kumuh yang tertata (Kawasan)
Target Renstra 1
Capaian 2
Target Renstra
Capaian

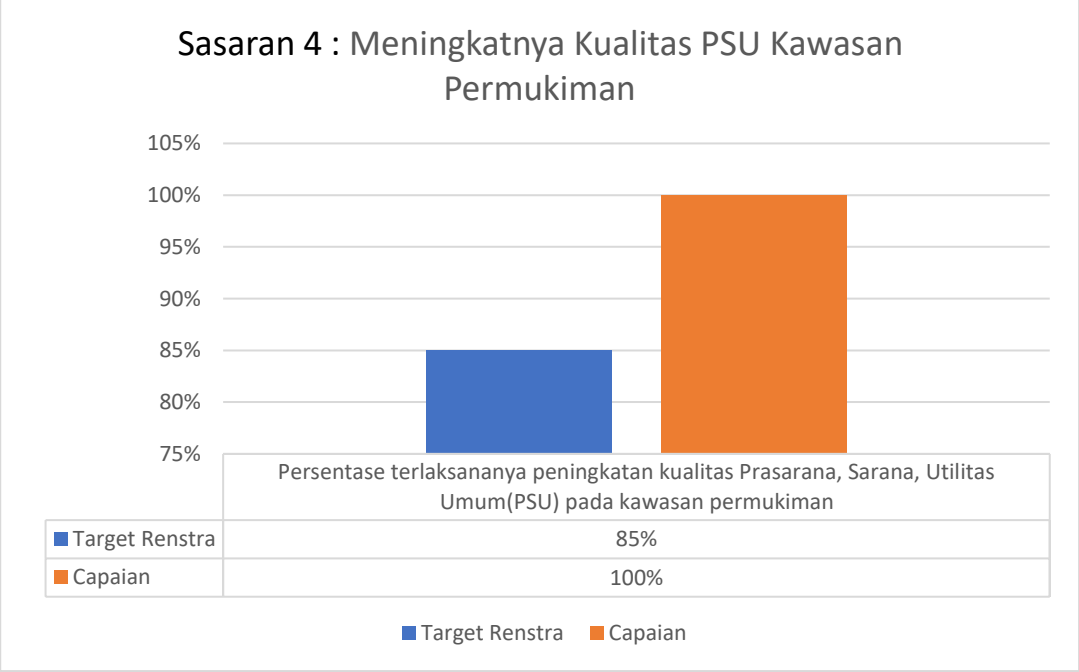
Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas PSU Kawasan Permukiman
105%
100%
95%
90%
85%
80%
75%
Persentase terlaksananya peningkatan kualitas Prasarana, Sarana, Utilitas Umum(PSU) pada kawasan permukiman
Target Renstra 85%
Capaian 100%
Target Renstra
Capaian

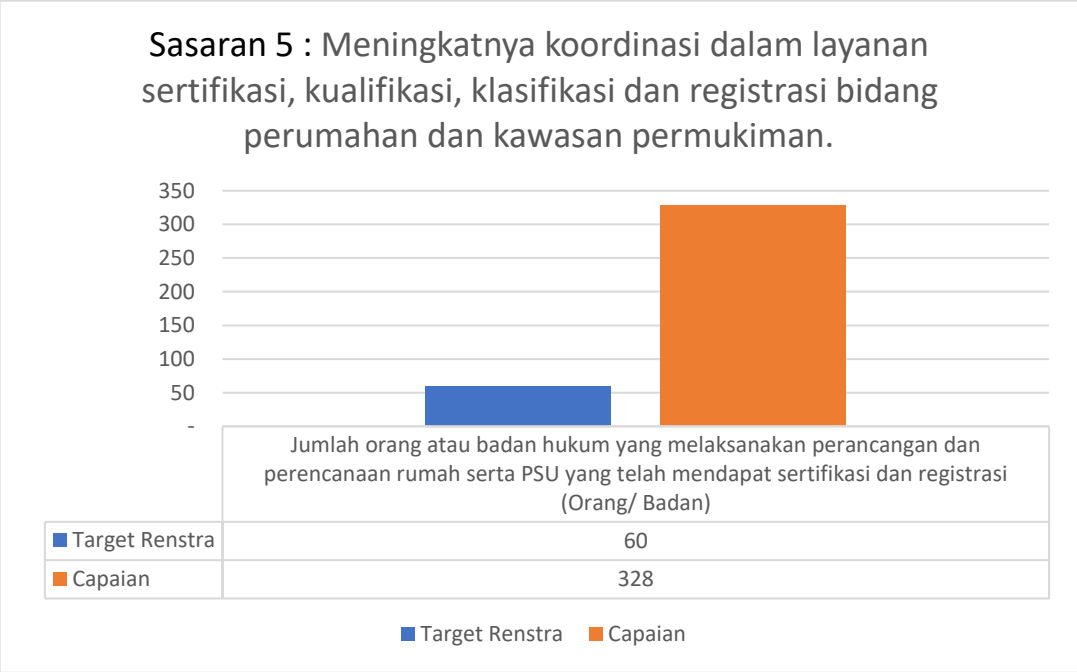
Sasaran 5 : Meningkatnya koordinasi dalam layanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman.
350
300
250
200
150
100
50
-
Jumlah orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta PSU yang telah mendapat sertifikasi dan registrasi (Orang/ Badan)
Target Renstra 60
Capaian 328
Target Renstra
Capaian

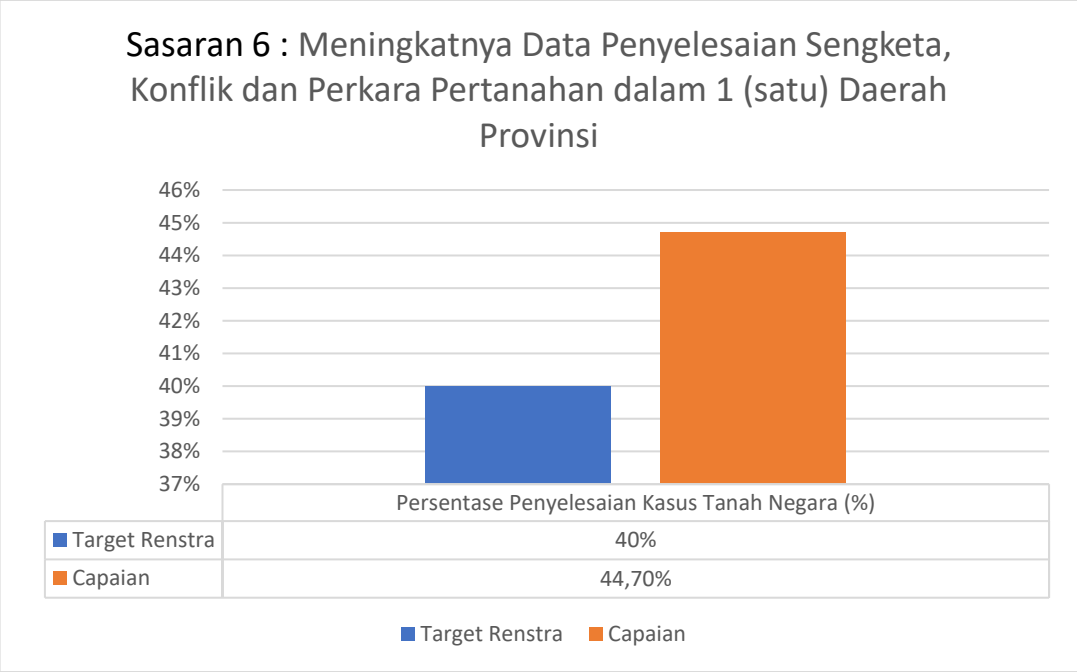
Sasaran 6 : Meningkatnya Data Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
46%
45%
44%
43%
42%
41%
40%
39%
38%
37%
Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara (%)
Target Renstra 40%
Capaian 44,70%
Target Renstra
Capaian

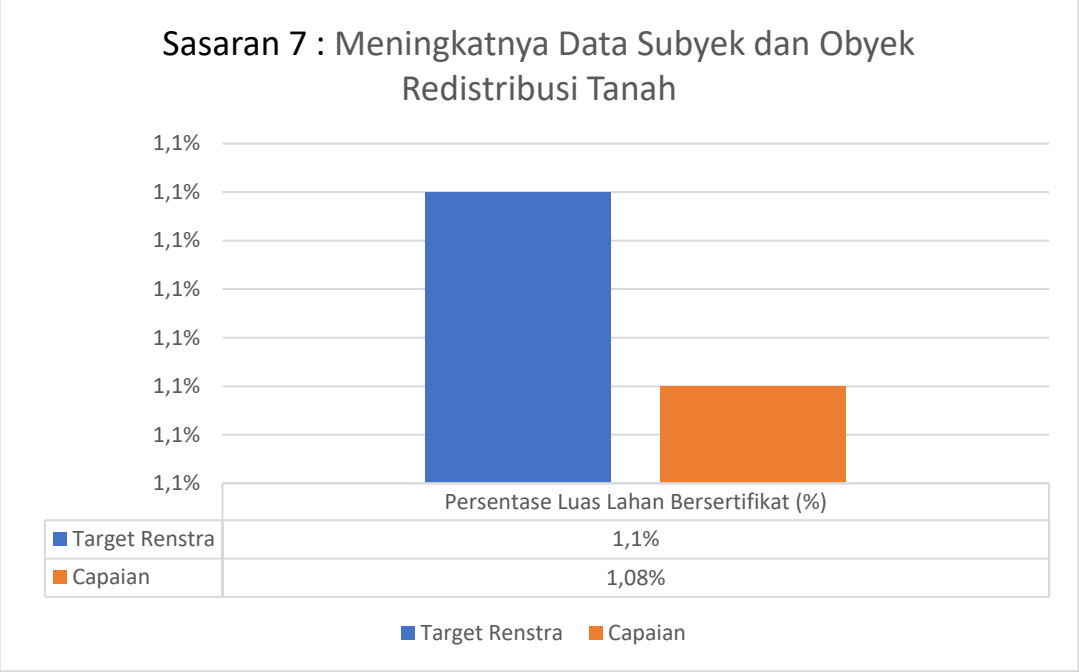

Berdasarkan Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Organisasi yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026 terdapat 7 Sasaran Strategis dan IKU Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022. Terdapat 1 IKU tercapai sesuai target, 4 IKU melebihi target dan 2 IKU kurang dari target.

Tabel 3.7. Persentase Capaian Target Kinerja Sasaran Strategis Organisasi Tahun 2022 Terhadap Target Renstra 2021-2026

NO.	SASARAN STRATEGIS ORGANISASI	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN	KET.
1	Meningkatnya cakupan layanan akses perumahan yang layak, aman dan terjangkau.	Jumlah Perbaikan RTLH	60,00%	Kurang Dari Target
2	Meningkatnya cakupan layanan program pengembangan perumahan guna pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) di bidang perumahan.	Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni dan Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni	100,00%	Sesuai Target
3	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Jumlah kawasan kumuh yang tertata	200,00%	Melebihi Target
4	Meningkatnya Kualitas PSU Kawasan Permukiman.	Persentase terlaksananya peningkatan kualitas Prasarana, Sarana, Utilitas Umum(PSU) pada kawasan permukiman.	117,65%	Melebihi Target
5	Meningkatnya koordinasi dalam layanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman.	Jumlah orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta PSU yang telah mendapat sertifikasi dan registrasi.	546,66%	Melebihi Target
6	Meningkatnya Data Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara (%)	111,75%	Melebihi Target

NO.	SASARAN STRATEGIS ORGANISASI	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN	KET.
7	Meningkatnya Data Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Persentase Luas Lahan Bersertifikat (%)	98,18%	Kurang Dari Target

3.4 Capaian Realisasi Kinerja tahun 2022 terhadap standar Nasional.

Pada perencanaan kinerja tahun 2022 terdapat 1 sasaran dan indikator yang diterapkan berdasarkan standar nasional yaitu S-2 : Meningkatnya cakupan layanan program pengembangan perumahan guna pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) di bidang perumahan dengan indikator IKU-2 : Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni dan Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni. Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), urusan perumahan rakyat merupakan salah satu jenis pelayanan dasar pemerintah provinsi yang meliputi 1). Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi, dan 2). Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi. Dimana jenis pelayanan tersebut wajib diselesaikan dengan tuntas. Berikut capaian kinerja terhadap standar nasional :

Tabel 3.8. Capaian Target Kinerja Sasaran Strategis Organisasi Tahun 2022 Terhadap Standar Nasional

No.	Sasaran Organisasi	Indikator Kinerja Organisasi	Standar Nasional	Capaian Kinerja Organisasi	Tingkat Capaian
1.	Meningkatnya cakupan layanan program pengembangan perumahan guna pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) di bidang perumahan	Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni	100 %	100 %	100 %
2.		Persentase Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni.	100 %	100 %	100 %

3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Evaluasi Kinerja bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian realisasi terhadap target yang ditetapkan, kendala/masalah yang dihadapi dalam rangka pencapaian misi, dan agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Pencapaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 terlihat dari sejauh mana pelaksanaan strategi dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Secara umum pencapaian kinerja untuk semua sasaran pada tahun 2022 ini sudah terkategori tinggi walau belum mencapai 100%, hal ini tidak terlepas dari penyebab keberhasilan dan kegagalan.

Adapun penyebab keberhasilan yang dimaksudkan antara lain:

1. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing – masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan pada penetapan kinerja sebelumnya pada awal tahun 2022.
2. Perencanaan dari masing – masing kegiatan telah focus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya focus pada tindakan.
3. Telah diimplementasikannya penggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu kinerja yang optimal.
4. Telah dilaksanakannya rapat rutinitas dan pelaporan secara berkala pada Dinas sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya, untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak focus pada hasil. Hasil evaluasi dituangkan ke dalam laporan triwulan tahun 2022.
5. Adanya komitmen, dukungan dan kerjasama yang baik dan tinggi dari berbagai pihak untuk Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah.

Sedangkan penyebab kegagalan yang ada antara lain:

1. Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) baik kualitas maupun kuantiitas dibandingkan beban kerja yang ada pada dinas.
2. Belum optimalnya ketersediaan data yang ada pada OPD untuk menunjang proses perencanaan dan pengambilan kebijakan.
3. Alokasi anggaran yang ditetapkan terkadang tidak sesuai dengan yang direncanakan sehingga beberapa sasaran tidak dapat dicapai sesuai dengan yang ditargetkan.

4. Adanya kebijakan refocusing dan penyesuaian anggaran yang terjadi ,sehingga target yang telah ditetapkan berubah/ berkurang/ dihapus, sehingga tidak mencapai sasaran yang diharapkan.

Untuk mengantisipasai adanya kegagalan dan penurunan kinerja pada tahun 2022 telah dilakukan berbagai upaya diantaranya :

1. Dilaksanakannya rapat rutinitas dan pelaporan secara berkala pada Dinas sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya.
2. Telah dilakukannya penerapan manajemen risiko pada Dinas berdasarkan *Risk Register* yang telah dibuat pada awal tahun perencanaan 2022.
3. Telah dilakuannya inventarisasi hambatan dan kendala secara berkala. Berdasarkan hasil evaluasi capaian kegiatan, dilakukan inventarisasi hambatan dan kendala untuk masing – masing sub kegiatan. Kemudian hambatan dan kendala diklasifikasikan menjadi kendala yang dapat diselasaikan dan kendala yang tidak dapat diselesaikan. Untuk kendala yang yang tidak dapat diselesaikan akan dilakukan upaya penyesuaian terhadap kegiatan tersebut, sehingga pada akhirnya tidak menghambat upaya pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

3.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program / kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya maunsia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus:

Persentase Efisiensi Biaya = 100% - ((Realisasi Biaya / Terget

Pada Tahun 2022, realisasi biaya untuk semua program adalah Rp. 22.346.349.107,46 sementara target biaya untuk semua belanja program / kegiatan pada awal tahun perencanaan adalah sebesar Rp. 24.183.737.000,00. dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah sebesar 7,59% dari anggaran awal tahun perencanaan. Pada pertengahan tahun 2022 dilakukan penyesuaian anggaran daerah sehingga berimbas dengan adanya pengurangan pagu dinas menjadi Rp. 23.010.751.256, hal tersebut menyebabkan dinas melakukan berbagai penyesuaian dalam anggaran maupun program kegiatannya agar target yang telah ditentukan masih dapat terpenuhi dengan maksimal. Sampai dengan akhir tahun 2022 Dinas Perumahan, kawasan permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah

dapat melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp. 664.402.148,54 (2,89 % dari pagu yang tersedia) yang sebagian besar di dapat dari efisiensi negosiasi nilai kontrak dan pengadaan barang, dengan rata – rata capaian IKU organisasi berdasarkan perjanjian kinerja sebesar 118,23 % dan 112,51 % rata – rata capaian IKU organisasi berdasarkan target pada Renstra 2021-2026. Persentase efisiensi ini secara teori masih sangat kecil, sehingga dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2022 secara umum tidak terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya biaya. Apalagi masih terdapat 1 indikator kinerja yang masih belum mencapai target 100 %.

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan multipihak dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan jasa pihak ketiga dalam pelaksanaan kegiatan, penggunaan tenaga ahli konsultan dan kerjasama dengan berbagai pihak.

3.7 Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Kinerja.

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022 adalah :

1. Program Pengembangan Perumahan.
2. Program Kawasan Permukiman.
3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.
4. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.
5. Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee.

Pengelolaan strategi perlaksanaan program – program tersebut sangatlah menentukan keberhasilan pencapaian kinerja perangkat daerah. Program Pengembangan Perumahan merupakan program yang menunjang pencapaian Sasaran S-2 : Meningkatnya cakupan layanan program pengembangan perumahan guna pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) di bidang perumahan, dengan indikator IKU-2 : Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni dan Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni. Merupakan program urusan wajib yang menunjang pemenuhan pelayanan dasar minimal (SPM) pemerintah daerah bidang perumahan rakyat terkait penanganan rumah bagi korban bencana provinsi. Pelaksanaan program dilakukan melalui tahapan – tahapan kegiatan, mulai

dari pendataan, Sosialisasi dan persiapan, proses pembangunan dan rehabilitasi sampai kepada pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana. Keberhasilan pencapaian kinerja sangat ditentukan oleh perencanaan dan pelaksanaan setiap tahapannya.

Program Kawasan Permukiman merupakan program yang menunjang capaian sasaran S-1 : Meningkatnya cakupan layanan akses perumahan yang layak, aman dan terjangkau dan sasaran S-3 : Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman, dengan indikator IKU-1: Jumlah Perbaikan RTLH dan indikator IKU-3: Jumlah kawasan kumuh yang tertata. Program Kawasan permukiman meliputi 2 kegiatan utama, yaitu kegiatan penataan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dengan berfokus pada penanganan fisik rumah, lingkungan permukiman serta pembinaan kualitas hidup masyarakat di kawasan kumuh kewenangan pemerintah provinsi.

Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) merupakan program yang menunjang pencapaian sasaran S-4 : Meningkatnya Kualitas PSU Kawasan Permukiman dengan indikator IKU-4 : Persentase terlaksananya peningkatan kualitas Prasarana, Sarana, Utilitas Umum(PSU) pada kawasan permukiman. Meliputi 3 kegiatan yaitu, Perencanaan, Penyediaan PSU serta koordinasi dan sinronisasi penyediaan PSU Permukiman. Program ini merupakan program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat dalam usaha pemerintah daerah provinsi terutama dalam rangka mencegah tumbuh dan berkembangnya kantong – kantong wilayah kumuh baru. Secara umum dapat di definisikan bahwa program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) bertujuan untuk pencegahan sedangkan program Kawasan permukiman bertujuan untuk penanganan kawasan kumuh yang telah ada.

Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan merupakan program yang mendukung pencapaian sasaran S-6 : Meningkatnya Data Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan Indikator IKU-6 : Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara (%). Program ini hanya berfokus pada urusan Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan yang ada di pemerintah kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Tengah. Hal inilah yang merupakan salah satu penyebab kendala pencapaian target kinerja, dikarenakan data – data yang diperoleh bersumber dari data di kabupaten/kota. Pencapaian kinerja tergantung pada ketersediaan data di kabupaten/kota.

Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee merupakan program yang mendukung sasaran S-7 : Meningkatnya Data Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah dengan indikator IKU-7 : Persentase Luas Lahan Bersertifikat (%). Meliputi kegiatan inventarisasi serta koordinasi dan sinkronisasi terkait Redistribusi Tanah. Sama halnya dengan program Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dimana data – data yang diperoleh bersumber dari data di kabupaten/kota. Pencapaian kinerja pun tergantung pada ketersediaan data di kabupaten/kota. Oleh sebab itu koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan data di daerah sangat diperlukan guna menjamin keberhasilan capaian kinerja organisasi.

Dalam hal pencapaian sasaran S-5 : Meningkatnya koordinasi dalam layanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan Indikator IKU-5 : Jumlah orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta PSU yang telah mendapat sertifikasi dan registrasi, pada tahun 2022 tidak terdapat program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung capaian tersebut. Kegiatan pada tahun 2022 hanya dilakukan dalam rangka pengelolaan registrasi orang atau badan hukum yang melakukan perancangan dan perencanaan rumah serta PSU Permukiman.

Tabel 3.9. Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan yang menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah.

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SASARAN & IKU YANG DIDUKUNG	
							SASARAN	IKU
1	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Keterlaksanaan**	**Persen**	**100%**	**100%**	**100%**		
1	***Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Jumlah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terlaksana***	***Keg***	***3***	***3***	**100%**		
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	3	3	100%		
b	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD/RKA-SKPD Perubahan dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD/RKA-SKPD Perubahan	Dok	2	4	200%		
c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dok	4	6	150%		
2	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Jumlah Kegiatan Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah yang Terlaksana***	***Keg***	***2***	***2***	**100%**		
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Thn	1	1	100%		
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Dok	1	1	100%		
3	***Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah***	***Jumlah Kegiatan Pengadministrasian Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Terlaksana***	***Keg***	***2***	***2***	**100%**		
a	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Pesentase Terlaksananya Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah	Persen	100	100	100%		

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SASARAN & IKU YANG DIDUKUNG	
							SASARAN	IKU
1	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
b	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah Pada SKPD	Dok	1	1	100%		
4	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Jumlah Kegiatan Pengadministrasian Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana***	***Keg***	**3**	**3**	**100%**		
a	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengelolaan administrasi kepegawaian	Thn	1	1	100%		
b	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Thn	1	1	100%		
c	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-Undangan	Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	Thn	1	1	100%		
5	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Jumlah Kegiatan Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah yang terlaksana***	***Keg***	**5**	**5**	**100%**		
a	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi dan alat listrik/ penerangan bangunan kantor	Jenis	5	5	100%		
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	9	9	100%		
c	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Lembar	300.000	300.000	100%		
d	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	Eksemplar	21.900	21.900	100%		
e	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dok	4	4	100%		
6	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana***	***Keg***	**3**	**3**	**100%**		
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Surat	500	648	129,6%		
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tahun	1	1	100%		

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SASARAN & IKU YANG DIDUKUNG	
							SASARAN	IKU
1	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Dokumen	1	1	100%		
7	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerahyang dilaksanakan***	***Keg***	**4**	**4**	**100%**		
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeilharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan	Unit	17	17	100%		
b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Perizinan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Unit	17	17	100%		
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Unit	1	1	100%		
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit	70	70	100%		
II	***PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN***	***Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni dan Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni***	***Persen***	***100%***	**100%**	**100%**	S-2 Meningkatnya cakupan layanan program pengembangan perumahan guna pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) di bidang perumahan.	IKU-2 Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni dan Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni
1	***Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi***	***Jumlah KegiatanPendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi yang terlaksana***	***Keg***	**1**	**1**	**100%**		
a	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Terkena Relokasi Program Provinsi	Dok	1	1	100%		

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SASARAN & IKU YANG DIDUKUNG	
							SASARAN	IKU
1	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
III	***PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN***	***Jumlah Perbaikan RTLH***	***Unit***	**54**	**54**	**100%**	S-1 Meningkatnya cakupan layanan akses perumahan yang layak, aman dan terjangkau.	IKU-1 Jumlah Perbaikan RTLH
		Jumlah kawasan kumuh yang tertata	***Kawasan***	**1**	**2**	**200%**	S-3 Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	IKU-3 Jumlah kawasan kumuh yang tertata
1	***Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (sepuluh) Ha Sampai Dengan di Bawah 15 (lima belas) Ha***	***Jumlah KegiatanPenataan Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (sepuluh) Ha Sampai Dengan di Bawah 15 (lima belas) Ha yang terlaksana***	***Keg***	**4**	**4**	**100%**		
a	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Laporan	1	1	100%	S-1 Meningkatnya cakupan layanan akses perumahan yang layak, aman dan terjangkau.	IKU-1 Jumlah Perbaikan RTLH
b	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	1	1	100%	S-1 Meningkatnya cakupan layanan akses perumahan yang layak, aman dan terjangkau.	IKU-1 Jumlah Perbaikan RTLH
c	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun /Tereview /Terlegalisasi	Dok	1	1	100%	S-1 Meningkatnya cakupan layanan akses perumahan yang layak, aman dan terjangkau.	IKU-1 Jumlah Perbaikan RTLH
d	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dok	1	1	100%	S-1 Meningkatnya cakupan layanan akses perumahan yang layak, aman dan terjangkau.	IKU-1 Jumlah Perbaikan RTLH
2	***Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (sepuluh) Ha Sampai Dengan di Bawah 15 (lima belas) Ha***	***Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (sepuluh) Ha Sampai Dengan di Bawah 15 (lima belas) Ha yang terlaksana***	***Keg***	**3**	3	100%		
a	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan	Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/ Peremajaan/ Permukiman dan	Dok	1	1	100%	S-1 Meningkatnya cakupan layanan akses perumahan	IKU-1 Jumlah Perbaikan RTLH

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SASARAN & IKU YANG DIDUKUNG	
							SASARAN	IKU
1	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (sepuluh) Ha Sampai Dengan di Bawah 15 (lima belas) Ha	Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (Lima Belas) Ha					yang layak, aman dan terjangkau.	
b	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Dalam Kawasan Permukiman Dengan Luas 10 (sepuluh) Ha Sampai Dengan di Bawah 15 (lima belas) Ha	Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	Unit	54	54	100%	S-1 Meningkatnya cakupan layanan akses perumahan yang layak, aman dan terjangkau.	IKU-1 Jumlah Perbaikan RTLH
c	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Pemukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/Dipugar	Kawasan	2	2	100%	S-3 Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	IKU-3 Jumlah kawasan kumuh yang tertata
IV	***PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)***	***Persentase terlaksananya peningkatan kualitas Prasarana, Sarana, Utilitas Umum(PSU) pada kawasan permukiman.***	***Persen***	***85%***	**100%**	**118%**	S-4 Meningkatnya Kualitas PSU Kawasan Permukiman.	IKU-4 Persentase terlaksananya peningkatan kualitas Prasarana, Sarana, Utilitas Umum(PSU) pada kawasan permukiman.
1	***Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman***	***Jumlah Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman yang terlaksana***	***Keg***	**3**	**3**	**100%**		
a	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun di Bidang Kawasan Permukiman.	Dok	1	1	100%	S-4 Meningkatnya Kualitas PSU Kawasan Permukiman.	IKU-4 Persentase terlaksananya peningkatan kualitas Prasarana, Sarana, Utilitas Umum(PSU) pada kawasan permukiman.
b	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman Untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disedikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	Lokasi	10	8	80%	S-4 Meningkatnya Kualitas PSU Kawasan Permukiman.	IKU-4 Persentase terlaksananya peningkatan kualitas Prasarana, Sarana, Utilitas Umum(PSU) pada kawasan permukiman.

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SASARAN & IKU YANG DIDUKUNG	
							SASARAN	IKU
1	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
c	Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, Untilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Koordinasi dan Singkronisasi Bidang Kawasan Permukiman	Laporan	1	1	100%	S-4 Meningkatnya Kualitas PSU Kawasan Permukiman.	IKU-4 Persentase terlaksananya peningkatan kualitas Prasarana, Sarana, Utilitas Umum(PSU) pada kawasan permukiman.
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
	PERTANAHAN							
V	***PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN***	***Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara (%)***	***Persen***	***40***	**44,7**	**111,75%**	S-6 Meningkatnya Data Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	IKU-6 Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara (%)
1	***Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah provinsi***	***Jumlah Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah provinsi yang terlaksana***	***Keg***	**1**	**1**	**100%**		
a	Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data Sengketa, Konflik, dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dok	1	1	100%	S-6 Meningkatnya Data Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	IKU-6 Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara (%)
VI	***PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE***	***Persentase Luas Lahan Bersertifikat (%)***	***Persen***	***1,1***	**1,08**	**98,18%**	S-7 Meningkatnya Data Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	IKU-7 Persentase Luas Lahan Bersertifikat (%)
1	***Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi***	***Jumlah kegiatan yang mendukung Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi***	***Keg***	**3**	**3**	**100%**		
a	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Dok	1	1	100%	S-7 Meningkatnya Data Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	IKU-7 Persentase Luas Lahan Bersertifikat (%)

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SASARAN & IKU YANG DIDUKUNG	
							SASARAN	IKU
1	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
b	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dok	1	1	100%	S-7 Meningkatnya Data Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	IKU-7 Persentase Luas Lahan Bersertifikat (%)
c	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan AKses dalam rangka Reforma Agraria	Berita Acara	1	1	100%	S-7 Meningkatnya Data Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	IKU-7 Persentase Luas Lahan Bersertifikat (%)

3.8 Realisasi Anggaran Tahun 2022

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2022 terdiri dari 6 program, 13 kegiatan dan 37 sub kegiatan dengan pagu Belanja Langsung sebesar Rp. **23,010,751,256** berkurang Rp. 1,172,985,744 dari pagu awal tahun perencanaan. Didistribusikan pengelolaannya ke 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang teknis dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekretariat

Mengelola 1 (Satu) program, 7 (Tujuh) Kegiatan dan 22 (Dua Puluh Dua) sub kegiatan dengan pagu Rp.10,298,517,256 atau 44,76 persen dari total pagu. Adapun capaian kinerja keuangan sampai dengan akhir tahun 2022 untuk sekretariat sebesar Rp. 9,826,667,053 atau 95,42% dari total pagu yang dikelola, dan 42,70 % terhadap seluruh belanja langsung SKPD.

2. Bidang Perumahan

Mengelola 1 (Satu) program mandiri dan 1 (Satu) Program yang dikelola bersama Bidang Kawasan Permukiman; 2 (Dua) Kegiatan mandiri dan 1 (Satu) Kegiatan yang dikelola bersama Bidang Kawasan Permukiman; dan 7 (Tujuh) sub kegiatan dengan pagu Rp.3,102,819,000 atau 13,48 % dari total pagu. Adapun capaian kinerja keuangan sampai dengan akhir tahun 2022 untuk bidang perumahan sebesar Rp.3,063,931,738 atau 98,75 % dari total pagu yang dikelola, dan 13,32% terhadap seluruh belanja langsung SKPD.

3. Bidang Kawasan Permukiman

Mengelola 1 (Satu) program mandiri dan 1 (Satu) Program yang dikelola bersama Bidang Perumahan; 1 (Satu) Kegiatan mandiri dan 1 (Satu) Kegiatan yang dikelola bersama Bidang Perumahan; dan 4 (Empat) sub kegiatan dengan pagu Rp.8,953,915,000 atau 38,91 % dari total pagu. Adapun capaian kinerja keuangan sampai dengan akhir tahun 2022 untuk bidang kawasan permukiman sebesar Rp.8,801,251,674.46 atau 98,30% dari total pagu yang dikelola, dan 38,25% terhadap seluruh belanja langsung SKPD;

4. Bidang Pertanahan

Mengelola 2 (Dua) program, 2 (Dua) Kegiatan dan 4 (Empat) sub kegiatan dengan pagu Rp.655,500,000 atau 2,85 % dari total pagu. Adapun capaian kinerja keuangan sampai dengan akhir tahun 2022 untuk bidang pertanahan sebesar

Rp.654,498,642 atau 99,85% dari total pagu yang dikelola, dan 2,84% terhadap seluruh belanja langsung SKPD;

Agregasi dari capaian kinerja keuangan sekretariat dan bidang-bidang teknis menghasilkan capaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yakni sebesar 97,11%.

Tabel 3.10. Realisasi Anggaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan yang menunjang Pencapaian Perjanjian Kinerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah.

NO.	PROG.	KEG.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI KEUANGAN (Rp.)			KET.
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				**22.355.251.256,00**	**22.355.251.256,00**	**21.691.850.465**	**97,03**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**10.298.517.256,00**	**10.298.517.256,00**	**9.826.667.053**	**95,42**	
	a.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**138.250.000,00**	**138.250.000,00**	**137.845.137**	**99,71**	
		a).	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	80.000.000,00	80.000.000,00	79.770.955	99,71	
		b).	Koordiasi dan Penusunan DPA-SKPD	30.000.000,00	30.000.000,00	29.838.000	99,46	
		c).	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28.250.000,00	28.250.000,00	28.236.182	99,95	
	b.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**4.910.762.799,00**	**4.910.762.799,00**	**4.525.754.408**	**92,16**	
		a).	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.889.762.799,00	4.889.762.799,00	4.504.784.158	92,13	
		b).	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	21.000.000,00	21.000.000,00	20.970.250	99,86	
	c.	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**116.000.000,00**	**116.000.000,00**	**115.908.000**	**99,92**	
		a).	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	100.000.000,00	100.000.000,00	99.953.000	99,95	
		b).	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	16.000.000,00	16.000.000,00	15.955.000	99,72	
	d.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**39.109.000,00**	**39.109.000,00**	**36.213.137**	**92,60**	
		a).	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.000.000,00	10.000.000,00	9.952.000	99,52	
		b).	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	9.000.000,00	9.000.000,00	8.350.500	92,78	
		c).	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-Undangan	20.109.000,00	20.109.000,00	17.910.637	89,07	
	e.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**1.676.104.000,00**	**1.676.104.000,00**	**1.657.069.262**	**98,86**	
		a).	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	58.000.000,00	58.000.000,00	57.645.500	99,39	
		b).	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	829.463.000,00	829.463.000,00	811.063.500	97,78	
		c).	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	69.891.000,00	69.891.000,00	69.891.000	100,00	
		d).	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000	100,00	
		e).	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	658.750.000,00	658.750.000,00	658.469.262	99,96	

NO.	PROG.	KEG.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI KEUANGAN (Rp.)			KET.
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
	f.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**2.430.498.684,00**	**2.430.498.684,00**	**2.369.872.033**	**97,51**	
		a).	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000,00	7.000.000,00	6.750.000	96,43	
		b).	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	602.438.684,00	602.438.684,00	589.453.761	97,84	
		c).	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.821.060.000,00	1.821.060.000,00	1.773.668.272	97,40	
	g.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah**		**987.792.773,00**	**987.792.773,00**	**984.005.076**	**99,62**	
		a).	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	332.300.000,00	332.300.000,00	331.474.200	99,75	
		b).	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	294.800.000,00	294.800.000,00	293.103.876	99,42	
		c).	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	238.000.000,00	238.000.000,00	237.250.000	99,68	
		d).	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	122.692.773,00	122.692.773,00	122.177.000	99,58	
2	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**			**182.000.000,00**	**182.000.000,00**	**175.999.026,00**	**96,70**	
	a.	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**		**182.000.000,00**	**182.000.000,00**	**175.999.026**	**96,70**	
		a).	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	182.000.000,00	182.000.000,00	175.999.026	96,70	**Mendukung Pencapaian IKU 2**
3	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**			**5.138.683.000,00**	**5.138.683.000,00**	**5.060.897.512**	**98,49**	
	a.	**Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha**		**796.319.000,00**	**796.319.000,00**	**769.454.262**	**96,63**	
		a).	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	161.704.138,00	161.704.138,00	159.704.747	98,76	**Mendukung Pencapaian IKU 1**
		b).	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh	66.504.000,00	66.504.000,00	66.491.000	99,98	**Mendukung Pencapaian IKU 1**
		c).	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	199.760.152,00	199.760.152,00	196.773.152	98,50	**Mendukung Pencapaian IKU 1**
		d).	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	368.350.710,00	368.350.710,00	346.485.363	94,06	**Mendukung Pencapaian IKU 1**
	b.	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha**		**4.342.364.000,00**	**4.342.364.000,00**	**4.291.443.250,00**	**98,83**	

NO.	PROG.	KEG.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI KEUANGAN (Rp.)			KET.
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
		a).	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	77.500.000,00	77.500.000,00	76.700.000	98,97	**Mendukung Pencapaian IKU 1**
		b).	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	2.047.000.000,00	2.047.000.000,00	2.041.778.450	99,74	**Mendukung Pencapaian IKU 1**
		c).	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Pemukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	2.217.864.000,00	2.217.864.000,00	2.172.964.800	97,98	**Mendukung Pencapaian IKU 3**
4	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**			**6.736.051.000,00**	**6.736.051.000,00**	**6.628.286.874**	**98,40**	
	a.	**Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman**		**6.736.051.000,00**	**6.736.051.000,00**	**6.628.286.874**	**98,40**	
		a).	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	595.930.500,00	595.930.500,00	583.850.500	97,97	**Mendukung Pencapaian IKU 4**
		b).	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	5.964.946.000,00	5.964.946.000,00	5.869.296.874	98,40	**Mendukung Pencapaian IKU 4**
		c).	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	175.174.500,00	175.174.500,00	175.139.500	99,98	**Mendukung Pencapaian IKU 4**
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				**655.500.000,00**	**655.500.000,00**	**654.498.642,00**	**199,67**	
1	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**			**158.297.500,00**	**158.297.500,00**	**157.998.000**	**99,81**	
	a.	**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**		**158.297.500,00**	**158.297.500,00**	**157.998.000**	**99,81**	
		a).	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	158.297.500,00	158.297.500,00	157.998.000	99,81	**Mendukung Pencapaian IKU 6**
2	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**			**497.202.500,00**	**497.202.500,00**	**496.500.642**	**99,86**	
	a.	**Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**		**497.202.500,00**	**497.202.500,00**	**496.500.642**	**99,86**	
		a).	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	155.070.000,00	155.070.000,00	154.753.200	99,80	**Mendukung Pencapaian IKU 7**
		b).	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	192.994.000,00	192.994.000,00	192.796.500	99,90	**Mendukung Pencapaian IKU 7**

NO.	PROG.	KEG.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI KEUANGAN (Rp.)			KET.
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
		c).	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	149.138.500,00	149.138.500,00	148.950.942	99,87	**Mendukung Pencapaian IKU 7**
TOTAL				***23.010.751.256,00***	***23.010.751.256,00***	***22.346.349.107,46***	***97,11***	

Tabel 3.11. Rekapitulasi Realisasi Anggaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan yang menunjang Pencapaian Perjanjian Kinerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah.

NO.	BIDANG/ SEKRETARIAT	PROG.	KEG.	SUB KEG.	PAGU		REALISASI KEU		
					Rp	%	Rp	% TERHADAP PAGU BIDANG/ SEKRETARIAT	% TERHADAP PAGU TOTAL PD
1	SEKRETARIAT	1	7	22	Rp 10.298.517.256,00	44,76%	Rp 9.826.667.053,00	95,42%	42,70%
2	PERUMAHAN	1	2	7	Rp 3.102.819.000,00	13,48%	Rp 3.063.931.738,00	98,75%	13,32%
		1	1						
3	PERMUKIMAN			4	Rp 8.953.915.000,00	38,91%	Rp 8.801.251.674,46	98,30%	38,25%
		1	1						
4	PERTANAHAN	2	2	4	Rp 655.500.000,00	2,85%	Rp 654.498.642,00	99,85%	2,84%
TOTAL		**6**	**13**	**37**	**Rp 23.010.751.256,00**	**100,00%**	**Rp 22.346.349.107,46**		**97,11%**

BAB IV
PENUTUP

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) secara formal merupakan media pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi. Media pertanggungjawaban ini ditujukan kepada pemberi amanah atau pihak yang memberikan delegasi wewenang dan untuk menjawab berbagai permasalahan yang diminta oleh pihak-pihak yang terkait (*Stakeholder*).

Dengan demikian disamping LKIP sebagi media pertanggungjawaban pelaksanaan misi organisasi juga merupakan proses mengevaluasi diri sendiri sehingga akan bermanfaat untuk lebih inovatif dan rasional dalam:

1. Melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mengarahkan kepada pencapaian hasil;
2. Melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mengarahkan kegiatan agar terfokus pada sasaran;
3. Menentukan perubahan-perubahan yang diperlukan guna memperbaiki keadaan;
4. Meningkatkan usaha-usaha agar misi dapat dilaksanakan dengan berhasil;
5. Meningkatkan usaha-usaha untuk mencapai tujuan jangka panjang.

4.1. Kesimpulan

Penilaian hasil akhir capaian indikator kinerja utama (IKU) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 merupakan rangkaian dari akumulasi penilaian yang dilaksanakan secara berkala setiap 3 bulan selama tahun 2022, dengan mengacu pada RENSTRA PD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 dan Penetapan Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim dengan mengukur, mengevaluasi dan menganalisa data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran dinas.

Dari hasil penilaian terhadap 7 (Tujuh) indikator kinerja utama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah untuk mencapai 7 (Tujuh) sasaran strategis, diperoleh kesimpulan secara umum

bahwa capaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah relatif baik dengan perincian sebagai berikut:

- Sasaran S-1 : Meningkatnya cakupan layanan akses perumahan yang layak, aman dan terjangkau, pada tahun 2022 berdasarkan perjanjian kinerja tercapai 100 % dan berdasarkan target Renstra tercapai 60 %.
- Sasaran S-2 : Meningkatnya cakupan layanan program pengembangan perumahan guna pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) di bidang perumahan, pada tahun 2022 berdasarkan perjanjian kinerja tercapai 100 % dan berdasarkan target Renstra tercapai 100 %.
- Sasaran S-3 : Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman, pada tahun 2022 berdasarkan perjanjian kinerja tercapai 200 % dan berdasarkan target Renstra tercapai 200 %.
- Sasaran S-4 : Meningkatnya Kualitas PSU Kawasan Permukiman, pada tahun 2022 berdasarkan perjanjian kinerja tercapai 117,65 % dan berdasarkan target Renstra tercapai 117,65 %.
- Sasaran S-5 : Meningkatnya koordinasi dalam layanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman, pada tahun 2022 berdasarkan perjanjian kinerja tercapai 546,66% dan berdasarkan target Renstra tercapai 546,66%
- Sasaran S-6 : Meningkatnya Data Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, pada tahun 2022 berdasarkan perjanjian kinerja tercapai tercapai 111,75% dan berdasarkan target Renstra tercapai 111,75%
- Sasaran S-7 : Meningkatnya Data Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, pada tahun 2022 berdasarkan perjanjian kinerja tercapai tercapai 98,18% dan berdasarkan target Renstra tercapai 98,18%
- Terdapat 53 Indikator Capaian Kinerja Sasaran Strategis Bidang, Sub Subtansi dan Sub Bagian Tahun 2022 berdasarkan Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah. Dari total keseluruhan indikator capaian kinerja tersebut terdapat 1 indikator yang melebihi target, 1 indikator yang kurang dari target dan 51 indikator terpenuhi sesuai target, dengan rata – rata capaian 103,2 % dari target Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV yang telah ditetapkan.

- Realisasi keuangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar 97,11%.

4.2. Upaya Tindak Lanjut

Secara umum pencapaian kinerja untuk semua sasaran pada tahun 2022 ini sudah terkategori tinggi walau ada yang belum mencapai 100%, hal ini tidak terlepas dari penyebab keberhasilan dan kegagalan. Beberapa hal yang dapat menjadi penyebab kegagalan yaitu :

- Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) baik kualitas maupun kuantiitas dibandingkan beban kerja yang ada pada dinas.
- Belum optimalnya ketersediaan data yang ada pada OPD untuk menunjang proses perencanaan dan pengambilan kebijakan.
- Alokasi anggaran yang ditetapkan terkadang tidak sesuai dengan yang direncanakan sehingga beberapa sasaran tidak dapat dicapai sesuai dengan yang ditargetkan.
- Adanya kebijakan refocusing dan penyesuaian anggaran yang terjadi ,sehingga target yang telah ditetapkan berubah/ berkurang/ dihapus, sehingga tidak mencapai sasaran yang diharapkan.

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, maka upaya tindak lanjut yang akan dilakukan dalam pencapaian target indikator ke depan antara lain :

- Tetap melakukan rapat rutinitas dan pelaporan secara berkala pada Dinas sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya.
- Lebih ketat lagi menerapan manajemen risiko pada Dinas berdasarkan Risk Register yang telah dibuat.
- Melakukan inventarisasi hambatan dan kendala secara berkala.
- Pemanfaatan teknologi dan informasi dalam proses pelaporan, monitoring dan evaluasi kinerja.

Demikian Laporan ini dibuat, diharapkan capaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 ini dapat dijadikan umpan balik dan acuan perencanaan berikutnya, dengan harapan pembangunan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan untuk mewujudkan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur di Provinsi Kalimantan Tengah dapat tercapai.

KEPALA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN

ERLIN HARDI, ST
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 1974 0109 200212 1 002

LAMPIRAN

PENETAPAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ORGANISASI

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Jalan D.I Pandjaitan N0. 05 Palangka Raya 73112
Telepon (0536) 4261952, Website : www. disperkimtan.kalteng..go.id, Email : disperkimtan@kalteng.go.id

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ERLIN HARDI, ST**

Jabatan : Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DANPERTANAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. SUGIANTO SABRAN**

Jabatan : GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik maka perlu untuk menetapkan indikator kinerja utama tahun 2021-2026 sebagaimana terlampir.

Demikian Penetapan Indikator Kinerja Utama ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan kinerja.

Palangka Raya, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
H. SUGIANTO SABRAN

Pihak Pertama,
Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
ERLIN HARDI, S.T.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19740109 200212 1 002

Verifikasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

Unduh

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Jalan D.I Pandjaitan N0. 05 Palangka Raya 73112
Telepon (0536) 4261952, Website : www. disperkimtan.kalteng..go.id, Email : disperkimtan@kalteng.go.id

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Unit : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah

Tugas dan Fungsi : Tugas :

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah.

Fungsi :

1. Perumusan teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pembinaan dan penyusunan perencanaan dan program;
3. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas;
4. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang Perumahan, KawasanPermukiman dan Pertanahan;
5. Pemberian kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan, kawasan permukiman dan Pertanahan;
6. Pendukungan penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
7. Peningkatan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap

memperhatikan

8. Pemberdayaan para pemangku kepentingan bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
9. Pemberdayaan para pemangku kepentingan bidang pertanahan
10. Penunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya; dan
11. Penjaminan terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur,terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan	Sumber Data
1.	Meningkatnya cakupan layanan akses perumahanyang layak, amandan terjangkau.	Jumlah PerbaikanRTLH	Dihitung dari Jumlah Unit Kegiatan Perbaikan yang dilakukanpada tahun rencana penanganan.	Laporan Kegiatan Disperkimta nKalteng
2.	Meningkatnya cakupan layanan program pengembangan perumahan guna pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) di bidang perumahan.	Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni dan Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni.	**I.** Persentase Warga Negara Korban Bencana Provinsi yang Memperoleh Rumah Layak Huni **:** $\frac{A}{B} \times 100\% = \cdots \%$ *A = Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n=.....* *B = Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n = ...* **II.** Persentase Warga Negara YangTerkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni : $\frac{A}{B} \times 100\% = \cdots \%$ *A = Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni.* B = Jumlah Total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi Kriteria Penerima Pelayanan ***Nilai Capaian SPM :*** $\frac{(I+II)}{2} = \cdots \%$	Laporan Kegiatan Disperkimtan Kalteng
3.	Meningkatnya Kualitas KawasanPermukiman.	Jumlah kawasan kumuh yang tertata.	Jumlah Kawasan Kumuh yang ditangani per tahun	SK Kawasan Kumuh Kabupaten/Kota
4.	Meningkatnya Kualitas PSU Kawasan Permukiman.	Persentase terlaksananya peningkatan kualitas Prasarana, Sarana, Utilitas Umum(PSU) pada kawasan permukiman.	jumlah panjang jalan atau drainase yang terbangun ---------- x 100% target panjang jalan /drainase pertahun	Data panjang jalan atau drainase yang terbangun dalam 1 tahun

5.	Meningkatnya koordinasi dalam layanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman.	Jumlah orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan danperencanaan rumah serta PSU yang telah mendapat sertifikasi dan registrasi.	jumlah orang / badan hukum yang mengikuti Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Data orang atau badan hukum yang mengikuti koordinasi dan sinkronisasi dalam 1 tahun
6.	Meningkatnya Data Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.	Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara (%)	= Jumlah kasus yang diselesaikan / Jumlah kasus yang terdaftar x 100%	Disperkimtan Kab/Kota dan Kantor Pertanahan Kab/Kota
7.	Meningkatnya Data Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah.	Persentase Luas Lahan Bersertifikat (%)	= Jumlah Luas Lahan Bersertipikat / Jumlah Luas Lahan x 100%	Kantor Pertanahan Kab/Kota

Palangka Raya, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

H. SUGIANTO SABRAN

Pihak Pertama,
Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
ERLIN HARDI, S.T.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19740109 200212 1 002

Verifikasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

Unduh

PERJANJIAN KINERJA ORGANISASI

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Jalan D.I Pandjaitan N0. 05 Palangka Raya 73112
Telepon (0536) 4261952, Website : www. disperkimtan.kalteng..go.id, Email : disperkimtan@kalteng.go.id

RENCANA AKSI PELAPORAN KINERJA DAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ERLIN HARDI, ST**
Jabatan : Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Berjanji akan membuat Laporan Capaian Kinerja per Triwulan (Laporan Triwulan) sesuai dengan Dokumen Rencana Aksi Pelaporan dan Pengukuran Kinerja ini sebagai pengendalian dan pemantauan progress kemajuan kinerja selama satu tahun. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami bersama.

Palangka Raya, 17 Januari 2022
Pihak Pertama,
Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

ERLIN HARDI, S.T.
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19740109 200212 1 002

Verifikasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

Unduh

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Jalan D.I Pandjaitan N0. 05 Palangka Raya 73112
Telepon (0536) 4261952, Website : www. disperkimtan.kalteng..go.id, Email : disperkimtan@kalteng.go.id

A. Target Realisasi Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Target Realisasi Kinerja				Ket
					TW I	TW II	TW III	TW IV	
1.	Meningkatnya cakupan layanan akses perumahan yang layak, aman dan terjangkau.	Jumlah Perbaikan RTLH.	Unit	54	0	0	0	54	
2.	Meningkatnya cakupan layanan program pengembangan perumahan guna pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) di bidang perumahan.	Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni dan Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni.	%	100	100	100	100	100	
3.	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman.	Jumlah kawasan kumuh yang tertata.	Kawasan	1	0	0	1	1	
4.	Meningkatnya Kualitas PSU Kawasan Permukiman.	Persentase terlaksananya peningkatan kualitas Prasarana, Sarana, Utilitas Umum(PSU) pada kawasan permukiman.	%	85	5	30	50	85	
5.	Meningkatnya koordinasi dalam layanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman.	Jumlah orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta PSU yang telah mendapat sertifikasi dan registrasi.	Orang	60	60	60	60	60	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Target Realisasi Kinerja				Ket
					TW I	TW II	TW III	TW IV	
6.	Meningkatnya Data Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.	Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara (%).	%	40	40	40	40	44,7	
7.	Meningkatnya Data Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah.	Persentase Luas Lahan Bersertifikat (%).	%	1.10	1.08	1.08	1.08	1.10	

B. Target Realisasi Keuangan

No.	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Target Realisasi Keuangan (Rp.)				Ket
				TW I	TW II	TW III	TW IV	
1.	Program Pengembangan Perumahan							
	1.	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	182.000.000	36.400.000	91.000.000	154.700.000	182.000.000	
2.	Program Kawasan Permukiman							
	1.	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai degan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	796.319.000	159.263.800	398.159.500	676.871.150	796.319.000	
	2.	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	4.342.364.000	868.472.800	2.171.182.000	3.691.009.400	4.342.364.000	

No.	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Target Realisasi Keuangan (Rp.)				Ket
				TW I	TW II	TW III	TW IV	
3.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Ultilitas Umum (PSU)							
	1.	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	6.736.051.000	1.347.210.200	3.368.025.500	5.725.643.350	6.736.051.000	
4	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman							
	1.	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	0	0	0	0	0	
5.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan							
	1.	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	158.297.500	31.659.500	79.148.750	134.552.875	158.297.500	
6.	Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kebihan Maksimum dan Tanah Absentee							
	1.	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	497.202.500	99.440.500	248.601.250	422.622.125	497.202.500	

Palangka Raya, 17 Januari 2022
Plt.KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

ERLIN HARDI, S.T.
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19740109 200212 1 002

Verifikasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

Unduh

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Jalan D.I Pandjaitan N0. 05 Palangka Raya 73112
Telepon (0536) 4261952, Website : www. disperkimtan.kalteng..go.id, Email : disperkimtan@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ERLIN HARDI, ST**
Jabatan : Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DANPERTANAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. SUGIANTO SABRAN**
Jabatan : GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya,17 Januari 2022

Pihak Kedua, GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,	Pihak Pertama, Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,
Telah ditandatangani secara elektronik oleh : **H. SUGIANTO SABRAN**	Telah ditandatangani secara elektronik oleh : **ERLIN HARDI, S.T.** Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19740109 200212 1 002

Verifikasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

Unduh

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Jalan D.I Pandjaitan N0. 05 Palangka Raya 73112
Telepon (0536) 4261952, Website : www. disperkimtan.kalteng..go.id, Email : disperkimtan@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Meningkatnya cakupan layanan akses perumahan yang layak, aman dan terjangkau.	Jumlah Perbaikan RTLH.	Unit	54
2.	Meningkatnya cakupan layanan program pengembangan perumahan guna pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) di bidang perumahan.	Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni dan Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni.	%	100
3.	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman.	Jumlah kawasan kumuh yang tertata.	Kawasan	1
4.	Meningkatnya Kualitas PSU Kawasan Permukiman.	Persentase terlaksananya peningkatan kualitas Prasarana, Sarana, Utilitas Umum(PSU) pada kawasan permukiman.	%	85
5.	Meningkatnya koordinasi dalam layanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman.	Jumlah orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta PSU yang telah mendapat sertifikasi dan registrasi.	Orang	60
6.	Meningkatnya Data Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.	Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara (%)	%	40
7.	Meningkatnya Data Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah.	Persentase Luas Lahan Bersertifikat (%)	%	1.10

	Program		Anggaran	Keterangan
1.	Pengembangan Perumahan	Rp.	200.000.000,00	
2.	Kawasan Permukiman	Rp.	5.330.683.000,00	
3.	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp.	6.624.991.000,00	
4.	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp.	158.297.500,00	
5.	Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Rp.	397.202.500,00	

Palangka Raya, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

H. SUGIANTO SABRAN

Pihak Pertama,
Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
ERLIN HARDI, S.T.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19740109 200212 1 002

Verifikasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

Unduh

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Jalan D.I Pandjaitan N0. 05 Palangka Raya 73112
Telepon (0536) 4261952, Website : www. disperkimtan.kalteng..go.id, Email : disperkimtan@kalteng.go.id

RENCANA KINERJA TAHUN 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Meningkatnya cakupan layanan akses perumahan yang layak, aman dan terjangkau.	Jumlah Perbaikan RTLH.	Unit	85
2.	Meningkatnya cakupan layanan program pengembangan perumahan guna pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) di bidang perumahan.	Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni dan Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni.	%	100
3.	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman.	Jumlah kawasan kumuh yang tertata.	Kawasan	1
4.	Meningkatnya Kualitas PSU Kawasan Permukiman.	Persentase terlaksananya peningkatan kualitas Prasarana, Sarana, Utilitas Umum(PSU) pada kawasan permukiman.	%	88
5.	Meningkatnya koordinasi dalam layanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman.	Jumlah orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta PSU yang telah mendapat sertifikasi dan registrasi.	Orang	60
6.	Meningkatnya Data Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.	Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara (%).	%	50
7.	Meningkatnya Data Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah.	Persentase Luas Lahan Bersertifikat (%).	%	1.12

Palangka Raya, 16 Januari 2022
KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

ERLIN HARDI, S.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19740109 200212 1 002

Verifikasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

Unduh

PERJANJIAN KINERJA
ESELON III DAN IV

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Jalan D.I. Panjaitan No. 5 Palangka Raya Telp. (0536) 4261952, Email : disperkimtan@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ERLIN HARDI, ST**

Jabatan : Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ERLIN HARDI, ST**

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2022

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
ERLIN HARDI, ST	ERLIN HARDI, ST
NIP. 19740109 200212 1 002	NIP. 19740109 200212 1 002

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Jalan D.I. Panjaitan No. 5 Palangka Raya Telp. (0536) 4261952, Email : disperkimtan@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA BIDANG PERUMAHAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Tersedianya data Rumah di Lokasi Rawan Bencana atau Relokasi Program Provinsi.	Jumlah Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Kegiatan	1
2.	Tertatanya Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Kegiatan	4
3.	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Kegiatan	2

No.	Kegiatan	Anggaran		Keterangan
1.	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehablitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Rp.	200.000.000,00	-
2.	Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Rp.	1.037.819.000,00	-
3.	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Rp.	2.075.000.000,00	-

Palangka Raya, Januari 2022

Pihak Kedua	Pihak Pertama
ERLIN HARDI, ST	ERLIN HARDI, ST
NIP. 19740109 200212 1 002	NIP. 19740109 200212 1 002

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Jalan D.I. Panjaitan No. 5 Telp. 0536 – 4261952 Palangka Raya

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : WAWAN GUNAWAN, ST., M.Eng

Jabatan : Sub Koordinator PerencanaanTeknis

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ERLIN HARDI, ST

Jabatan : Kepala Bidang Perumahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2022

Pihak Kedua,	Pihak Pertama
ERLIN HARDI, ST	WAWAN GUNAWAN, ST., M.Eng
NIP. 19740109 200212 1 002	NIP. 19710113 200901 1 001

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Jalan D.I. Panjaitan No. 5 Telp. 0536 – 4261952 Palangka Raya

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

SUB KOORDINATOR PERENCANAAN TEKNIS

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen	1
2.	Tersusun /Tereview /Terlegalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun /Tereview /Terlegalisasi	Dokumen	1
3.	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	1
4.	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/ Peremajaan/ Permukiman dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/ Peremajaan/ Permukiman dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (Lima Belas) Ha	Dokumen	1

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Rp. 200.000.000,-	
2.	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Rp. 584.058.000,-	
3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp. 258.169.000,-	
4.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran /Peremajaan /Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (Lima Belas) Ha	Rp. 70.000.000,-	

Palangka Raya, Januari 2022

Pihak Kedua,

ERLIN HARDI, ST
NIP. 19740109 200212 1 002

Pihak Pertama

WAWAN GUNAWAN, ST., M.Eng
NIP. 19710113 200901 1 001

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PERUMAHAN,KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Jalan D.I. Panjaitan No. 5 Palangka Raya Telp. (0536) 4261952, Email : disperkimtan@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD FAHMY, SE

Jabatan : Sub Koordinator Perumahan Swadaya dan Perumahan Formal pada Bidang Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ERLIN HARDI, ST

Jabatan : Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2022

Pihak Kedua,

ERLIN HARDI, ST
NIP. 19740109 200212 1 002

Pihak Pertama,

MUHAMMAD FAHMY, SE
NIP. 19710113 200901 1 001

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PERUMAHAN,KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Jalan D.I. Panjaitan No. 5 Palangka Raya Telp. (0536) 4261952, Email : disperkimtan@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

SUB KOORDINATOR PERUMAHAN SWADAYA DAN PERUMAHAN FORMAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Berkurangnya Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Kalimantan Tengah	Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	Unit	54
2.	Terlaksananya Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Laporan	1

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Rp. 2.005.000.000,00	-
2.	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Rp. 125.592.000,00	-

Palangka Raya, Januari 2022

Pihak Kedua,

ERLIN HARDI, ST
NIP. 19740109 200212 1 002

Pihak Pertama,

MUHAMMAD FAHMY, SE
NIP. 19710113 200901 1 001

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Jalan D.I. Panjaitan No. 5 Palangka Raya

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ……...

Jabatan : Sub Koordinator Pembiayaan dan Pengembangan Kawasan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ERLIN HARDI, ST

Jabatan : Kepala Bidang Perumahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2022

Pihak Pertama

……

NIP. ……

Pihak Kedua,

ERLIN HARDI, ST

NIP. 19740109 200212 1 002

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Jalan D.I. Panjaitan No. 5 Palangka Raya

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

SUB KOORDINATOR PEMBIAYAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh .	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	1

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Rp.70.000.000,00	

Palangka Raya, Januari 2022

Pihak Pertama

……

NIP. ……

Pihak Kedua,

ERLIN HARDI, ST

NIP. 19740109 200212 1 002

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Jalan D.I. Panjaitan No. 5 Palangka Raya Telp. (0536) 4261952, Email : disperkimtan@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AKHMAD SUWANDI, ST, MT**
Jabatan : Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ERLIN HARDI, ST**
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2022

Pihak Kedua,

ERLIN HARDI, ST
NIP. 19740109 200212 1 002

Pihak Pertama,

AKHMAD SUWANDI, ST, MT
NIP. 19691126 199703 1 004

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Jalan D.I. Panjaitan No. 5 Palangka Raya Telp. (0536) 4261952, Email : disperkimtan@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Terlaksananya Urusan Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman	Jumlah Kegiatan Urusan Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman	Kegiatan	3
2.	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Kegiatan	1

No.	Kegiatan	Anggaran		Keterangan
1.	Urusan Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman	Rp. 6.624.991.000,00	-	
2.	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Rp. 2.217.864.000,00	-	

Palangka Raya, Januari 2022

Pihak Kedua,

ERLIN HARDI, ST
NIP. 19740109 200212 1 002

Pihak Pertama

AKHMAD SUWANDI, ST, MT
NIP. 19691126 199703 1 004

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERUMAHAN,KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN
Jalan D.I Pandjaitan N0. 05 Palangka Raya

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. MUHAMMAD YANI**
Jabatan : Sub Koordinator Pendataan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **AKHMAD SUWANDI, ST, MT**
Jabatan : Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah di tetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Palangka Raya, Januari 2022

Pihak Kedua	Pihak Pertama
AKHMAD SUWANDI, ST, MT	**Ir. MUHAMMAD YANI**
NIP. 19691126 199703 1 004	NIP. 1965 003 199803 1 001

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERUMAHAN,KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Jalan D.I Pandjaitan N0. 05 Palangka Raya

PERJANJIAN KINERJA TANUN 2022

SUB KOORDINATOR PENDATAAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun di Bidang Kawasan Permukiman.	Dokumen	1
2.	Terlaksananya Koordinasi dan Singkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Koordinasi dan Singkronisasi Bidang Kawasan Permukiman	Laporan	1

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Rp. 575.870.500,-	-
2.	Koordinasi dan Singkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Rp. 144.174.500,-	-

Palangka Raya, Januari 2022

Pihak Kedua

AKHMAD SUWANDI, ST, MT
NIP. 19691126 199703 1 004

Pihak Pertama

Ir. MUHAMMAD YANI
NIP. 1965 003 199803 1 001

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERUMAHAN,KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Jalan D.I Pandjaitan N0. 05 Palangka Raya

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ERI CASRITO, ST, SH**
Jabatan : Sub Koordinator Preservasi Manfaat dan Pengendalian pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **AKHMAD SUWANDI, ST, MT**
Jabatan : Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah di tetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Palangka Raya, Januari 2022

Pihak Kedua	Pihak Pertama
AKHMAD SUWANDI, ST, MT	**ERI CASRITO, ST, SH**
NIP. 19691126 199703 1 004	NIP. 19641228 198803 1 006

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERUMAHAN,KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Jalan D.I Pandjaitan N0. 05 Palangka Raya

PERJANJIAN KINERJA TANUN 2022

SUB KOORDINATOR PRESERVASI MANFAAT DAN PENGENDALIAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman yang Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disedikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	Lokasi	10

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Rp. 5.904.946.000,-	-

Palangka Raya, Januari 2022

Pihak Kedua

AKHMAD SUWANDI, ST, MT
NIP. 19691126 199703 1 004

Pihak Pertama

ERI CASRITO, ST, SH
NIP. 19641228 198803 1 006

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERUMAHAN,KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Jalan D.I Pandjaitan N0. 05 Palangka Raya

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ……..
Jabatan : Sub Koordinator Pencegahan dan Peningkatan Kualitas pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **AKHMAD SUWANDI, ST, MT**
Jabatan : Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah di tetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Palangka Raya, Januari 2022

Pihak Kedua	Pihak Pertama
AKHMAD SUWANDI, ST, MT	……
NIP. 19691126 199703 1 004	NIP. ……

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERUMAHAN,KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Jalan D.I Pandjaitan N0. 05 Palangka Raya

PERJANJIAN KINERJA TANUN 2022

SUB KOORDINATOR PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Terlaksananya Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/Dipugar	Kawasan	2

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Rp. 2.217.864.000,-	-

Palangka Raya, Januari 2022

Pihak Kedua

AKHMAD SUWANDI, ST, MT
NIP. 19691126 199703 1 004

Pihak Pertama

……
NIP. ……

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERUMAHAN,KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Jalan D.I Pandjaitan N0. 05 Palangka Raya

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....
Jabatan : Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ERLIN HARDI, S.T.**
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah di tetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Palangka Raya, Januari 2022

Pihak Kedua,	Pihak Pertama
ERLIN HARDI, ST	.....
NIP. 19740109 200212 1 002	NIP. .....

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERUMAHAN,KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Jalan D.I Pandjaitan N0. 05 Palangka Raya

PERJANJIAN KINERJA TANUN 2022

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Terselenggaranya Kegiatan yang mendukung Penyelesaian sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan yang mendukung Penyelesaian sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kegiatan	1
2.	Terselenggaranya Kegiatan yang mendukung Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan yang mendukung Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kegiatan	3

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Derah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp. 158.297.500,-	-
2.	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp. 397.202.500,-	-

Palangka Raya, Januari 2022
Pihak Pertama

Pihak Kedua,

ERLIN HARDI, ST
NIP. 19740109 200212 1 002

.....
NIP. .....

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERUMAHAN,KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN
Jalan D.I Pandjaitan N0. 05 Palangka Raya

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ……..
Jabatan : Sub Koordinator Manfaat dan Pengendalian pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ……..
Jabatan : Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah di tetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Palangka Raya, Januari 2022

Pihak Kedua	Pihak Pertama
……	……
NIP. ……	NIP. ……

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERUMAHAN,KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Jalan D.I Pandjaitan N0. 05 Palangka Raya

PERJANJIAN KINERJA TANUN 2022

SUB KOORDINATOR MANFAAT DAN PENGENDALIAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Terinventarisasinya Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah Data Sengketa, Konflik, dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen	1
2.	Terinventarisasinya Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Dokumen	1

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp. 158.297.500,-	-
2.	Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Rp. 112.570.000,-	-

Palangka Raya, Januari 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama

.....
NIP. .....

.....
NIP. .....

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERUMAHAN,KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Jalan D.I Pandjaitan N0. 05 Palangka Raya

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ……..
Jabatan : Sub Koordinator Perencanaan dan Pendataan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ……..
Jabatan : Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah di tetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Palangka Raya, Januari 2022

Pihak Kedua	Pihak Pertama
……	……
NIP. ……	NIP. ……

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERUMAHAN,KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Jalan D.I Pandjaitan N0. 05 Palangka Raya

PERJANJIAN KINERJA TANUN 2022

SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN PENDATAAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Terlaksananya Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1
2.	Terlaksananya Koordinasi, Singkronisasi, Fasilitasi dan Kerja Sama Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria dalam (satu) Provinsi	Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan AKses dalam rangka Reforma Agraria	Berita Acara	1

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Koordinasi dan Singkronisasi Penataan Akses Dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 149.138.500,-	-
2.	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 135.292.000,-	-

Palangka Raya, Januari 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama

.....

NIP. .....

.....

NIP. .....

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Jalan D.I. Panjaitan No. 5 Palangka Raya Telp. (0536) 4261952, Email : disperkimtan@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ERIDANI, ST., MT**

Jabatan : Sekretaris pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ERLIN HARDI, ST**

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah di tetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2022

Pihak Kedua	Pihak Pertama
ERLIN HARDI, ST	**ERIDANI, ST., MT**
NIP. 19740109 200212 1 002	NIP. 19780101 200312 2 014

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Jalan D.I. Panjaitan No. 5 Palangka Raya Telp. (0536) 4261952, Email : disperkimtan@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Tersedianya dukungan layanan administrasi perkantoran	Terlaksananya layanan administrasi perkantoran	Tahun	1
2.	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Terlaksananya kegiatan peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Tahun	1
3.	Pembinaan terhadap peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya kedisiplinan aparatur	Tahun	1
4.	Terlaksananya layanan sistem perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Dokumen	14
5.	Terlaksananya pengelolaan aset/barang daerah	Jumlah dokumen pengelolaan aset/barang daerah	Dokumen	1

	Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	135.000.000,00	-
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	5.068.307.227,00	-
3.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp.	116.000.000,00	-
4.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	39.109.000,00	
5.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	530.354.000,00	-
6.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	4.332.000.000,00	-
7.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	743.792.773,00	-

Palangka Raya, Januari 2022

Pihak Kedua

ERLIN HARDI, ST
NIP. 19740109 200212 1 002

Pihak Pertama

ERIDANI, ST., MT
NIP. 19780101 200312 2 014

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Jalan D.I. Panjaitan No. 5 Palangka Raya Telp. (0536) 4261952, Email : disperkimtan@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DWI RESMIATI, ST**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Penyusunan Program pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ERIDANI, ST., MT**

Jabatan : Sekretaris pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah di tetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Palangka Raya, Januari 2022

Pihak Kedua	Pihak Pertama
ERIDANI, ST., MT	**DWI RESMIATI, ST**
NIP. 19780101 200312 2 014	NIP. 19761221 200501 2 008

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Jalan D.I. Panjaitan No. 5 Palangka Raya Telp. (0536) 4261952, Email : disperkimtan@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya LKIP 2021	Dokumen	1
		Tersusunnya konsep naskah LPPD dan LKPJ 2021	Dokumen	2
		Tersusunnya Laporan TEPRA, Laporan Rakordal, Laporan RUP dan Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah	Dokumen	4
2.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SOPD (Renja 2023, Renja Perubahan 2022, PPAS 2023, PPAS Perubahan 2022, RKA 2023 dan RKA Perubahan Tahun 2022	Tersusunnya Renja 2023	Dokumen	1
		Tersusunnya Renja Perubahan 2022	Dokumen	1
		Tersusunnya PPAS 2023	Dokumen	1
		Tersusunnya PPAS Perubahan 2022	Dokumen	1
		Tersusunnya RKA 2023	Dokumen	1
		Tersusunnya RKA Perubahan Tahun 2022	Dokumen	1

Sub Kegiatan		Anggaran		Keterangan
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.	80.000.000,00	-
2.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp.	20.000.000,00	-
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.	35.000.000,00	-

Palangka Raya, Januari 2022

Pihak Kedua

ERIDANI, ST., MT
NIP. 19780101 200312 2 014

Pihak Pertama

DWI RESMIATI, ST
NIP. 19761221 200501 2 008

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Jalan D.I. Panjaitan nomor 5 Palangka Raya
Telepon (0536) 4261952, Website : www.disperkimtan.kalteng.go.id
Email : disperkimtan@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **EDY YUSUF, SE**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ERIDANI, ST., MT**
Jabatan : Sekretaris pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah di tetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Palangka Raya, Januari 2022

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
ERIDANI, ST., MT	**EDY YUSUF, SE**
NIP. 19780101 200312 2 014	NIP. 19670621 199803 1 005

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Jalan D.I. Panjaitan nomor 5 Palangka Raya
Telepon (0536) 4261952, Website : www.disperkimtan.kalteng.go.id
Email : disperkimtan@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN KEPEGAWAIAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Tahun	1
		Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Dokumen	1
2.	Terlayaninya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya koordinasi dan penilaian barang milik daerah	Persen	100
		Terlaksananya rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Dokumen	1
3.	Terlayaninya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tahun	1
		Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tahun	1
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tahun	1
4.	Terlayaninya administrasi umum perangkat daerah	Tersedianya komponen instalasi dan alat listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis	5
		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	9
		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Lembar	300.000
		Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Ekslempar	21.900
		Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dokumen	4
5.	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Tersedianya jasa surat menyurat	Surat	500
		Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tahun	1
		Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Dokumen	1
6.	Tersedianya Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan	Unit	17
		Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Unit	17
		Terlaksananya pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Unit	1
		Terlaksananya pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit	70

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Jalan D.I. Panjaitan nomor 5 Palangka Raya
Telepon (0536) 4261952, Website : www.disperkimtan.kalteng.go.id
Email : disperkimtan@kalteng.go.id

	Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1.	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Rp.	5.047.307.227,00	-
2.	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Rp.	21.000.000,00	-
3.	Koordinasi dan penilaian barang milik daerah	Rp.	100.000.000,00	-
4.	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Rp.	16.000.000,00	-
5.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp.	10.000.000,00	-
6.	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp.	9.000.000,00	-
7.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp.	20.109.000,00	-
8.	Penyediaan komponen instalasi dan alat listrik/penerangan bangunan kantor	Rp.	48.000.000,00	-
9.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp.	519.463.000,00	-
10.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp.	53.891.000,00	-
11.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp.	50.000.000,00	-
12.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp.	367.000.000,00	-
13.	Penyediaan jasa surat menyurat	Rp.	7.000.000,00	-
14.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp.	625.000.000,00	-
15.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Rp.	3.700.000.000,00	-

16. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan	Rp.	254.100.000,00	-
17. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Rp.	199.000.000,00	-
18. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Rp.	198.000.000,00	-
19. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Rp.	92.692.773,00	-

Palangka Raya, Januari 2022

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
ERIDANI, ST., MT	**EDY YUSUF, SE**
NIP. 19780101 200312 2 014	NIP. 19670621 199803 1 005

EVALUASI MANDIRI REALISASI KINERJA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERUMAHAN,KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Jalan D.I Pandjaitan N0. 05 Palangka Raya

Formulir Evaluasi Mandiri Eselon III
Tahun Anggaran 2022
KEPALA BIDANG PERTANAHAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terselenggaranya Kegiatan yang mendukung Penyelesaian sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan yang mendukung Penyelesaian sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kegiatan	1	1	100 %
2.	Terselenggaranya Kegiatan yang mendukung Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan yang mendukung Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kegiatan	3	3	100 %

Palangka Raya, Januari 2023
Pihak Pertama

NURLIANI,SE
NIP.19650324 199103 2 003

Pihak Kedua,

ERLIN HARDI, ST
NIP. 19740109 200212 1 002

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERUMAHAN,KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Jalan D.I Pandjaitan N0. 05 Palangka Raya

Formulir Evaluasi Mandiri Eselon IV
Tahun Anggaran 2022
SUB SUBTANSI MANFAAT DAN PENGENDALIAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terinventarisasinya Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah Data Sengketa, Konflik, dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen	1	1	100%
2.	Terinventarisasinya Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Dokumen	1	1	100%

Palangka Raya, Januari 2023

Pihak Kedua

NURLIANI,SE
NIP.19650324 199103 2 003

Pihak Pertama

……
NIP. ……

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERUMAHAN,KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Jalan D.I Pandjaitan N0. 05 Palangka Raya

Formulir Evaluasi Mandiri Eselon IV
Tahun Anggaran 2022
SUB SUBTANSI PERENCANAAN DAN PENDATAAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terlaksananya Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100 %
2.	Terlaksananya Koordinasi, Singkronisasi, Fasilitasi dan Kerja Sama Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria dalam (satu) Provinsi	Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan AKses dalam rangka Reforma Agraria	Berita Acara	1	1	100 %

Palangka Raya, Januari 2022

Pihak Kedua

NURLIANI,SE
NIP.19650324 199103 2 003

Pihak Pertama

……
NIP. ……

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERUMAHAN,KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Jalan D.I Pandjaitan N0. 05 Palangka Raya

Formulir Evaluasi Mandiri Eselon IV
Tahun Anggaran 2022
SUB SUBTANSI PERENCANAAN DAN PENDATAAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terlaksananya Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100 %
2.	Terlaksananya Koordinasi, Singkronisasi, Fasilitasi dan Kerja Sama Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria dalam (satu) Provinsi	Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan AKses dalam rangka Reforma Agraria	Berita Acara	1	1	100 %

Palangka Raya, Januari 2022

Pihak Kedua

NURLIANI,SE
NIP.19650324 199103 2 003

Pihak Pertama

……
NIP. ……

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Jalan D.I. Panjaitan No. 5 Palangka Raya Telp. (0536) 4261952, Email : disperkimtan@kalteng.go.id

Formulir Evaluasi Mandiri Eselon III
Tahun Anggaran 2022
KEPALA BIDANG PERUMAHAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tersedianya data Rumah di Lokasi Rawan Bencana atau Relokasi Program Provinsi.	Jumlah Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Kegiatan	1	1	100%
2.	Tertatanya Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Kegiatan	4	4	100%
3.	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Kegiatan	2	2	100%

Palangka Raya, Januari 2023

Pihak Kedua

ERLIN HARDI, ST
NIP. 19740109 200212 1 002

Pihak Pertama

ERIDANI,ST.MT
NIP. 19780101 200312 2 014

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Jalan D.I. Panjaitan No. 5 Telp. 0536 – 4261952 Palangka Raya

Formulir Evaluasi Mandiri Eselon IV
Tahun Anggaran 2022
SUB SUBTANSI PERENCANAAN TEKNIS

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Terkena Relokasi Program Provinsi	Dok	1	1	100%
2.	Tersusun /Tereview /Terlegalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun /Tereview /Terlegalisasi	Dok	1	1	100%
3.	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dok	1	1	100%
4.	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/ Peremajaan/ Permukiman dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/ Peremajaan/ Permukiman dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (Lima Belas) Ha	Dok	1	1	100%

Palangka Raya, Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama

ERIDANI,ST.MT
NIP. 19780101 200312 2 014

……
NIP. ……

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PERUMAHAN,KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Jalan D.I. Panjaitan No. 5 Palangka Raya Telp. (0536) 4261952, Email : disperkimtan@kalteng.go.id

Formulir Evaluasi Mandiri Eselon IV
Tahun Anggaran 2022
SUB SUBTANSI PERUMAHAN SWADAYA DAN PERUMAHAN FORMAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Berkurangnya Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Kalimantan Tengah	Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	Unit	54	54	100%
2.	Terlaksananya Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Laporan	1	1	100%

Palangka Raya, Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

ERIDANI,ST.MT
NIP. 19780101 200312 2 014

……
NIP. ……

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Jalan D.I. Panjaitan No. 5 Palangka Raya

Formulir Evaluasi Mandiri Eselon IV
Tahun Anggaran 2022
SUB SUBTANSI PEMBIAYAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh .	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	1	1	100%

Palangka Raya, Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama

ERIDANI,ST.MT
NIP. 19780101 200312 2 014

…….
NIP. ……

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Jalan D.I. Panjaitan No. 5 Palangka Raya Telp. (0536) 4261952, Email : disperkimtan@kalteng.go.id

Formulir Evaluasi Mandiri Eselon III
Tahun Anggaran 2022
KEPALA BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terlaksananya Urusan Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman	Jumlah Kegiatan Urusan Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman	Kegiatan	3	3	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Kegiatan	1	1	100%

Palangka Raya, Januari 2023

Pihak Kedua,

ERLIN HARDI, ST
NIP. 19740109 200212 1 002

Pihak Pertama

AKHMAD ELFIANSYAH,SST.,MT.
NIP. 19661201 198811 1 002

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERUMAHAN,KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Jalan D.I Pandjaitan N0. 05 Palangka Raya

Formulir Evaluasi Mandiri Eselon IV
Tahun Anggaran 2022
SUB SUBTANSI PENDATAAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun di Bidang Kawasan Permukiman.	Dokumen	1	1	100%
2.	Terlaksananya Koordinasi dan Singkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Koordinasi dan Singkronisasi Bidang Kawasan Permukiman	Laporan	1	1	100%

Palangka Raya, Januari 2023

Pihak Kedua

AKHMAD ELFIANSYAH,SST.,MT.
NIP. 19661201 198811 1 002

Pihak Pertama

……
NIP. ……

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERUMAHAN,KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Jalan D.I Pandjaitan N0. 05 Palangka Raya

Formulir Evaluasi Mandiri Eselon IV
Tahun Anggaran 2022
SUB SUBTANSI PRESERVASI MANFAAT DAN PENGENDALIAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman yang Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disedikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	Lokasi	10	8	80 %

Palangka Raya, Januari 2023

Pihak Kedua

AKHMAD ELFIANSYAH,SST.,MT.
NIP. 19661201 198811 1 002

Pihak Pertama

.....
NIP. ……

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERUMAHAN,KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Jalan D.I Pandjaitan N0. 05 Palangka Raya

Formulir Evaluasi Mandiri Eselon IV
Tahun Anggaran 2022
SUB SUBTANSI PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terlaksananya Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan /Dipugar	Kawasan	2	2	100%

Palangka Raya, Januari 2023

Pihak Kedua

AKHMAD ELFIANSYAH,SST.,MT.
NIP. 19661201 198811 1 002

Pihak Pertama

.....
NIP. ……

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Jalan D.I. Panjaitan No. 5 Palangka Raya Telp. (0536) 4261952, Email : disperkimtan@kalteng.go.id

Formulir Evaluasi Mandiri Eselon III
Tahun Anggaran 2022
SEKRETARIS DINAS

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tersedianya dukungan layanan administrasi perkantoran	Terlaksananya layanan administrasi perkantoran	Tahun	3	3	100%
2.	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Terlaksananya kegiatan peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Tahun	1	1	100%
3.	Pembinaan terhadap peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya kedisiplinan aparatur	Tahun	1	1	100%
4.	Terlaksananya layanan sistem perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnyang dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Dok	14	14	100%
5.	Terlaksananya pengelolaan aset/ barang daerah	Jumlah Dokumen pengelolaan aset/ barang daerah	Dok	1	1	100%

Palangka Raya, Januari 2023

Pihak Kedua,

ERLIN HARDI, ST
NIP. 19740109 200212 1 002

Pihak Pertama

FLEDERICK,S.Pi.,M.Si
NIP. 19791101 201001 1 008

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERUMAHAN,KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Jalan D.I Pandjaitan N0. 05 Palangka Raya

Formulir Evaluasi Mandiri Eselon IV
Tahun Anggaran 2022
KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tersusunnya dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya LKIP 2021	Dokumen	1	1	100 %
		Tersusunnya konsep naskah LPPD dan LKPJ 2021	Dokumen	2	2	100 %
		Tersusunnya Laporan TEPRA, SIPD Kemendagri, SIMP3D dan Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	100 %
2.	Tersusunnya dokumen Perencanaan dan Penganggaran SOPD (Renja 2022, Renja Perubahan 2021, PPAS 2022, PPAS Perubahan 2021, RKA 2022 dan RKA Perubahan Tahun 2021	Tersusunnya Renja 2023	Dokumen	1	1	100 %
		Tersusunnya Renja Perubahan 2022	Dokumen	1	1	100 %
		Tersusunnya PPAS 2022	Dokumen	1	1	100 %
		Tersusunnya PPAS Perubahan 2022	Dokumen	1	1	100 %
		Tersusunnya RKA 2023	Dokumen	1	1	100 %
		Tersusunnya RKA Perubahan Tahun 2022	Dokumen	1	1	100 %

Palangka Raya, Januari 2023

Pihak Kedua

FLEDERICK,S.Pi.,M.Si
NIP. 19791101 201001 1 008

Pihak Pertama

DWI RESMIATI,S.T.,M.A.P.
NIP.19761221 200501 2 008

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERUMAHAN,KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Jalan D.I Pandjaitan N0. 05 Palangka Raya

Formulir Evaluasi Mandiri Eselon IV
Tahun Anggaran 2022
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN KEPEGAWAIAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Tahun	1	1	100 %
		Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan /triwulan/ semesteran SKPD	Dok	1	1	100 %
2.	Terlayaninya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah	%	100	100	100 %
		Terlaksananya rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Dok	1	1	100 %
3.	Terlayaninya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pendataan dan Pengelolaan administrasi kepegawaian	Tahun	1	1	100 %
		Terlaksananya monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Tahun	1	1	100 %
		Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	Tahun	1	1	100 %
4.	Terlayaninya administrasi umum perangkat daerah	Tersedianya komponen instalasi dan alat listrik/ penerangan bangunan kantor	Jenis	5	5	100 %
		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	9	9	100 %
		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Lbr	300.000	300.000	100 %

		Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	Eks	21.900	21.900	100 %
		Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dok	4	4	100 %
5.	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya jasa surat menyurat	Surat	500	648	129,6 %
		Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tahun	1	1	100 %
		Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Dok	1	1	100 %
6.	Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya jasa pemeilharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan	Unit	17	17	100 %
		Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Unit	17	17	100 %

Palangka Raya, Januari 2023

Pihak Kedua

FLEDERICK,S.Pi.,M.Si
NIP. 19791101 201001 1 008

Pihak Pertama

MUGIHARJO,S.Hut.
NIP.19730606 199302 1 002

LAPORAN TRIWULAN

LAPORAN TRIWULAN I
TAHUN 2022

KINERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
JL. D.I Panjaitan No.5 Telp. 0536-4261952 Palangka Raya

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-NYA penyusunan **"LAPORAN TRIWULAN I ATAS KINERJA PERANGKAT DAERAH"** ini dapat diselesaikan. Penyusunan laporan ini secara umum merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan strategi pembangunan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah yang mengarah pada prinsip-prinsip *good governance* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Laporan Triwulan I Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja yang telah dicapai serta pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan yang telah dilaksanakan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya dapat memberikan manfaat dan gambaran tentang hasil pembangunan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang telah dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Triwulan I tahun 2022.

Palangka Raya, April 2022

KEPALA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN

ERLIN HARDI, S.T.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19740109 200212 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ..... **i**

Daftar Isi ..... **ii**

BAB I KINERJA **1**

BAB II PERMASALAHAN DAN DAN TINDAK LANJUT **3**

2.1. Permasalahan 3

2.2. Tindak lanjut 3

BAB III PENUTUP **4**

LAMPIRAN

BAB I

KINERJA

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021 terdiri dari 6 program, 13 kegiatan dan 37 sub kegiatan dengan pagu Belanja Langsung sebesar Rp. **24,183,737,000,** didistribusikan pengelolaannya ke 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang teknis dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekretariat

Mengelola 1 (Satu) program, 7 (Tujuh) Kegiatan dan 22 (Dua Puluh Dua) sub kegiatan dengan pagu Rp.11.472.563.000 atau 47,44 persen dari total pagu. Adapun capaian kinerja keuangan sampai dengan akhir triwulan I tahun 2022 untuk sekretariat sebesar Rp.1.619.125.050 atau 14.11% dari total pagu yang dikelola, dan 6.70 % terhadap seluruh belanja langsung SKPD. Capaian ini lebih besar dari capaian pada triwulan yang sama pada tahun 2021 sebesar Rp.908.478.410 atau 7.93 % dari total pagu yang dikelola, dan 2.24 % terhadap seluruh belanja langsung SKPD.

2. Bidang Perumahan

Mengelola 1 (Satu) program mandiri dan 1 (Satu) Program yang dikelola bersama Bidang Kawasan Permukiman; 2 (Dua) Kegiatan mandiri dan 1 (Satu) Kegiatan yang dikelola bersama Bidang Kawasan Permukiman; dan 7 (Tujuh) sub kegiatan dengan pagu Rp.3.312.819.000 atau 13,70 % dari total pagu. Sasaran strategis dan indikator kinerja yang menjadi tolok ukur capaian kinerja bidang perumahan adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya cakupan layanan akses perumahan yang layak, aman dan terjangkau	Jumlah Perbaikan RTLH	Unit	54
2.	Meningkatnya cakupan layanan program pengembangan perumahan guna pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) di bidang perumahan.	Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni dan Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni	%	100

Adapun capaian kinerja keuangan sampai dengan akhir triwulan I tahun 2022 untuk bidang perumahan sebesar Rp.44.057.941 atau 1,33 % dari total pagu yang dikelola, dan 0,18% terhadap seluruh belanja langsung SKPD.

Untuk capaian kinerja sampai dengan akhir triwulan I tahun 2022 telah mencapai 50% terhadap target kinerja bidang perumahan yang mendukung sasaran strategis perangkat daerah tahun 2022.

3. Bidang Kawasan Permukiman

Mengelola 1 (Satu) program mandiri dan 1 (Satu) Program yang dikelola bersama Bidang Perumahan; 1 (Satu) Kegiatan mandiri dan 1 (Satu) Kegiatan yang dikelola bersama Bidang Perumahan; dan 4 (Empat) sub kegiatan dengan pagu Rp.8.842.855.000 atau 36,57 % dari total

pagu. Sasaran strategis dan indikator kinerja yang menjadi tolok ukur capaian kinerja bidang kawasan permukiman adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman.	Jumlah kawasan kumuh yang tertata	Kawasan	1
2.	Meningkatnya Kualitas PSU Kawasan Permukiman.	Persentase terlaksananya peningkatan kualitas Prasarana, Sarana, Utilitas Umum(PSU) pada Kawasan permukiman.	%	85

Adapun capaian kinerja keuangan sampai dengan akhir triwulan I tahun 2022 untuk bidang kawasan permukiman sebesar Rp.97.560.000 atau 1,10% dari total pagu yang dikelola, dan 0,40% terhadap seluruh belanja langsung SKPD;

Untuk capaian kinerja sampai dengan akhir triwulan I tahun 2022 masih 0 % terhadap target kinerja bidang Kawasan Pemukiman yang mendukung sasaran strategis perangkat daerah tahun 2022. Hal tersebut dikarenakan pada triwulan I tahun 2022, kegiatan yang mendukung sasaran strategis bidang Kawasan Permukiman masih dalam tahap persiapan.

4. Bidang Pertanahan

Mengelola 2 (Dua) program, 2 (Dua) Kegiatan dan 4 (Empat) sub kegiatan dengan pagu Rp.555.500.000 atau 2,30 % dari total pagu. Sasaran strategis dan indikator kinerja yang menjadi tolok ukur capaian kinerja bidang pertanahan adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Data Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara (%)	%	40
2.	Meningkatnya Data Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Persentase Luas Lahan Bersertifikat (%)	%	1,10

Adapun capaian kinerja keuangan sampai dengan akhir triwulan I tahun 2022 untuk bidang pertanahan sebesar Rp.43.535.500 atau 7,84% dari total pagu yang dikelola, dan 0,18% terhadap seluruh belanja langsung SKPD;

Untuk capaian kinerja sampai dengan akhir triwulan I tahun 2022 telah mencapai 74,22% terhadap target kinerja bidang Pertanahan yang mendukung sasaran strategis perangkat daerah tahun 2022.

Agregasi dari capaian kinerja sekretariat dan bidang-bidang teknis menghasilkan capaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yakni sebesar 7,46% untuk keuangan dan 41,41 % untuk capaian terhadap target IKU Perangkat Daerah.

BAB II

PERMASALAHAN DAN DAN TINDAK LANJUT

2.1. Permasalahan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk Triwulan I Tahun Anggaran 2022, terdapat beberapa kendala dan permasalahan, baik dari dalam maupun luar Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah. Kendala dan permasalahan tersebut memiliki pengaruh terhadap pencapaian kinerja maupun realisasi anggaran. Adapun beberapa hal yang menjadi kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Tertundanya paket pekerjaan fisik karena adanya perubahan lokasi pekerjaan sehingga ada beberapa paket pekerjaan yang belum bisa dilelang;
2. Paket-paket fisik merupakan prosentase terbesar dalam anggaran dan kinerja dinas baru masuk dalam proses lelang;
3. Pelaksanaan kegiatan yang terjadwal pada triwulan II, III dan IV;

2.2. Tindak lanjut

Permasalahan di atas telah ditindak lanjuti dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan kinerja penyerapan anggaran dengan koordinasi rutin melalui KPA dan PPTK
2. Mempercepat proses lelang, untuk kegiatan yang tertunda terutama kegiatan yang berpagu besar;
3. Melakukan penyesuaian terhadap anggaran kas.

Dengan demikian diharapkan melalui tindak lanjut terhadap permasalahan dapat dijadikan solusi penyelesaian masalah yang menjadi kendala pencapaian target kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah dan pencapaian keuangan di triwulan II diharap dapat mencapai 50%.

BAB III

PENUTUP

Laporan Triwulanan secara formal merupakan media evaluasi dan akuntabilitas yang memberikan gambaran terhadap pelaksanaan pencapaian target kinerja perangkat daerah. Media pertanggung jawaban ini ditujukan kepada pemberi amanah atau pihak yang memberikan delegasi wewenang dan untuk menjawab berbagai permasalahan yang diminta oleh pihak-pihak yang terkait (*Stakeholder*).

Dengan demikian, Laporan Triwulanan disamping sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan tugas organisasi juga merupakan proses mengevaluasi diri sendiri sehingga akan bermanfaat untuk lebih inovatif dan rasional dalam:

1. Melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mengarahkan kepada pencapaian hasil;
2. Melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mengarahkan kegiatan agar terfokus pada sasaran;
3. Menentukan perubahan dan inovasi yang diperlukan guna memperbaiki keadaan;

Capaian sebesar 7,46 % untuk keuangan dan 41,41 % untuk capaian terhadap target IKU Perangkat Daerah Triwulan I memang belum maksimal dan masih jauh dari target yang diharapkan yakni sebesar 20% untuk keuangan. Berbagai langkah strategis akan terus diupayakan untuk dapat mengejar ketertinggalan tersebut di triwulan berikutnya. Untuk itu Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan program dan kegiatan di Triwulan II TA. 2022 akan melakukan berbagai upaya untuk mencapai hasil yang maksimal dan berupaya untuk segera memenuhi capaian target, sehingga diharapkan pencapaian kinerja dapat menjadi lebih baik.

Palangka Raya, April 2022

KEPALA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN

ERLIN HARDI, S.T.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19740109 200212 1 002

Lampiran : LAPORAN TRIWULAN I TAHUN 2022

Nama PD : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

A. REALISASI KINERJA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	CAPAIAN TRIWULAN I		KET.
					REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	Meningkatnya cakupan layanan akses perumahan yang layak, aman dan terjangkau.	Jumlah Perbaikan RTLH	Unit	54	0	0,00%	Kegiatan yang mendukung capaian kinerja masih dalam tahap persiapan
2	Meningkatnya cakupan layanan program pengembangan perumahan guna pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) di bidang perumahan.	Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni dan Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni	%	100	100	100,00%	Tidak ada Rumah Korban Bencana provinsi dan/atau Relokasi Program Provinsi yang ditangani.
Persentase Capaian IKU Bidang Perumahan						**50,00%**	
3	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Jumlah kawasan kumuh yang tertata	Kawasan	1	0	0,00%	Kegiatan yang mendukung capaian kinerja masih dalam tahap persiapan.
4	Meningkatnya Kualitas PSU Kawasan Permukiman.	Persentase terlaksananya peningkatan kualitas Prasarana, Sarana, Utilitas Umum(PSU) pada kawasan permukiman.	%	85	0	0,00%	
Persentase Capaian IKU Bidang Kawasan Permukiman						**0,00%**	
5	Meningkatnya Data Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara (%)	%	40	20,1	50,25%	Kegiatan yang mendukung capaian kinerja berjalan sesuai jadwal.
6	Meningkatnya Data Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Persentase Luas Lahan Bersertifikat (%)	%	1,10	1,08	98,18%	
Persentase Capaian IKU Bidang Pertanahan						**74,22%**	
Persentase Capaian IKU Perangkat Daerah						**41,41%**	

-

B. REALISASI KEUANGAN

NO.	PROG.	KEG.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI KEUANGAN (Rp.)			KET.
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				**23.628.237.000,00**	**23.628.237.000,00**	**1.760.742.991**	**7,45**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**11.472.563.000,00**	**11.472.563.000,00**	**1.619.125.050**	**14,11**	
	a.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**135.000.000,00**	**135.000.000,00**	**7.243.000**	**5,37**	
		a).	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	80.000.000,00	80.000.000,00	0	-	
		b).	Koordiasi dan Penusunan DPA-SKPD	20.000.000,00	20.000.000,00	7.243.000	36,22	
		c).	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35.000.000,00	35.000.000,00	0	-	
	b.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**5.068.307.227,00**	**5.068.307.227,00**	**519.970.681**	**10,26**	
		a).	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.047.307.227,00	5.047.307.227,00	509.049.681	10,09	
		b).	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	21.000.000,00	21.000.000,00	10.921.000	52,00	
	c.	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**116.000.000,00**	**116.000.000,00**	**8.451.000**	**7,29**	
		a).	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	100.000.000,00	100.000.000,00	0	-	
		b).	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	16.000.000,00	16.000.000,00	8.451.000	52,82	
	d.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**39.109.000,00**	**39.109.000,00**	**10.816.000**	**27,66**	
		a).	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.000.000,00	10.000.000,00	5.448.500	54,49	
		b).	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	9.000.000,00	9.000.000,00	5.367.500	59,64	
		c).	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-Undangan	20.109.000,00	20.109.000,00	0	-	
	e.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**1.038.354.000,00**	**1.038.354.000,00**	**420.065.120**	**40,45**	

-

NO.	PROG.	KEG.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI KEUANGAN (Rp.)			KET.
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
		a).	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	48.000.000,00	48.000.000,00	3.587.500	7,47	
		b).	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	519.463.000,00	519.463.000,00	343.797.000	66,18	
		c).	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	53.891.000,00	53.891.000,00	4.007.000	7,44	
		d).	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.000.000,00	50.000.000,00	10.000.000	20,00	
		e).	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	367.000.000,00	367.000.000,00	58.673.620	15,99	
	f.		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4.332.000.000,00**	**4.332.000.000,00**	**512.600.449**	**11,83**	
		a).	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000,00	7.000.000,00	3.150.000	45,00	
		b).	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	625.000.000,00	625.000.000,00	215.796.949	34,53	
		c).	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.700.000.000,00	3.700.000.000,00	293.653.500	7,94	
	g.		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah**	**743.792.773,00**	**743.792.773,00**	**139.978.800**	**18,82**	
		a).	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	254.100.000,00	254.100.000,00	65.687.000	25,85	
		b).	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	199.000.000,00	199.000.000,00	39.038.800	19,62	
		c).	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	198.000.000,00	198.000.000,00	11.170.000	5,64	
		d).	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	92.692.773,00	92.692.773,00	24.083.000	25,98	
2	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**			**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**-**	**-**	
	a.		**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**0**	**-**	

-

NO.	PROG.	KEG.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI KEUANGAN (Rp.)			KET.
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
		a).	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	200.000.000,00	200.000.000,00	0	-	**Mendukung Pencapaian IKU 2**
3	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**			**5.330.683.000,00**	**5.330.683.000,00**	**44.057.941**	**0,83**	
	a.	**Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha**		**1.037.819.000,00**	**1.037.819.000,00**	**24.157.941**	**2,33**	
		a).	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	125.592.000,00	125.592.000,00	8.850.000	7,05	**Mendukung Pencapaian IKU 1**
		b).	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh	70.000.000,00	70.000.000,00	0	-	**Mendukung Pencapaian IKU 1**
		c).	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	584.058.000,00	584.058.000,00	0	-	**Mendukung Pencapaian IKU 1**
		d).	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	258.169.000,00	258.169.000,00	15.307.941	5,93	**Mendukung Pencapaian IKU 1**
	b.	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha**		**4.292.864.000,00**	**4.292.864.000,00**	**19.900.000,00**	**0,46**	
		a).	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	70.000.000,00	70.000.000,00	19.900.000	28,43	**Mendukung Pencapaian IKU 1**
		b).	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	2.005.000.000,00	2.005.000.000,00	0	-	**Mendukung Pencapaian IKU 1**
		c).	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Pemukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	2.217.864.000,00	2.217.864.000,00	0	-	**Mendukung Pencapaian IKU 3**
4	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**			**6.624.991.000,00**	**6.624.991.000,00**	**97.560.000**	**1,47**	

-

NO.	PROG.	KEG.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI KEUANGAN (Rp.)			KET.
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
	a.	**Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman**		**6.624.991.000,00**	**6.624.991.000,00**	**97.560.000**	**1,47**	
		a).	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	575.870.500,00	575.870.500,00	48.877.500	8,49	**Mendukung Pencapaian IKU 4**
		b).	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	5.904.946.000,00	5.904.946.000,00	0	-	**Mendukung Pencapaian IKU 4**
		c).	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	144.174.500,00	144.174.500,00	48.682.500	33,77	**Mendukung Pencapaian IKU 4**
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				**555.500.000,00**	**555.500.000,00**	**43.535.500,00**	**21,60**	
1	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**			**158.297.500,00**	**158.297.500,00**	**28.000.000**	**17,69**	
	a.	**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**		**158.297.500,00**	**158.297.500,00**	**28.000.000**	**17,69**	
		a).	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	158.297.500,00	158.297.500,00	28.000.000	17,69	**Mendukung Pencapaian IKU 5**
2	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**			**397.202.500,00**	**397.202.500,00**	**15.535.500**	**3,91**	
	a.	**Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**		**397.202.500,00**	**397.202.500,00**	**15.535.500**	**3,91**	
		a).	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	112.570.000,00	112.570.000,00	15.535.500	13,80	**Mendukung Pencapaian IKU 6**
		b).	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	135.494.000,00	135.494.000,00	0	-	**Mendukung Pencapaian IKU 6**
		c).	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	149.138.500,00	149.138.500,00	0	-	**Mendukung Pencapaian IKU 6**
TOTAL				***24.183.737.000,00***	***24.183.737.000,00***	***1.804.278.491,00***	***7,46***	

-

B.1. REKAPITULASI REALISASI KEUANGAN

NO.	BIDANG/ SEKRETARIAT	PROG.	KEG.	SUB KEG.	PAGU		REALISASI KEU			
					Rp	%	Rp		% TERHADAP PAGU BIDANG/ SEKRETARIAT	% TERHADAP PAGU TOTAL PD
1	SEKRETARIAT	1	7	22	Rp 11,472,563,000.00	47.44%	Rp 1,619,125,050.00		14.11%	6.70%
2	PERUMAHAN	1	2	7	Rp 3,312,819,000.00	13.70%	Rp 44,057,941.00		1.33%	0.18%
		1	1							
3	PERMUKIMAN			4	Rp 8,842,855,000.00	36.57%	Rp 97,560,000.00		1.10%	0.40%
		1	1							
4	PERTANAHAN	2	2	4	Rp 555,500,000.00	2.30%	Rp 43,535,500.00		7.84%	0.18%
TOTAL		**6**	**13**	**37**	**Rp 24,183,737,000.00**	**100.00%**	**Rp 1,804,278,491.00**			**7.46%**

Palangka Raya, April 2022

KEPALA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN

ERLIN HARDI, S.T.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19740109 200212 1 002

-

LAPORAN TRIWULAN II
TAHUN 2022

KINERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
JL. D.I Panjaitan No.5 Telp. 0536-4261952 Palangka Raya

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-NYA penyusunan **"LAPORAN TRIWULAN II ATAS KINERJA PERANGKAT DAERAH"** ini dapat diselesaikan. Penyusunan laporan ini secara umum merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan strategi pembangunan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah yang mengarah pada prinsip-prinsip *good governance* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Laporan Triwulan II Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja yang telah dicapai serta pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan yang telah dilaksanakan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya dapat memberikan manfaat dan gambaran tentang hasil pembangunan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang telah dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Triwulan II tahun 2022.

Palangka Raya, Juli 2022

KEPALA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN

ERLIN HARDI, S.T.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19740109 200212 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ..... **i**

Daftar Isi ..... **ii**

BAB I KINERJA **1**

BAB II PERMASALAHAN DAN DAN TINDAK LANJUT **3**

2.1. Permasalahan 3

2.2. Tindak lanjut 3

BAB III PENUTUP **4**

LAMPIRAN

BAB I

KINERJA

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021 terdiri dari 6 program, 13 kegiatan dan 37 sub kegiatan dengan pagu Belanja Langsung sebesar Rp. **24,183,737,000,** didistribusikan pengelolaannya ke 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang teknis dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekretariat

Mengelola 1 (Satu) program, 7 (Tujuh) Kegiatan dan 22 (Dua Puluh Dua) sub kegiatan dengan pagu Rp.11.472.563.000 atau 47,44 persen dari total pagu. Adapun capaian kinerja keuangan sampai dengan akhir triwulan II tahun 2022 untuk sekretariat sebesar Rp.4.239.942.328 atau 36,96% dari total pagu yang dikelola, dan 17,53 % terhadap seluruh belanja langsung SKPD. Capaian ini lebih kecil dari capaian pada triwulan yang sama pada tahun 2021 sebesar Rp.4.813.934.097 atau 44,36 % dari total pagu yang dikelola dan 12,10 % terhadap seluruh belanja langsung SKPD.

2. Bidang Perumahan

Mengelola 1 (Satu) program mandiri dan 1 (Satu) Program yang dikelola bersama Bidang Kawasan Permukiman; 2 (Dua) Kegiatan mandiri dan 1 (Satu) Kegiatan yang dikelola bersama Bidang Kawasan Permukiman; dan 7 (Tujuh) sub kegiatan dengan pagu Rp.3.312.819.000 atau 13,70 % dari total pagu. Sasaran strategis dan indikator kinerja yang menjadi tolok ukur capaian kinerja bidang perumahan adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya cakupan layanan akses perumahan yang layak, aman dan terjangkau	Jumlah Perbaikan RTLH	Unit	54
2.	Meningkatnya cakupan layanan program pengembangan perumahan guna pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) di bidang perumahan.	Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni dan Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni	%	100

Adapun capaian kinerja keuangan sampai dengan akhir triwulan II tahun 2022 untuk bidang perumahan sebesar Rp.301.639.199 atau 9,11 % dari total pagu yang dikelola, dan 1,25% terhadap seluruh belanja langsung SKPD.

Untuk capaian kinerja sampai dengan akhir triwulan II tahun 2022 masih mencapai 50% terhadap target kinerja bidang perumahan yang mendukung sasaran strategis perangkat daerah tahun 2022.

3. Bidang Kawasan Permukiman

Mengelola 1 (Satu) program mandiri dan 1 (Satu) Program yang dikelola bersama Bidang Perumahan; 1 (Satu) Kegiatan mandiri dan 1 (Satu) Kegiatan yang dikelola bersama Bidang Perumahan; dan 4 (Empat) sub kegiatan dengan pagu Rp.8.842.855.000 atau 36,57 % dari total

pagu. Sasaran strategis dan indikator kinerja yang menjadi tolok ukur capaian kinerja bidang kawasan permukiman adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman.	Jumlah kawasan kumuh yang tertata	Kawasan	1
2.	Meningkatnya Kualitas PSU Kawasan Permukiman.	Persentase terlaksananya peningkatan kualitas Prasarana, Sarana, Utilitas Umum(PSU) pada Kawasan permukiman.	%	85

Adapun capaian kinerja keuangan sampai dengan akhir triwulan II tahun 2022 untuk bidang kawasan permukiman sebesar Rp.2.193.248.435,14 atau 24,80% dari total pagu yang dikelola, dan 9,07% terhadap seluruh belanja langsung SKPD;

Untuk capaian kinerja sampai dengan akhir triwulan II tahun 2022 masih 0 % terhadap target kinerja bidang Kawasan Pemukiman yang mendukung sasaran strategis perangkat daerah tahun 2022. Hal tersebut dikarenakan pada triwulan II tahun 2022, kegiatan yang mendukung sasaran strategis bidang Kawasan Permukiman belum selesai 100 % pekerjaan. Diperkirakan akan mulai selesai pada triwulan III.

4. Bidang Pertanahan

Mengelola 2 (Dua) program, 2 (Dua) Kegiatan dan 4 (Empat) sub kegiatan dengan pagu Rp.555.500.000 atau 2,30 % dari total pagu. Sasaran strategis dan indikator kinerja yang menjadi tolok ukur capaian kinerja bidang pertanahan adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Data Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara (%)	%	40
2.	Meningkatnya Data Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Persentase Luas Lahan Bersertifikat (%)	%	1,10

Adapun capaian kinerja keuangan sampai dengan akhir triwulan II tahun 2022 untuk bidang pertanahan sebesar Rp.252.094.000 atau 45,38 % dari total pagu yang dikelola, dan 1,04% terhadap seluruh belanja langsung SKPD;

Untuk capaian kinerja sampai dengan akhir triwulan II tahun 2022 telah mencapai 104,97% terhadap target kinerja bidang Pertanahan yang mendukung sasaran strategis perangkat daerah tahun 2022.

Agregasi dari capaian kinerja sekretariat dan bidang-bidang teknis menghasilkan capaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yakni sebesar 28,89% untuk keuangan dan 51,66 % untuk capaian terhadap target IKU Perangkat Daerah.

BAB II

PERMASALAHAN DAN DAN TINDAK LANJUT

2.1. Permasalahan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk Triwulan II Tahun Anggaran 2022, terdapat beberapa kendala dan permasalahan, baik dari dalam maupun luar Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah. Kendala dan permasalahan tersebut memiliki pengaruh terhadap pencapaian kinerja maupun realisasi anggaran. Adapun beberapa hal yang menjadi kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Tertundanya paket pekerjaan fisik karena adanya perubahan lokasi pekerjaan sehingga ada beberapa paket pekerjaan yang belum bisa dilelang;
2. Paket-paket fisik yang merupakan prosentase terbesar dalam anggaran dan kinerja dinas baru belum mencapai 100 % pekerjaan;
3. Pelaksanaan kegiatan yang terjadwal pada triwulan III dan IV.

2.2. Tindak lanjut

Permasalahan di atas telah ditindak lanjuti dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan kinerja penyerapan anggaran dengan koordinasi rutin melalui KPA dan PPTK
2. Mempercepat proses pekerjaan fisik dengan tetap memperhatikan kualitas pekerjaan, dan mengoptimalkan serapan anggaran melalui pembayaran termin pekerjaan.
3. Segera melakukan proses lelang untuk pekerjaan fisik yang tertunda proses pengadaan barang dan jasanya;
4. Melakukan penyesuaian terhadap anggaran kas.

Dengan demikian diharapkan melalui tindak lanjut terhadap permasalahan dapat dijadikan solusi penyelesaian masalah yang menjadi kendala pencapaian target kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah dan pencapaian keuangan di triwulan III diharap dapat mencapai 85%.

BAB III

PENUTUP

Laporan Triwulanan secara formal merupakan media evaluasi dan akuntabilitas yang memberikan gambaran terhadap pelaksanaan pencapaian target kinerja perangkat daerah. Media pertanggung jawaban ini ditujukan kepada pemberi amanah atau pihak yang memberikan delegasi wewenang dan untuk menjawab berbagai permasalahan yang diminta oleh pihak-pihak yang terkait (*Stakeholder*).

Dengan demikian, Laporan Triwulanan disamping sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan tugas organisasi juga merupakan proses mengevaluasi diri sendiri sehingga akan bermanfaat untuk lebih inovatif dan rasional dalam:

1. Melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mengarahkan kepada pencapaian hasil;
2. Melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mengarahkan kegiatan agar terfokus pada sasaran;
3. Menentukan perubahan dan inovasi yang diperlukan guna memperbaiki keadaan;

Capaian sebesar 28,89% untuk keuangan dan 51,66 % untuk capaian terhadap target IKU Perangkat Daerah Triwulan II memang belum maksimal dan masih jauh dari target yang diharapkan yakni sebesar 50% untuk keuangan. Berbagai langkah strategis akan terus diupayakan untuk dapat mengejar ketertinggalan tersebut di triwulan berikutnya. Untuk itu Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan program dan kegiatan di Triwulan III TA. 2022 akan melakukan berbagai upaya untuk mencapai hasil yang maksimal dan berupaya untuk segera memenuhi capaian target, sehingga diharapkan pencapaian kinerja dapat menjadi lebih baik.

Palangka Raya, Juli 2022

KEPALA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN

ERLIN HARDI, S.T.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19740109 200212 1 002

Lampiran : **LAPORAN TRIWULAN II TAHUN 2022**

Nama PD : **DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

A. REALISASI KINERJA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	CAPAIAN TRIWULAN II		KET.
					REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	Meningkatnya cakupan layanan akses perumahan yang layak, aman dan terjangkau.	Jumlah Perbaikan RTLH	Unit	54	0	0.00%	Kegiatan yang mendukung capaian kinerja masih dalam tahap persiapan.
2	Meningkatnya cakupan layanan program pengembangan perumahan guna pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) di bidang perumahan.	Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni dan Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni	%	100	100	100.00%	Tidak ada Rumah Korban Bencana provinsi dan/atau Relokasi Program Provinsi yang ditangani.
Persentase Capaian IKU Bidang Perumahan						**50.00%**	
3	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Jumlah kawasan kumuh yang tertata	Kawasan	1	0	0.00%	Kegiatan yang mendukung capaian kinerja belum selesai 100 %
4	Meningkatnya Kualitas PSU Kawasan Permukiman.	Persentase terlaksananya peningkatan kualitas Prasarana, Sarana, Utilitas Umum(PSU) pada kawasan permukiman.	%	85	0	0.00%	
Persentase Capaian IKU Bidang Kawasan Permukiman						**0.00%**	
5	Meningkatnya Data Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara (%)	%	40	44.7	111.75%	Kegiatan yang mendukung capaian kinerja berjalan sesuai jadwal.
6	Meningkatnya Data Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Persentase Luas Lahan Bersertifikat (%)	%	1.10	1.08	98.18%	
Persentase Capaian IKU Bidang Pertanahan						**104.97%**	
Persentase Capaian IKU Perangkat Daerah						**51.66%**	

B. REALISASI KEUANGAN

NO.	PROG.	KEG.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI KEUANGAN (Rp.)			KET.
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				**23,628,237,000.00**	**23,628,237,000.00**	**6,734,829,962**	**28.50**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**11,472,563,000.00**	**11,472,563,000.00**	**4,239,942,328**	**36.96**	
	a.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**135,000,000.00**	**135,000,000.00**	**62,194,030**	**46.07**	
		a).	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	80,000,000.00	80,000,000.00	43,599,380	54.50	
		b).	Koordiasi dan Penusunan DPA-SKPD	20,000,000.00	20,000,000.00	11,618,750	58.09	
		c).	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35,000,000.00	35,000,000.00	6,975,900	19.93	
	b.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**5,068,307,227.00**	**5,068,307,227.00**	**1,970,118,258**	**38.87**	
		a).	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,047,307,227.00	5,047,307,227.00	1,959,197,258	38.82	
		b).	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	21,000,000.00	21,000,000.00	10,921,000	52.00	
	c.	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**116,000,000.00**	**116,000,000.00**	**8,451,000**	**7.29**	
		a).	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	100,000,000.00	100,000,000.00	0	-	
		b).	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	16,000,000.00	16,000,000.00	8,451,000	52.82	
	d.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**39,109,000.00**	**39,109,000.00**	**10,816,000**	**27.66**	
		a).	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10,000,000.00	10,000,000.00	5,448,500	54.49	
		b).	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	9,000,000.00	9,000,000.00	5,367,500	59.64	
		c).	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-Undangan	20,109,000.00	20,109,000.00	0	-	
	e.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**1,038,354,000.00**	**1,038,354,000.00**	**809,563,596**	**77.97**	
		a).	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	48,000,000.00	48,000,000.00	20,922,500	43.59	
		b).	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	519,463,000.00	519,463,000.00	502,072,000	96.65	
		c).	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	53,891,000.00	53,891,000.00	30,644,500	56.86	
		d).	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50,000,000.00	50,000,000.00	25,000,000	50.00	
		e).	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	367,000,000.00	367,000,000.00	230,924,596	62.92	
	f.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**4,332,000,000.00**	**4,332,000,000.00**	**1,003,615,668**	**23.17**	
		a).	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7,000,000.00	7,000,000.00	3,150,000	45.00	

NO.	PROG.	KEG.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI KEUANGAN (Rp.)			KET.
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
		b).	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	625,000,000.00	625,000,000.00	263,037,454	42.09	
		c).	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3,700,000,000.00	3,700,000,000.00	737,428,214	19.93	
	g.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah**		**743,792,773.00**	**743,792,773.00**	**375,183,776**	**50.44**	
		a).	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	254,100,000.00	254,100,000.00	129,641,200	51.02	
		b).	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	199,000,000.00	199,000,000.00	107,964,576	54.25	
		c).	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	198,000,000.00	198,000,000.00	108,895,000	55.00	
		d).	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	92,692,773.00	92,692,773.00	28,683,000	30.94	
2	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**			**200,000,000.00**	**200,000,000.00**	**33,816,000.00**	**16.91**	
	a.	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**		**200,000,000.00**	**200,000,000.00**	**33,816,000**	**16.91**	
		a).	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	200,000,000.00	200,000,000.00	33,816,000	16.91	**Mendukung Pencapaian IKU 2**
3	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**			**5,330,683,000.00**	**5,330,683,000.00**	**1,560,477,321**	**29.27**	
	a.	**Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha**		**1,037,819,000.00**	**1,037,819,000.00**	**206,413,199**	**19.89**	
		a).	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	125,592,000.00	125,592,000.00	82,237,000	65.48	**Mendukung Pencapaian IKU 1**
		b).	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh	70,000,000.00	70,000,000.00	0	-	**Mendukung Pencapaian IKU 1**
		c).	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	584,058,000.00	584,058,000.00	35,629,828	6.10	**Mendukung Pencapaian IKU 1**
		d).	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	258,169,000.00	258,169,000.00	88,546,371	34.30	**Mendukung Pencapaian IKU 1**
	b.	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha**		**4,292,864,000.00**	**4,292,864,000.00**	**1,354,064,122.00**	**31.54**	

NO.	PROG.	KEG.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI KEUANGAN (Rp.)			KET.
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
		a).	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	70,000,000.00	70,000,000.00	61,410,000	87.73	**Mendukung Pencapaian IKU 1**
		b).	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	2,005,000,000.00	2,005,000,000.00	0	-	**Mendukung Pencapaian IKU 1**
		c).	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Pemukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	2,217,864,000.00	2,217,864,000.00	1,292,654,122	58.28	**Mendukung Pencapaian IKU 3**
4	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**			**6,624,991,000.00**	**6,624,991,000.00**	**900,594,313**	**13.59**	
	a.	**Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman**		**6,624,991,000.00**	**6,624,991,000.00**	**900,594,313**	**13.59**	
		a).	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	575,870,500.00	575,870,500.00	191,606,800	33.27	**Mendukung Pencapaian IKU 4**
		b).	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	5,904,946,000.00	5,904,946,000.00	633,272,864	10.72	**Mendukung Pencapaian IKU 4**
		c).	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	144,174,500.00	144,174,500.00	75,714,649	52.52	**Mendukung Pencapaian IKU 4**
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				**555,500,000.00**	**555,500,000.00**	**252,094,000.00**	**118.46**	
1	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**			**158,297,500.00**	**158,297,500.00**	**144,738,000**	**91.43**	
	a.	**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**		**158,297,500.00**	**158,297,500.00**	**144,738,000**	**91.43**	
		a).	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	158,297,500.00	158,297,500.00	144,738,000	91.43	**Mendukung Pencapaian IKU 5**
2	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**			**397,202,500.00**	**397,202,500.00**	**107,356,000**	**27.03**	
	a.	**Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**		**397,202,500.00**	**397,202,500.00**	**107,356,000**	**27.03**	
		a).	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	112,570,000.00	112,570,000.00	37,725,500	33.51	**Mendukung Pencapaian IKU 6**
		b).	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	135,494,000.00	135,494,000.00	53,745,500	39.67	**Mendukung Pencapaian IKU 6**

NO.	PROG.	KEG.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI KEUANGAN (Rp.)			KET.
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
		c).	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	149,138,500.00	149,138,500.00	15,885,000	10.65	**Mendukung Pencapaian IKU 6**
TOTAL				***24,183,737,000.00***	***24,183,737,000.00***	***6,986,923,962.14***	***28.89***	

B.1. REKAPITULASI REALISASI KEUANGAN

NO.	BIDANG/ SEKRETARIAT	PROG.	KEG.	SUB KEG.	PAGU		REALISASI KEU			
					Rp	%	Rp		% TERHADAP PAGU BIDANG/ SEKRETARIAT	% TERHADAP PAGU TOTAL PD
1	SEKRETARIAT	1	7	22	Rp 11,472,563,000.00	47.44%	Rp 4,239,942,328.00		36.96%	17.53%
2	PERUMAHAN	1	2	7	Rp 3,312,819,000.00	13.70%	Rp 301,639,199.00		9.11%	1.25%
		1	1							
3	PERMUKIMAN			4	Rp 8,842,855,000.00	36.57%	Rp 2,193,248,435.14		24.80%	9.07%
		1	1							
4	PERTANAHAN	2	2	4	Rp 555,500,000.00	2.30%	Rp 252,094,000.00		45.38%	1.04%
TOTAL		**6**	**13**	**37**	**Rp 24,183,737,000.00**	**100.00%**	**Rp 6,986,923,962.14**			**28.89%**

Palangka Raya, Juli 2022

KEPALA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN

ERLIN HARDI, S.T.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19740109 200212 1 002

LAPORAN TRIWULAN III
TAHUN 2022

KINERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
JL. D.I Panjaitan No.5 Telp. 0536-4261952 Palangka Raya

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Jalan D.I Pandjaitan N0. 05 Palangka Raya 73112
Telepon (0536) 4261952, Website : www. disperkimtan.kalteng..go.id, Email : disperkimtan@kalteng.go.id

Palangka Raya, 07 Oktober 2022

Kepada
Yth. Gubernur Kalimantan Tengah.

Cq. Kepala Biro Organisasi
Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah.

Di -
Palangka Raya

SURAT PENGANTAR

Nomor : 800/ 310/ DPKPP-KT/ X /2022

NO.	JENIS SURAT YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Laporan Triwulan III (Tiga) Atas Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah T.A. 2022.	1 (Satu) Berkas	Disampaikan dengan hormat untuk diketahui dan bahan selanjutnya.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah.

ERLIN HARDI,S.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19740109 200212 1 002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-NYA penyusunan **"LAPORAN TRIWULAN III ATAS KINERJA PERANGKAT DAERAH"** ini dapat diselesaikan. Penyusunan laporan ini secara umum merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan strategi pembangunan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah yang mengarah pada prinsip-prinsip *good governance* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Laporan Triwulan III Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja yang telah dicapai serta pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan yang telah dilaksanakan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya dapat memberikan manfaat dan gambaran tentang hasil pembangunan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang telah dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Triwulan III tahun 2022.

Palangka Raya, Oktober 2022

KEPALA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ERLIN HARDI, S.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19740109 200212 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ..... **i**

Daftar Isi ..... **ii**

BAB I KINERJA **1**

BAB II PERMASALAHAN DAN DAN TINDAK LANJUT **3**

2.1. Permasalahan 3

2.2. Tindak lanjut 3

BAB III PENUTUP **4**

LAMPIRAN

BAB I

KINERJA

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021 terdiri dari 6 program, 13 kegiatan dan 37 sub kegiatan dengan pagu Belanja Langsung sebesar Rp. **24,244,066,49,** bertambah Rp. 60,329,249 dari pagu triwulan II dimana penambahan terapat pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada pergeseran sebelum perubahan tahun 2022. Didistribusikan pengelolaannya ke 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang teknis dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekretariat

Mengelola 1 (Satu) program, 7 (Tujuh) Kegiatan dan 22 (Dua Puluh Dua) sub kegiatan dengan pagu Rp.11,532,892,249 atau 47,57 persen dari total pagu. Adapun capaian kinerja keuangan sampai dengan akhir triwulan III tahun 2022 untuk sekretariat sebesar Rp. 6.546.263.191,00 atau 56,76% dari total pagu yang dikelola, dan 27 % terhadap seluruh belanja langsung SKPD. Capaian ini lebih kecil dari capaian pada triwulan yang sama pada tahun 2021 sebesar Rp.6,733,000,000 atau 63,37 % dari total pagu yang dikelola dan 46,27 % terhadap seluruh belanja langsung SKPD.

2. Bidang Perumahan

Mengelola 1 (Satu) program mandiri dan 1 (Satu) Program yang dikelola bersama Bidang Kawasan Permukiman; 2 (Dua) Kegiatan mandiri dan 1 (Satu) Kegiatan yang dikelola bersama Bidang Kawasan Permukiman; dan 7 (Tujuh) sub kegiatan dengan pagu Rp.3.312.819.000 atau 13,66 % dari total pagu. Sasaran strategis dan indikator kinerja yang menjadi tolok ukur capaian kinerja bidang perumahan adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya cakupan layanan akses perumahan yang layak, aman dan terjangkau	Jumlah Perbaikan RTLH	Unit	54
2.	Meningkatnya cakupan layanan program pengembangan perumahan guna pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) di bidang perumahan.	Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni dan Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni	%	100

Adapun capaian kinerja keuangan sampai dengan akhir triwulan III tahun 2022 untuk bidang perumahan sebesar Rp.501,338,775 atau 15,13 % dari total pagu yang dikelola, dan 2,07% terhadap seluruh belanja langsung SKPD.

Untuk capaian kinerja sampai dengan akhir triwulan III tahun 2022 masih mencapai 50% terhadap target kinerja bidang perumahan yang mendukung sasaran strategis perangkat daerah tahun 2022.

3. Bidang Kawasan Permukiman

Mengelola 1 (Satu) program mandiri dan 1 (Satu) Program yang dikelola bersama Bidang Perumahan; 1 (Satu) Kegiatan mandiri dan 1 (Satu) Kegiatan yang dikelola bersama Bidang

Perumahan; dan 4 (Empat) sub kegiatan dengan pagu Rp.8.842.855.000 atau 36,47 % dari total pagu. Sasaran strategis dan indikator kinerja yang menjadi tolok ukur capaian kinerja bidang kawasan permukiman adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman.	Jumlah kawasan kumuh yang tertata	Kawasan	1
2.	Meningkatnya Kualitas PSU Kawasan Permukiman.	Persentase terlaksananya peningkatan kualitas Prasarana, Sarana, Utilitas Umum(PSU) pada Kawasan permukiman.	%	85

Adapun capaian kinerja keuangan sampai dengan akhir triwulan III tahun 2022 untuk bidang kawasan permukiman sebesar Rp.5,745,289,332.46 atau 64,97% dari total pagu yang dikelola, dan 23,70% terhadap seluruh belanja langsung SKPD;

Untuk capaian kinerja sampai dengan akhir triwulan III tahun 2022 sebesar 131,91 % terhadap target kinerja bidang Kawasan Pemukiman yang mendukung sasaran strategis perangkat daerah tahun 2022. Pada triwulan III tahun 2022, kegiatan yang mendukung sasaran strategis bidang Kawasan Permukiman yaitu Sasaran 1 telah selesai direalisasikan dengan capaian sebesar 200%, melebihi target yang ditentukan sebelumnya sedangkan untuk pencapaian indikator sasaran 2 telah mencapai 63,82 % dari target yang telah ditentukan. Diperkirakan akan selesai pada akhir triwulan IV.

4. Bidang Pertanahan

Mengelola 2 (Dua) program, 2 (Dua) Kegiatan dan 4 (Empat) sub kegiatan dengan pagu Rp.555.500.000 atau 2,29 % dari total pagu. Sasaran strategis dan indikator kinerja yang menjadi tolok ukur capaian kinerja bidang pertanahan adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Data Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara (%)	%	40
2.	Meningkatnya Data Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Persentase Luas Lahan Bersertifikat (%)	%	1,10

Adapun capaian kinerja keuangan sampai dengan akhir triwulan III tahun 2022 untuk bidang pertanahan sebesar Rp.453,793,372 atau 81,69% dari total pagu yang dikelola, dan 1,87% terhadap seluruh belanja langsung SKPD;

Untuk capaian kinerja sampai dengan akhir triwulan III tahun 2022 masih pada posisi 104,97% terhadap target kinerja bidang Pertanahan yang mendukung sasaran strategis perangkat daerah tahun 2022.

Agregasi dari capaian kinerja sekretariat dan bidang-bidang teknis menghasilkan capaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yakni sebesar 54,64% untuk keuangan dan 95,63 % untuk capaian terhadap target IKU Perangkat Daerah.

BAB II

PERMASALAHAN DAN DAN TINDAK LANJUT

2.1. Permasalahan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk Triwulan III Tahun Anggaran 2022, terdapat beberapa kendala dan permasalahan, baik dari dalam maupun luar Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah. Kendala dan permasalahan tersebut memiliki pengaruh terhadap pencapaian kinerja maupun realisasi anggaran. Adapun beberapa hal yang menjadi kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Tertundanya paket pekerjaan fisik karena adanya perubahan lokasi pekerjaan sehingga ada beberapa paket pekerjaan yang baru besa di lelang pada akhir triwulan III.
2. Paket-paket fisik yang merupakan prosentase terbesar dalam anggaran dan kinerja dinas baru belum mencapai 100 % pekerjaan;
3. Masih terdapat pekerjaan- pekerjaan yang mendapat kendala teknis maupun administrasi.
4. Pelaksanaan kegiatan yang terjadwal selesai pada triwulan pada IV.
5. Adanya cadangan dari anggaran gaji tenaga kontrak yang tidak bisa direalisasikan sampai akhir tahun anggaran akibat adanya penonaktifan tenaga kontrak.

2.2. Tindak lanjut

Permasalahan di atas telah ditindak lanjuti dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan kinerja penyerapan anggaran dengan koordinasi rutin melalui KPA dan PPTK
2. Mempercepat proses pekerjaan fisik dengan tetap memperhatikan kualitas pekerjaan, dan mengoptimalkan serapan anggaran melalui pembayaran termin pekerjaan.
3. Segera melakukan proses pencairan uang muka untuk pekerjaan fisik yang sebelumnya tertunda proses pengadaan barang dan jasanya;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin untuk pekerjaan – pekerjaan yang mengalami kendala teknis maupun administrasi.
5. Melakukan penyesuaian terhadap anggaran kas pada perubahan APBD 2022.

Dengan demikian diharapkan melalui tindak lanjut terhadap permasalahan dapat dijadikan solusi penyelesaian masalah yang menjadi kendala pencapaian target kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah dan pencapaian keuangan di akhir tahun anggaran 2022 diharap dapat mencapai > 95%.

BAB III

PENUTUP

Laporan Triwulanan secara formal merupakan media evaluasi dan akuntabilitas yang memberikan gambaran terhadap pelaksanaan pencapaian target kinerja perangkat daerah. Media pertanggung jawaban ini ditujukan kepada pemberi amanah atau pihak yang memberikan delegasi wewenang dan untuk menjawab berbagai permasalahan yang diminta oleh pihak-pihak yang terkait (*Stakeholder*).

Dengan demikian, Laporan Triwulanan disamping sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan tugas organisasi juga merupakan proses mengevaluasi diri sendiri sehingga akan bermanfaat untuk lebih inovatif dan rasional dalam:

1. Melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mengarahkan kepada pencapaian hasil;
2. Melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mengarahkan kegiatan agar terfokus pada sasaran;
3. Menentukan perubahan dan inovasi yang diperlukan guna memperbaiki keadaan;

Capaian sebesar 54,64% untuk keuangan dan 95,63 % untuk capaian terhadap target IKU Perangkat Daerah Triwulan III memang belum maksimal dan masih jauh dari target yang diharapkan yakni sebesar 75% untuk keuangan. Berbagai langkah strategis akan terus diupayakan untuk dapat mengejar ketertinggalan tersebut di triwulan berikutnya. Untuk itu Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan program dan kegiatan di Triwulan IV TA. 2022 akan melakukan berbagai upaya untuk mencapai hasil yang maksimal dan berupaya untuk segera memenuhi capaian target, sehingga diharapkan pencapaian kinerja dapat menjadi lebih baik.

Palangka Raya, Oktober 2022

KEPALA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ERLIN HARDI, S.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19740109 200212 1 002

Lampiran : LAPORAN TRIWULAN III TAHUN 2022

Nama PD : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

A. REALISASI KINERJA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	CAPAIAN TRIWULAN II		KET.
					REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	Meningkatnya cakupan layanan akses perumahan yang layak, aman dan terjangkau.	Jumlah Perbaikan RTLH	Unit	54	0	0,00%	Kegiatan yang mendukung capaian kinerja masih dalam tahap persiapan.
2	Meningkatnya cakupan layanan program pengembangan perumahan guna pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) di bidang perumahan.	Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni dan Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni	%	100	100	100,00%	Tidak ada Rumah Korban Bencana provinsi dan/atau Relokasi Program Provinsi yang ditangani.
		Persentase Capaian IKU Bidang Perumahan				**50,00%**	
3	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Jumlah kawasan kumuh yang tertata	Kawasan	1	2	200,00%	Kegiatan yang mendukung capaian kinerja belum selesai 100 %
4	Meningkatnya Kualitas PSU Kawasan Permukiman.	Persentase terlaksananya peningkatan kualitas Prasarana, Sarana, Utilitas Umum(PSU) pada kawasan permukiman.	%	85	54,25	63,82%	
		Persentase Capaian IKU Bidang Kawasan Permukiman				**131,91%**	
5	Meningkatnya Data Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara (%)	%	40	44,7	111,75%	Kegiatan yang mendukung capaian kinerja berjalan sesuai jadwal.
6	Meningkatnya Data Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Persentase Luas Lahan Bersertifikat (%)	%	1,10	1,08	98,18%	
		Persentase Capaian IKU Bidang Pertanahan				**104,97%**	
		Persentase Capaian IKU Perangkat Daerah				**95,63%**	

B. REALISASI KEUANGAN

NO.	PROG.	KEG.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI KEUANGAN (Rp.)			KET.
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				**23.688.566.249,00**	**23.688.566.249,00**	**12.792.891.298**	**54,00**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**11.532.892.249,00**	**11.532.892.249,00**	**6.546.263.191**	**56,76**	
	a.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**135.000.000,00**	**135.000.000,00**	**106.530.887**	**78,91**	
		a).	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	80.000.000,00	80.000.000,00	64.632.955	80,79	
		b).	Koordiasi dan Penusunan DPA-SKPD	20.000.000,00	20.000.000,00	13.661.750	68,31	
		c).	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35.000.000,00	35.000.000,00	28.236.182	80,67	
	b.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**5.128.636.476,00**	**5.128.636.476,00**	**3.304.924.186**	**64,44**	
		a).	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.107.636.476,00	5.107.636.476,00	3.283.953.936	64,29	
		b).	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	21.000.000,00	21.000.000,00	20.970.250	99,86	
	c.	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**116.000.000,00**	**116.000.000,00**	**56.373.000**	**48,60**	
		a).	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	100.000.000,00	100.000.000,00	40.418.000	40,42	
		b).	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	16.000.000,00	16.000.000,00	15.955.000	99,72	
	d.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**39.109.000,00**	**39.109.000,00**	**28.413.137**	**72,65**	
		a).	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.000.000,00	10.000.000,00	9.952.000	99,52	
		b).	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	9.000.000,00	9.000.000,00	8.350.500	92,78	
		c).	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-Undangan	20.109.000,00	20.109.000,00	10.110.637	50,28	
	e.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**1.038.354.000,00**	**1.038.354.000,00**	**937.791.296**	**90,32**	
		a).	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	48.000.000,00	48.000.000,00	35.745.500	74,47	
		b).	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	519.463.000,00	519.463.000,00	506.800.000	97,56	
		c).	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	53.891.000,00	53.891.000,00	46.344.500	86,00	
		d).	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.000.000,00	50.000.000,00	40.000.000	80,00	
		e).	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	367.000.000,00	367.000.000,00	308.901.296	84,17	

NO.	PROG.	KEG.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI KEUANGAN (Rp.)			KET.
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
	f.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**4.332.000.000,00**	**4.332.000.000,00**	**1.569.621.909**	**36,23**	
		a).	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000,00	7.000.000,00	6.750.000	96,43	
		b).	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	625.000.000,00	625.000.000,00	506.748.138	81,08	
		c).	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.700.000.000,00	3.700.000.000,00	1.056.123.771	28,54	
	g.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah**		**743.792.773,00**	**743.792.773,00**	**542.608.776**	**72,95**	
		a).	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	254.100.000,00	254.100.000,00	183.586.200	72,25	
		b).	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	199.000.000,00	199.000.000,00	146.024.576	73,38	
		c).	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	198.000.000,00	198.000.000,00	154.445.000	78,00	
		d).	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	92.692.773,00	92.692.773,00	58.553.000	63,17	
2	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**			**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**44.753.433,00**	**22,38**	
	a.	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**		**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**44.753.433**	**22,38**	
		a).	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	200.000.000,00	200.000.000,00	44.753.433	22,38	**Mendukung Pencapaian IKU 2**
3	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**			**5.330.683.000,00**	**5.330.683.000,00**	**2.607.514.313**	**48,92**	
	a.	**Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha**		**1.037.819.000,00**	**1.037.819.000,00**	**332.517.952**	**32,04**	
		a).	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	125.592.000,00	125.592.000,00	82.237.000	65,48	**Mendukung Pencapaian IKU 1**
		b).	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh	70.000.000,00	70.000.000,00	16.400.000	23,43	**Mendukung Pencapaian IKU 1**
		c).	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	584.058.000,00	584.058.000,00	77.168.172	13,21	**Mendukung Pencapaian IKU 1**
		d).	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	258.169.000,00	258.169.000,00	156.712.780	60,70	**Mendukung Pencapaian IKU 1**
	b.	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha**		**4.292.864.000,00**	**4.292.864.000,00**	**2.274.996.361,00**	**52,99**	

NO.	PROG.	KEG.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI KEUANGAN (Rp.)			KET.
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
		a).	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	70.000.000,00	70.000.000,00	64.882.000	92,69	**Mendukung Pencapaian IKU 1**
		b).	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	2.005.000.000,00	2.005.000.000,00	59.185.390	2,95	**Mendukung Pencapaian IKU 1**
		c).	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Pemukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	2.217.864.000,00	2.217.864.000,00	2.150.928.971	96,98	**Mendukung Pencapaian IKU 3**
4	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**			**6.624.991.000,00**	**6.624.991.000,00**	**3.594.360.361**	**54,25**	
	a.	**Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman**		**6.624.991.000,00**	**6.624.991.000,00**	**3.594.360.361**	**54,25**	
		a).	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	575.870.500,00	575.870.500,00	224.803.800	39,04	**Mendukung Pencapaian IKU 4**
		b).	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	5.904.946.000,00	5.904.946.000,00	3.233.028.030	54,75	**Mendukung Pencapaian IKU 4**
		c).	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	144.174.500,00	144.174.500,00	136.528.531	94,70	**Mendukung Pencapaian IKU 4**
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				**555.500.000,00**	**555.500.000,00**	**453.793.372,00**	**174,28**	
1	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**			**158.297.500,00**	**158.297.500,00**	**157.998.000**	**99,81**	
	a.	**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**		**158.297.500,00**	**158.297.500,00**	**157.998.000**	**99,81**	
		a).	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	158.297.500,00	158.297.500,00	157.998.000	99,81	**Mendukung Pencapaian IKU 5**
2	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**			**397.202.500,00**	**397.202.500,00**	**295.795.372**	**74,47**	
	a.	**Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**		**397.202.500,00**	**397.202.500,00**	**295.795.372**	**74,47**	
		a).	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	112.570.000,00	112.570.000,00	90.744.860	80,61	**Mendukung Pencapaian IKU 6**
		b).	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	135.494.000,00	135.494.000,00	134.980.500	99,62	**Mendukung Pencapaian IKU 6**
		c).	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	149.138.500,00	149.138.500,00	70.070.012	46,98	**Mendukung Pencapaian IKU 6**
TOTAL				***24.244.066.249,00***	***24.244.066.249,00***	***13.246.684.670,46***	***54,64***	

B.1. REKAPITULASI REALISASI KEUANGAN

NO.	BIDANG/ SEKRETARIAT	PROG.	KEG.	SUB KEG.	PAGU		REALISASI KEU		
					Rp	%	Rp	% TERHADAP PAGU BIDANG/ SEKRETARIAT	% TERHADAP PAGU TOTAL PD
1	SEKRETARIAT	1	7	22	Rp 11.532.892.249,00	47,57%	Rp 6.546.263.191,00	56,76%	27,00%
2	PERUMAHAN	1	2	7	Rp 3.312.819.000,00	13,66%	Rp 501.338.775,00	15,13%	2,07%
		1	1						
3	PERMUKIMAN			4	Rp 8.842.855.000,00	36,47%	Rp 5.745.289.332,46	64,97%	23,70%
		1	1						
4	PERTANAHAN	2	2	4	Rp 555.500.000,00	2,29%	Rp 453.793.372,00	81,69%	1,87%
TOTAL		**6**	**13**	**37**	**Rp 24.244.066.249,00**	**100,00%**	**Rp 13.246.684.670,46**		**54,64%**

Palangka Raya, Oktober 2022

KEPALA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ERLIN HARDI, S.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19740109 200212 1 002

LAPORAN TRIWULAN IV
TAHUN 2022

KINERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
JL. D.I Panjaitan No.5 Telp. 0536-4261952 Palangka Raya

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-NYA penyusunan **"LAPORAN TRIWULAN IV ATAS KINERJA PERANGKAT DAERAH"** ini dapat diselesaikan. Penyusunan laporan ini secara umum merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan strategi pembangunan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah yang mengarah pada prinsip-prinsip *good governance* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Laporan Triwulan IV Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja yang telah dicapai serta pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan yang telah dilaksanakan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya dapat memberikan manfaat dan gambaran tentang hasil pembangunan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang telah dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Triwulan IV tahun 2022.

Palangka Raya, Januari 2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ERLIN HARDI, S.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19740109 200212 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ..... **i**

Daftar Isi ..... **ii**

BAB I KINERJA **1**

BAB II PERMASALAHAN DAN DAN TINDAK LANJUT **3**

2.1. Permasalahan 3

2.2. Tindak lanjut 3

BAB III PENUTUP **4**

LAMPIRAN

BAB I

KINERJA

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2022 terdiri dari 6 program, 13 kegiatan dan 37 sub kegiatan dengan pagu Belanja Langsung sebesar Rp. **23,010,751,256,** berkurang Rp. 1,233,315,234 dari pagu triwulan III. Didistribusikan pengelolaannya ke 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang teknis dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekretariat

Mengelola 1 (Satu) program, 7 (Tujuh) Kegiatan dan 22 (Dua Puluh Dua) sub kegiatan dengan pagu Rp.10,298,517,256 atau 44,76 persen dari total pagu. Adapun capaian kinerja keuangan sampai dengan akhir triwulan IV tahun 2022 untuk sekretariat sebesar Rp. 9,826,667,053 atau 95,42% dari total pagu yang dikelola, dan 42,70 % terhadap seluruh belanja langsung SKPD.

2. Bidang Perumahan

Mengelola 1 (Satu) program mandiri dan 1 (Satu) Program yang dikelola bersama Bidang Kawasan Permukiman; 2 (Dua) Kegiatan mandiri dan 1 (Satu) Kegiatan yang dikelola bersama Bidang Kawasan Permukiman; dan 7 (Tujuh) sub kegiatan dengan pagu Rp.3,102,819,000 atau 13,48 % dari total pagu. Sasaran strategis dan indikator kinerja yang menjadi tolok ukur capaian kinerja bidang perumahan adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya cakupan layanan akses perumahan yang layak, aman dan terjangkau	Jumlah Perbaikan RTLH	Unit	54	54
2.	Meningkatnya cakupan layanan program pengembangan perumahan guna pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) di bidang perumahan.	Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni dan Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni	%	100	100

Adapun capaian kinerja keuangan sampai dengan akhir triwulan IV tahun 2022 untuk bidang perumahan sebesar Rp.3,063,931,738 atau 98,75 % dari total pagu yang dikelola, dan 13,32% terhadap seluruh belanja langsung SKPD.

Untuk capaian kinerja sampai dengan akhir triwulan IV tahun 2022 mencapai 100% terhadap target kinerja bidang perumahan yang mendukung sasaran strategis perangkat daerah tahun 2022.

3. Bidang Kawasan Permukiman

Mengelola 1 (Satu) program mandiri dan 1 (Satu) Program yang dikelola bersama Bidang Perumahan; 1 (Satu) Kegiatan mandiri dan 1 (Satu) Kegiatan yang dikelola bersama Bidang Perumahan; dan 4 (Empat) sub kegiatan dengan pagu Rp.8,953,915,000 atau 38,91 % dari total pagu. Sasaran strategis dan indikator kinerja yang menjadi tolok ukur capaian kinerja bidang kawasan permukiman adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman.	Jumlah kawasan kumuh yang tertata	Kawasan	1	2
2.	Meningkatnya Kualitas PSU Kawasan Permukiman.	Persentase terlaksananya peningkatan kualitas Prasarana, Sarana, Utilitas Umum(PSU) pada Kawasan permukiman.	%	85	100

Adapun capaian kinerja keuangan sampai dengan akhir triwulan IV tahun 2022 untuk bidang kawasan permukiman sebesar Rp.8,801,251,674.46 atau 98,30% dari total pagu yang dikelola, dan 38,25% terhadap seluruh belanja langsung SKPD;

Untuk capaian kinerja sampai dengan akhir triwulan IV tahun 2022 sebesar 158,82 % terhadap target kinerja bidang Kawasan Pemukiman yang mendukung sasaran strategis perangkat daerah tahun 2022. Pada triwulan IV tahun 2022, kegiatan yang mendukung sasaran strategis bidang Kawasan Permukiman yaitu Sasaran 1 telah selesai direalisasikan dengan capaian sebesar 200%, melebihi target yang ditentukan sebelumnya sedangkan untuk pencapaian indikator sasaran 2 mencapai 117,65% dari target yang telah ditentukan.

4. Bidang Pertanahan

Mengelola 2 (Dua) program, 2 (Dua) Kegiatan dan 4 (Empat) sub kegiatan dengan pagu Rp.655,500,000 atau 2,85 % dari total pagu. Sasaran strategis dan indikator kinerja yang menjadi tolok ukur capaian kinerja bidang pertanahan adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Data Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara (%)	%	40	44,7
2.	Meningkatnya Data Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Persentase Luas Lahan Bersertifikat (%)	%	1,10	1,08

Adapun capaian kinerja keuangan sampai dengan akhir triwulan IV tahun 2022 untuk bidang pertanahan sebesar Rp.654,498,642 atau 99,85% dari total pagu yang dikelola, dan 2,84% terhadap seluruh belanja langsung SKPD;

Untuk capaian kinerja sampai dengan akhir triwulan IV tahun 2022 masih pada posisi 104,97% terhadap target kinerja bidang Pertanahan yang mendukung sasaran strategis perangkat daerah tahun 2022. Kegiatan yang mendukung sasaran strategis bidang Kawasan Pertanahan yaitu Sasaran 1 telah selesai direalisasikan dengan capaian sebesar 111,75 %, melebihi target yang ditentukan sebelumnya sedangkan untuk pencapaian indikator sasaran 2 mencapai 98,18% dari target yang telah ditentukan.

Agregasi dari capaian kinerja sekretariat dan bidang-bidang teknis menghasilkan capaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yakni sebesar 97,11% untuk keuangan dan 121,26 % untuk capaian terhadap target IKU Perangkat Daerah.

BAB II

PERMASALAHAN DAN DAN TINDAK LANJUT

2.1. Permasalahan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk Triwulan IV Tahun Anggaran 2022, terdapat beberapa kendala dan permasalahan, baik dari dalam maupun luar Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah. Kendala dan permasalahan tersebut memiliki pengaruh terhadap pencapaian kinerja maupun realisasi anggaran. Adapun beberapa hal yang menjadi kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Paket-paket fisik yang merupakan prosentase terbesar dalam anggaran dan kinerja dinas baru belum mencapai 100 % pekerjaan;
2. Masih terdapat pekerjaan- pekerjaan yang mendapat kendala teknis maupun administrasi.

2.2. Tindak lanjut

Permasalahan di atas telah ditindak lanjuti dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan kinerja penyerapan anggaran dengan koordinasi rutin melalui KPA dan PPTK
2. Mempercepat proses pekerjaan fisik dengan tetap memperhatikan kualitas pekerjaan, dan mengoptimalkan serapan anggaran melalui pembayaran termin pekerjaan.
3. Segera melakukan proses pencairan termin untuk pekerjaan fisik yang sebelumnya tertunda proses pengadaan barang dan jasanya;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin untuk pekerjaan – pekerjaan yang mengalami kendala teknis maupun administrasi.
5. Melakukan penyesuaian terhadap anggaran kas pada perubahan APBD 2022.

BAB III

PENUTUP

Laporan Triwulanan secara formal merupakan media evaluasi dan akuntabilitas yang memberikan gambaran terhadap pelaksanaan pencapaian target kinerja perangkat daerah. Media pertanggung jawaban ini ditujukan kepada pemberi amanah atau pihak yang memberikan delegasi wewenang dan untuk menjawab berbagai permasalahan yang diminta oleh pihak-pihak yang terkait (*Stakeholder*).

Dengan demikian, Laporan Triwulanan disamping sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan tugas organisasi juga merupakan proses mengevaluasi diri sendiri sehingga akan bermanfaat untuk lebih inovatif dan rasional dalam:

1. Melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mengarahkan kepada pencapaian hasil;
2. Melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mengarahkan kegiatan agar terfokus pada sasaran;
3. Menentukan perubahan dan inovasi yang diperlukan guna memperbaiki keadaan;

Capaian sebesar 97,11% untuk keuangan dan 121,26 % untuk capaian terhadap target IKU Perangkat Daerah Triwulan IV merupakan hasil kerja keras dan upaya bersama yang telah dilakukan. Berbagai langkah strategis akan terus diupayakan untuk dapat mempertahankan bahkan memperbaiki kinerja pada tahun berikutnya. Untuk itu Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan program dan kegiatan di tahun 2023 akan melakukan berbagai upaya untuk mencapai hasil yang maksimal dan berupaya untuk segera memenuhi capaian target, sehingga diharapkan pencapaian kinerja dapat menjadi lebih baik.

Palangka Raya, Januari 2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN

ERLIN HARDI, S.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19740109 200212 1 002

Lampiran : LAPORAN TRIWULAN IV TAHUN 2022

Nama PD : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

A. REALISASI KINERJA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	CAPAIAN TRIWULAN IV		KET.
					REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	Meningkatnya cakupan layanan akses perumahan yang layak, aman dan terjangkau.	Jumlah Perbaikan RTLH	Unit	54	54	100,00%	
2	Meningkatnya cakupan layanan program pengembangan perumahan guna pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) di bidang perumahan.	Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni dan Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni	%	100	100	100,00%	Tidak ada Rumah Korban Bencana provinsi dan/atau Relokasi Program Provinsi yang ditangani.
Persentase Capaian IKU Bidang Perumahan						**100,00%**	
3	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Jumlah kawasan kumuh yang tertata	Kawasan	1	2	200,00%	
4	Meningkatnya Kualitas PSU Kawasan Permukiman.	Persentase terlaksananya peningkatan kualitas Prasarana, Sarana, Utilitas Umum(PSU) pada kawasan permukiman.	%	85	100	117,65%	
Persentase Capaian IKU Bidang Kawasan Permukiman						**158,82%**	
5	Meningkatnya Data Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara (%)	%	40	44,7	111,75%	
6	Meningkatnya Data Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Persentase Luas Lahan Bersertifikat (%)	%	1,10	1,08	98,18%	
Persentase Capaian IKU Bidang Pertanahan						**104,97%**	
Persentase Capaian IKU Perangkat Daerah						**121,26%**	

B. REALISASI KEUANGAN

NO.	PROG.	KEG.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI KEUANGAN (Rp.)			KET.
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				**22.355.251.256,00**	**22.355.251.256,00**	**21.691.850.465**	**97,03**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**10.298.517.256,00**	**10.298.517.256,00**	**9.826.667.053**	**95,42**	
	a.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**138.250.000,00**	**138.250.000,00**	**137.845.137**	**99,71**	
		a).	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	80.000.000,00	80.000.000,00	79.770.955	99,71	
		b).	Koordiasi dan Penusunan DPA-SKPD	30.000.000,00	30.000.000,00	29.838.000	99,46	
		c).	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28.250.000,00	28.250.000,00	28.236.182	99,95	
	b.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**4.910.762.799,00**	**4.910.762.799,00**	**4.525.754.408**	**92,16**	
		a).	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.889.762.799,00	4.889.762.799,00	4.504.784.158	92,13	
		b).	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	21.000.000,00	21.000.000,00	20.970.250	99,86	
	c.	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**116.000.000,00**	**116.000.000,00**	**115.908.000**	**99,92**	
		a).	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	100.000.000,00	100.000.000,00	99.953.000	99,95	
		b).	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	16.000.000,00	16.000.000,00	15.955.000	99,72	
	d.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**39.109.000,00**	**39.109.000,00**	**36.213.137**	**92,60**	
		a).	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.000.000,00	10.000.000,00	9.952.000	99,52	
		b).	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	9.000.000,00	9.000.000,00	8.350.500	92,78	
		c).	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-Undangan	20.109.000,00	20.109.000,00	17.910.637	89,07	
	e.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**1.676.104.000,00**	**1.676.104.000,00**	**1.657.069.262**	**98,86**	
		a).	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	58.000.000,00	58.000.000,00	57.645.500	99,39	
		b).	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	829.463.000,00	829.463.000,00	811.063.500	97,78	
		c).	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	69.891.000,00	69.891.000,00	69.891.000	100,00	
		d).	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000	100,00	
		e).	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	658.750.000,00	658.750.000,00	658.469.262	99,96	

NO.	PROG.	KEG.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI KEUANGAN (Rp.)			KET.
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
	f.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**2.430.498.684,00**	**2.430.498.684,00**	**2.369.872.033**	**97,51**	
		a).	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000,00	7.000.000,00	6.750.000	96,43	
		b).	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	602.438.684,00	602.438.684,00	589.453.761	97,84	
		c).	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.821.060.000,00	1.821.060.000,00	1.773.668.272	97,40	
	g.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah**		**987.792.773,00**	**987.792.773,00**	**984.005.076**	**99,62**	
		a).	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	332.300.000,00	332.300.000,00	331.474.200	99,75	
		b).	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	294.800.000,00	294.800.000,00	293.103.876	99,42	
		c).	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	238.000.000,00	238.000.000,00	237.250.000	99,68	
		d).	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	122.692.773,00	122.692.773,00	122.177.000	99,58	
2	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**			**182.000.000,00**	**182.000.000,00**	**175.999.026,00**	**96,70**	
	a.	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**		**182.000.000,00**	**182.000.000,00**	**175.999.026**	**96,70**	
		a).	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	182.000.000,00	182.000.000,00	175.999.026	96,70	**Mendukung Pencapaian IKU 2**
3	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**			**5.138.683.000,00**	**5.138.683.000,00**	**5.060.897.512**	**98,49**	
	a.	**Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha**		**796.319.000,00**	**796.319.000,00**	**769.454.262**	**96,63**	
		a).	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	161.704.138,00	161.704.138,00	159.704.747	98,76	**Mendukung Pencapaian IKU 1**
		b).	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh	66.504.000,00	66.504.000,00	66.491.000	99,98	**Mendukung Pencapaian IKU 1**
		c).	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	199.760.152,00	199.760.152,00	196.773.152	98,50	**Mendukung Pencapaian IKU 1**
		d).	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	368.350.710,00	368.350.710,00	346.485.363	94,06	**Mendukung Pencapaian IKU 1**
	b.	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha**		**4.342.364.000,00**	**4.342.364.000,00**	**4.291.443.250,00**	**98,83**	

NO.	PROG.	KEG.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI KEUANGAN (Rp.)			KET.
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
		a).	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	77.500.000,00	77.500.000,00	76.700.000	98,97	**Mendukung Pencapaian IKU 1**
		b).	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	2.047.000.000,00	2.047.000.000,00	2.041.778.450	99,74	**Mendukung Pencapaian IKU 1**
		c).	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Pemukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	2.217.864.000,00	2.217.864.000,00	2.172.964.800	97,98	**Mendukung Pencapaian IKU 3**
4	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**			**6.736.051.000,00**	**6.736.051.000,00**	**6.628.286.874**	**98,40**	
	a.	**Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman**		**6.736.051.000,00**	**6.736.051.000,00**	**6.628.286.874**	**98,40**	
		a).	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	595.930.500,00	595.930.500,00	583.850.500	97,97	**Mendukung Pencapaian IKU 4**
		b).	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	5.964.946.000,00	5.964.946.000,00	5.869.296.874	98,40	**Mendukung Pencapaian IKU 4**
		c).	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	175.174.500,00	175.174.500,00	175.139.500	99,98	**Mendukung Pencapaian IKU 4**
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				**655.500.000,00**	**655.500.000,00**	**654.498.642,00**	**199,67**	
1	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**			**158.297.500,00**	**158.297.500,00**	**157.998.000**	**99,81**	
	a.	**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**		**158.297.500,00**	**158.297.500,00**	**157.998.000**	**99,81**	
		a).	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	158.297.500,00	158.297.500,00	157.998.000	99,81	**Mendukung Pencapaian IKU 5**
2	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**			**497.202.500,00**	**497.202.500,00**	**496.500.642**	**99,86**	
	a.	**Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**		**497.202.500,00**	**497.202.500,00**	**496.500.642**	**99,86**	
		a).	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	155.070.000,00	155.070.000,00	154.753.200	99,80	**Mendukung Pencapaian IKU 6**
		b).	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	192.994.000,00	192.994.000,00	192.796.500	99,90	**Mendukung Pencapaian IKU 6**
		c).	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	149.138.500,00	149.138.500,00	148.950.942	99,87	**Mendukung Pencapaian IKU 6**
TOTAL				***23.010.751.256,00***	***23.010.751.256,00***	***22.346.349.107,46***	***97,11***	

B.1. REKAPITULASI REALISASI KEUANGAN

NO.	BIDANG/ SEKRETARIAT	PROG.	KEG.	SUB KEG.	PAGU		REALISASI KEU		
					Rp	%	Rp	% TERHADAP PAGU BIDANG/ SEKRETARIAT	% TERHADAP PAGU TOTAL PD
1	SEKRETARIAT	1	7	22	Rp 10.298.517.256,00	44,76%	Rp 9.826.667.053,00	95,42%	42,70%
2	PERUMAHAN	1	2	7	Rp 3.102.819.000,00	13,48%	Rp 3.063.931.738,00	98,75%	13,32%
		1	1						
3	PERMUKIMAN			4	Rp 8.953.915.000,00	38,91%	Rp 8.801.251.674,46	98,30%	38,25%
		1	1						
4	PERTANAHAN	2	2	4	Rp 655.500.000,00	2,85%	Rp 654.498.642,00	99,85%	2,84%
TOTAL		**6**	**13**	**37**	**Rp 23.010.751.256,00**	**100,00%**	**Rp 22.346.349.107,46**		**97,11%**

Palangka Raya, Januari 2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ERLIN HARDI, S.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19740109 200212 1 002

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2022

LKIP DISPERKIMTAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2022